iNOVASI UNTUK NEGERi
infoindonesia
https://infoindonesia.id

EDISI #35 SEPTEMBER 2023

CAWAPRES GANJAR PILIHAN MEGAWATI RIDWAN KAMIL ATAU AHY

HEBOH PENGHAPUSAN PERTALITE

CATATAN UNTUK PEMIMPIN MASA DEPAN

PARTAI UMAT TAKUT GAGAL KE SENAYAN

PKS NGGAK BISA JAUH DARI ANIES

WUJUDKAN ASIA TENGGARA EPISENTRUM PERTUMBUHAN EKONOMI

JODOH ERICK THOHIR TERGANTUNG JOKOWI

SRIWIJAYA RANAU GRAN FONDO DARI SUMSEL UNTUK INDONESIA

JANGAN PILIH PRESIDEN PECAH BELAH UMAT

Rp75.000,-

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERi

IKLAN BACK COVER
RP 75.000.000
IKLAN DISPLAY/HAL
RP 50.000.000
IKLAN ADVERTORIAL/HAL
RP 65.000.000
CENTER SPREAD
RP 80.000.000

INFO PASANG IKLAN
ZULFAHMI
+62 813 8019 6507

Kami Hadir Memberikan info Tersebut

- **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**

infoindonesia.id @info_indonesia.id @_infoindoneisa redaksi@infoindonesia.id

Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
●TELP 021-791 96781 ●FAX 021-791 96786

TABLOID REFERENSI PEMILU 2024

EDISI BULAN SEPTEMBER 2023

DAFTAR ISI

7
INFO UTAMA
Menteri BUMN, Erick Thohir, kini menjadi pilihan teratas sebagai figur yang tepat posisi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Elektabilitasnya semakin jauh meninggalkan tokoh lain dalam perebutan orang nomor dua di republik ini.

24
INFO SUMSEL
Upaya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) dalam mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya kepuasan publik yang mencapai 89,65 persen.

42
INFO PILKADA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, dan Wakil Gubernur, Ria Norsan, resmi mengakhiri masa jabatannya pada 5 September 2023. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Harrison Azroi sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

56
INFO NASIONAL
Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2023 telah menunjuk sepuluh penjabat gubernur melalui sidang tim penilai akhir (TPA). 9 penjabat gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

72

INFO EKONOMI

Lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman memerlukan biaya tambahan. Tapi siapa yang siap menanggung beban?

76

INFO ISTANA

Indonesia kembali sukses menggelar pertemuan internasional dengan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta, 5-7 September 2023.

87

INFO KHUSUS

Meski hanya latihan perang, Garuda Shield semakin penting. Tambahan Super mencerminkannya.

3 DARI REDAKSI
20 OPINI
32 INFO PARTAI
36 INFO MPR
38 INFO PEMILU
54 INFO PALEMBANG
86 KAJI

80

INFO SELEBRITI

Banyak artis Indonesia saat ini memilih untuk terlibat dalam dunia politik. Mereka di antaranya merupakan artis muda seperti Verrell Bramasta dan Al Ghazali yang berani mencalonkan diri sebagai caleg.

NFO REDAKSI

JADWAL

Belum ada yang tampak keberatan. Tinggal kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka jadwal pendaftaran pasangan kandidat calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan lebih cepat dan lebih singkat.

Lebih cepat dari jadwal semula pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024. Jadwal baru yang menunggu kesepakatan dengan pemerintah maupun DPR adalah mulai 10 hingga 16 Oktober 2023, dengan pengumuman pendaftaran pada 7 hingga 9 Oktober 2023.

Juga lebih singkat dari semula memakan waktu lebih dari satu bulan menjadi hanya sekitar sepekan.

Berdasarkan draf PKPU, masa verifikasi kelengkapan dokumen pasangan calon akan dilakukan pada 10 hingga 19 Oktober 2023. Jadwal ini bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon yang dilakukan pada 10 hingga 18 Oktober 2023.

Sedangkan untuk penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden, draft PKPU menjadwalkannya pada 13 November 2023. Diakhiri dengan penetapan nomor urut pasangan calon pada 14 November 2023.

Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana implikasi perubahan itu? Banyak, antara lain terkait dengan jadwal kampanye sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 276 ayat 1 UU Pemilu ini berbunyi: Kampanye Pemilu ... dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Juga keharusan kandidat Capres-Cawapres mengundurkan diri sebagai pejabat negara (setingkat menteri) jika mendaftar ke KPU sebagaimana bunyi Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu tadi. Ada pula ketentuan perlunya izin Presiden untuk pejabat Gubernur, Bupati, Wali Kota dan atau wakilnya yang maju dalam pemilihan presiden.

Jadi, jika jadwal pendaftaran dipercepat, kemungkinannya adalah masa kampanye yang juga lebih segera. Mungkin lebih panjang jika jadwal Pemilu pada 14 Februari 2024 tak berubah. Dengan segala dampak bergandanya.

Nah, apapun alasannya, ketentuan-ketentuan menyangkut Pemilu, khususnya PKPU, sudah seharusnya selaras atau sinkron dengan UU Pemilu. Jangan sampai di kemudian hari baru ditemukan ketidakselarasan yang menyebabkan tudingan-tudingan negatif terhadap penyelenggaraan Pemilu legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini Pilpres.

Lebih dari itu, ketentuan-ketentuan Pemilu hendaknya mengingat kutipan Cicero ini: Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:
Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
●TELP 021-791 96781
●FAX 021-791 96786

Twitter : @1nfoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal **DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Usman Rizal **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Zulfahmi Jamba **PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:** Rahmad Romli **REDAKTUR PELAKSANA:** Rusdiyono **REDAKTUR :** Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irma Yani, Rusdiyono, Nina Erlina, Ega Tri Gustina, Rusdy Setiawan Putra **REPORTER:** Achmad Tirta Wahyuda, Anugrah Dany, Rifky Ilmi, Budi Prasetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim. Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir Boyke Parningotan Hutapea (Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Lalu Suparman Ambakti (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung) **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achiles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali **KEUANGAN:** Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** RM Solehin, Zul Jamba **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar **BANK ACCOUNT:** A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA : No Rek : 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur

LAMAR ERICK THOHIR PASTI MENANG

Pilihan Jokowi Buat Prabowo

Menteri BUMN, Erick Thohir, kini menjadi pilihan teratas sebagai figur yang tepat di posisi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Elektabilitasnya semakin jauh meninggalkan tokoh lain dalam perebutan orang nomor dua di republik ini.

Berdasarkan survei yang digelar Polling Institute yang dilakukan 21-25 Agustus 2023, mayoritas responden memilih Erick Thohir dalam dua simulasi, baik 19 nama maupun lima nama cawapres. Dalam simulasi 19 nama, Erick menjadi cawapres terkuat dengan raihan 15,1 persen dan 24,5 persen dalam simulasi lima nama.

Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, mengatakan, nama Erick juga akan membawa kemenangan pada capresnya. Dalam tiga simulasi, capres yang berpasangan dengan Erick selalu menempati posisi teratas.

Dalam simulasi pertama, pasangan Prabowo-Erick meraih 34,7 persen atau unggul dari pasangan Anies-AHY sebesar 18,5 persen dan Ganjar-Ridwan Kamil dengan 34,2 persen.

Simulasi kedua, Ganjar-Erick mendapat 37,2 persen atau unggul dari Anies-Yenny Wahid sebesar 16,0 persen dan Prabowo-Muhaimin dengan 35,1 persen.

Kemudian, Prabowo-Erick kembali menjadi teratas dengan 38,5 persen atau unggul dari Anies-AHY dengan 18,8 persen dan Ganjar-Sandiaga dengan 32,5 persen.

"Dalam simulasi dua pasangan, Erick dan pasangan selalu unggul jauh di atas pasangan lain," ujar Kennedy saat memaparkan hasil survei bertajuk Peta Persaingan Capres-Cawapres dan Isu-Isu Terkini di Jakarta, Minggu, 10 September 2023.

Kennedy mencontohkan Prabowo-Erick meraih 46,7 persen, sementara Ganjar-Ridwan Kamil sebesar 39,1 persen. Dalam simulasi berikutnya, Erick yang berpasangan dengan Prabowo meraih 47,1 persen dan unggul atas pasangan Ganjar-Sandiaga dengan 38,0 persen. Pasangan Prabowo-Erick pun kembali unggul dengan 48,0 persen saat berhadapan dengan Ganjar-Gibran sebesar 36,6 persen.

Kennedy menyampaikan Erick pun meraih posisi tertinggi dalam simulasi lima nama cawapres untuk Prabowo Subianto. Erick meraih 28,8 persen suara responden atau terpaut cukup jauh dari empat tokoh lain seperti Gibran Rakabuming dengan 17,3 persen, Muhaimin Iskandar dengan 8,8 persen, Khofifah Indar Parawansa dengan 8,5 persen, dan Airlangga Hartarto dengan 4,2 persen.

"Di antara lima nama dan kemungkinan nama lainnya, Erick Thohir paling banyak dipilih sebagai wakil untuk mendampingi Prabowo. Alasannya paling banyak karena kinerjanya dinilai bagus," kata Kennedy.

Peneliti politik Indonesia dari Havard University Seth Soderborg itu mengatakan, hasil survei Polling Institute tersebut menunjukkan bahwa Erick memberikan efek positif terhadap Prabowo di Pilpres 2024 karena lebih kompetitif.

"Jadi, (elektabilitas Prabowo) lebih kuat kalau ada Erick. Erick lebih kompetitif dibanding Gibran pada data survei sekarang," ujarnya.

Dia mengingatkan, sosok bakal cawapres memiliki efek besar di tengah ketatnya persaingan antara Ganjar versus Prabowo, sehingga akan terlihat

dalam kampanye.

Menurut dia, sosok bacawapres memiliki efek bukan hanya dilihat dalam satu survei saja, namun setelah masuk poros, bisa membantu penyelenggaraan kampanye.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai, kedua sosok tersebut memiliki peluang besar. Hal ini lantaran Erick mampu menutup kelemahan yang dimiliki oleh capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut.

"Duet Prabowo Subianto dengan Erick Thohir ini sangat potensial terjadi. Bahkan saya kira Erick Thohir ini bisa menjadi pendobrak celah lemah di Prabowo," kata Adib, Rabu, 6 September 2023.

Menurut Adib, Erick mampu menutup kelemahan yang dimiliki oleh Prabowo dalam sisi elektabilitas. Eks Presiden Inter Milan tersebut mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Termasuk dari kalangan para pendukung Presiden Jokowi.

> **Di antara lima nama dan kemungkinan nama lainnya, Erick Thohir paling banyak dipilih sebagai wakil untuk mendampingi Prabowo.**

Hal itu karena Erick adalah pemimpin andalan dan kepercayaan dari Presiden Jokowi di pemerintahan. Erick selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Terbaru, Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah tersebut berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk bersama-sama meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi situasi dan tantangan ekonomi global. Tentu pencapaian itu dipuji oleh Presiden Jokowi.

"Erick Thohir ini orang yang bisa kerja, dan sudah banyak publik yang melihat kerjanya. Untuk itu ia disebut tokoh profesional dan kerap dipuji oleh Presiden Jokowo," ujar Adib.

Atas keberhasilan tersebut, menurut Adib, Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas dari Prabowo pada Pilpres 2024. Apalagi dalam berbagai hasil survei, anggota Kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres.

"Saya katakan cawapres ini posisinya bisa ngunci, bisa mendongkrak kemenangan, dan Erick Thohir mampu dalam hal tersebut," kata Adib.

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, juga menilai Erick Thohir sebagai sosok yang tepat menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Sebab, Erick diyakini mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik lagi.

"Menurut saya duet Prabowo-Erick ini bisa terjadi, apalagi keduanya memiliki modal seperti Erick Thohir yang sangat kuat di bidang ekonomi," kata Anang.

Melihat rekam jejak, Ketum PSSI ini merupakan seorang pebisnis yang berhasil membangun perusahaan dengan baik. Setelah itu, Erick Thohir dipercayakan oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju.

Selama memimpin BUMN, Erick Thohir berhasil melakukan transformasi besar-besaran. Berkat inovasi transformasi BUMN berhasil mencatatkan laba yang terus meningkat setiap tahunnya mulai dari Rp13 triliun di 2020 menjadi Rp303 triliun pada 2022.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepiawaian Erick Thohir dalam bidang ekonomi. Maka tak heran, Erick Thohir dinilai menjadi pelengkap apabila dipasangkan oleh Prabowo Subianto yang ahli dalam bidang pertahanan negara.

"Sosok Erick Thohir ini sangat menjadi pelengkap dari Capres Prabowo Subianto. Keduanya bahkan saling melengkapi dan cocok jika dipasangkan," tambah Anang.

Dukungan NU

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin, menilai, Erick Thohir telah membangun hubungan baik dengan berbagai ormas Islam. Bahkan, kini Erick merupakan anggota Banser NU. Erick juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk maju menjadi calon wakil presiden. Modal itu menjadikan dirinya sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi.

Ujang mengatakan, Erick memiliki daya elektoral besar yang mampu memenangkan capres yang dipasangkan dalam kontestasi demokrasi, termasuk Prabowo Subianto.

"Sosok Erick Thohir ini sudah di dukung oleh petinggi NU, dan sudah membuat sejarah besar dalam kelompok Islam tersebut," kata Ujang.

Dalam rekam jejak, Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah ini sukses menjadi inisiator dalam membangun 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU). Selain itu, ia pernah menerima amanah dari PBNU untuk menggelar acara Harlah ke-100 NU.

Dalam tugasnya, Erick Thohir sebagai Ketua Steering Committee (SC) Panitia Harlah ke-100 NU, dan berhasil menggelar acara tersebut dengan megah. Menurut Ujang, calon pasangan Prabowo -Erick Thohir sangat cocok ketimbang Ganjar Pranowo.

"Erick Thohir ini layak diunggulkan ya sebagai cawapres di Pilpres 2024, dan bicara soal pasangan tentu Erick Thohir ini lebih cocok bersama Prabowo, karena itu menjadi pasangan yang kuat," kata Ujang.

Apa yang disampaikan Ujang bisa menjadi jawaban atas penilaian peneliti BRIN, Prof Siti Zuhro, yang menyebut Prabowo kehilangan basis NU usai PKB dan Muhaimin Iskandar hengkang. Karenanya, yang perlu dilakukan Prabowo mencari pengganti dari tokoh-tokoh yang basisnya sama.

Ia merasa, deklarasi Anies-Muhaimin memang akan mengakselerasi poros-poros lain segera mencari pasangan untuk Pilpres 2024. Terutama, Prabowo yang kehilangan basis pemilih yang cukup besar seperti di Jawa Timur.

Salah satu yang jadi pilihan utama tidak lain tokoh-tokoh NU.

Zuhro melihat, tokoh-tokoh NU kembali dibutuhkan karena memang memiliki ceruk pemilih yang sangat besar seperti di Jatim dan Jateng.

"Ini yang harus dicarikan basis yang sama. Cuma, bagaimana perasaan Golkar dan PAN, belum bisa dijelaskan," kata Zuhro.

Sampai saat ini, ia menuturkan, Golkar dan PAN memang masih memegang komitmen mendukung Prabowo. Tapi, Zuhro mengingatkan, Golkar-PAN sama-sama diamanahkan agar kader mereka bisa diakomodasi di Pilpres 2024.

Apalagi, PAN selama ini sudah terang-terangan mengusung Erick Thohir untuk bisa dipinang sebagai cawapres. Tuntutan sama datang dari Golkar yang memiliki daya tawar sebagai pemilik kursi parlemen terbesar kedua.

"Ketika ketum Golkar dan ketum PAN, atas amanah partainya mencalonkan ketumnya ternyata tidak diakomidasi apakah tetap di sana atau hengkang," ujar Zuhro.

Bagi Zuhro, ini yang membuat dinamika politik ke depan cukup sulit diprediksi. Sebab, suasana masih sangat cair, saking cairnya tidak berbentuk sampai akar rumput partai tidak bisa membaca sikap partainya.

Ia merasa, kerumitan luar biasa ini terjadi ketika petahana tidak bisa mencalonkan lagi dan partai-partai tidak memiliki kader yang cukup oke. Alhasil, mereka terpaksa mencari koalisi demi memenuhi ambang batas.

Namun, Zuhro menambahkan, kondisi ini tidak pernah dirasakan PDIP. Sebab, sejak awal, bukan karena percaya diri, tapi memang karena kursi parlemen PDIP sudah memenuhi ambang batas dan tidak perlu koalisi.

"Karena memang

sudah memenuhi, tidak perlu siapa mendapatkan apa, PDIP untuk 2024 terkesan mandiri. Ini yang mungkin pelajaran bagi kita semua, yang akan datang perlu ada revisi terhadap UU Pemilu," kata Zuhro.

Pengamat politik Universitas Pramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan hengkangnya Cak Imin akan memperbesar peluang pengusungan Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo.

"Erick Tohir dan Gibran berpeluang menjadi cawapres pendamping Prabowo," kata dia.

Umam menjelaskan bahwa keberadaan PKB yang mengusung Cak Imin merupakan pesaing ketat dalam pengusungan Erick Thohir sebagai bacawapres di dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun, saat ini, kondisinya berubah pasalnya Cak Imin dan PKB telah keluar koalisi.

"Besar kemungkinan Erick Tohir akan menjadi cawapres Prabowo, karena Cak Imin selaku pesaing ketatnya sudah hengkang dari koalisi," katanya.

Umam pun mengartikan bahwa langkah PKB yang keluar dari KIM lantas akan disyukuri oleh PAN. Pasalnya, proposal pencawapresan akan terwujud.

"Yang bisa dicairkan dalam bentuk dukungan logistik politik," katanya.

Pengamat Politik Hotman Siahaan menilai daya elektoral besar menjadi kekuatan Erick Thohir untuk dapat diusung sebagai bakal cawapres.

"Kalau lihat sekarang, akhir-akhir ini survei Erick Thohir lebih tinggi daripada yang lain," ujar Hotman melalui keterangan tertulis, Jumat, 8 September 2023.

Capaian positif tersebut tentu semakin menunjukkan peran besar kehadiran Erick Thohir mampu membawa dampak positif secara elektoral. "Sebagai cawapres Erick Thohir kian dapat menguatkan daya pilih masyarakat bagi siapapun calon presidennya," ucap Hotman.

Sehingga, lanjut dia, menjadi sangat wajar kalau Erick Thohir saat ini begitu kuat dihubungan dengan figur bakal capres terkuat pada temuan sejumlah survei.

"Terlebih Erick Thohir merupakan sosok yang mudah diterima semua kalangan masyarakat," terang Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya ini.

Menurut dia, tingginya tingkat disukainya anggota Kehormatan Banser NU ini tentu tidak terlepas dari kinerja gemilang yang konsisten ditorehkan sampai sekarang.

"Hal itu tentu semakin menjadikan Erick Thohir sosok penentu kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau hitungan sosok, ya survei indikatornya," ujarnya.

Dekat Jokowi

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan, Erick Thohir memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut membuat Erick Thohir memiliki magnet elektoral yang sangat besar.

"Karena kedekatan dengan Jokowi ini. Kemudian jadi prefensi publik yang menebalkan keyakninan publik bahwa Erick Thohir adalah sosok menjadi memiliki magnet elektoral," kata Adi Prayitno.

Magnet elektoral Erick Thohir terlihat dari berbagai hasil survei yang menunjukkan elektabilitas tinggi sebagai cawapres. Misalnya pada survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Agustus yang memperlihatkan elektabilitas Erick Thohir berada di angka 15,9 persen.

Hasil yang tidak jauh berbeda juga terlihat dari survei Voxpol Center periode 24 Juli hingga 2 Agustus 2023. Eks Presiden Inter Milan itu meraih elektabilitas tertinggi dengan raihan sebesar 34,3 persen.

Melihat itu semua menjadikan Erick Thohir sebagai cawapres yang paling direbutkan oleh siapa saja. Baik itu capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto maupun capres PDIP, Ganjar Pranowo. Sebab, elektabilitas Erick Thohir memiliki daya ungkit elektoral yang cukup besar.

Hal tersebut dinilai dapat membantu

> **Menurut saya duet Prabowo-Erick ini bisa terjadi, apalagi keduanya memiliki modal seperti Erick Thohir yang sangat kuat di bidang ekonomi.**

dalam meraih kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. "Jadi dipasangkan dengan siapapun dengan Prabowo atau Ganjar elektabilitas bisa naik signifikan," ujarnya.

Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, juga mengakui, dukungan yang diberikan Jokowi pada Erick Thohir semakin menambah kekuatan maju cawapres. Bahkan memantik hadirnya banyak dukungan kuat.

"Pak Erick Thohirkan pernah disebut oleh Pak Jokowi sebagai Cawapres dan potensial," kata Yusak.

Dia menambahkan, hal demikian berdampak pada semakin membesarnya peluang keterusungan Erick Thohir sebagai cawapres. Tingkat keterpilihan Erick Thohir bahkan konsisten tempati posisi teratas di bursa cawapres 2024. ●

Cawapres Ganjar Pilihan Megawati

RIDWAN KAMIL ATAU AHY

Utak-atik calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo masih belum menemukan titik terang. Sejumlah nama digadang-gadang layak menjadi pasangan mantan gubernur Jawa Tengah itu. Termasuk Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja ditinggalkan Anies Baswedan yang lebih memilih Muhaimin Iskandar.

Pertemuan antara elite Partai Demokrat dengan PDIP sudah terjadi saat partai berlambang mercy itu masih di Koalisi Perubahan. Bahkan, nama AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, masuk dalam lima kandidat cawapres Ganjar Pranowo.

Apalagi, dalam waktu dekat ini dikabarkan akan dilakukan pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).

Pertemuan antara kedua tokoh tersebut pastinya akan mencuri perhatian publik. Sebab, wacana yang mencuat di publik, hubungan Megawati dan SBY masih memanas. Pertemuan tersebut bisa saja menjadi momentum keduanya melakukan konsolidasi untuk membangun harmonisasi, termasuk menjodohkan Ganjar Pranowo dengan AHY.

Pengamat politik Muslim Arbi, menilai, pertemuan Megawati dengan SBY harus disambut baik seluruh pihak, terutama elite politik. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah tepat yang diambil oleh Partai Demokrat.

"Soal rencana pertemuan Mega dan SBY, menurut saya, malah bagus," tutur Muslim Arbi, Rabu, 6 September 2023.

Dia memprediksi Megawati dan SBY akan kembali merajut hubungan pertemanan. Sehingga, keduanya bisa bergandengan tangan dalam menghadapi Pilpres 2024.

Dia menuturkan, kala SBY memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Megawati dan mencalonkan diri sebagai presiden dengan wakilnya Jusuf Kalla, hal itu membuat orang nomor sati di partai banteng itu kecewa.

Berjalannya waktu, SBY dan Megawati pun masih terlibat aktif dalam dunia perpolitikan nasional. Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun politik. Kedua tokoh ini pastinya memiliki pandangan politik yang berbeda, termasuk soal capres dan cawapres dari partai masing-

masing.

Sehingga, pertemuan tersebut bisa menjadi momentum untuk menyatukan perbedaan itu. Kata dia, SBY dan Mega akan membahas mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini termasuk capres dan cawapres.

"Bisa saja agenda utamanya adalah memformat capres-cawapres dari PDIP-Demokrat," ucap Muslim Arbi.

Dia menilai, kemungkinan besar pertemuan SBY dan Megawati itu untuk menggodok duet pasangan Ganjar Pranowo-AHY di Pilpres 2024. Menurut Muslim Arbi, Ganjar dan AHY merupakan pasangan yang saling melengkapi.

"Bisa jadi PDIP-Demokrat akan pasangkan Ganjar-AHY," kata Musim Arbi.

Dia mengatakan, keretakan yang terjadi di internal Koalisi Perubahan membuat Partai Demokrat berpikir rasional. Partai Demokrat pastinya tidak ingin lagi dikecewakan. Sebab, munculnya duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang secara tiba-tiba diputuskan itu telah meruntuhkan kepercayaan Partai Demokrat terhadap Koalisi Perubahan.

"Rupanya itu jadi pukulan bagi SBY dan Demokrat. Demokrat lalu keluar koalisi, meski belakangan melunak. Jadi, saya kira agenda utama rencana pertemuan Mega-SBY adalah bisa jadi membicarakan rencana koalisi PDIP-Demokrat," sambungnya.

Sementara itu, analis politik dari Citra Insitute, Efriza, menuturkan, duet pasangan Ganjar-AHY akan mengubah peta politik yang terjadi saat ini. Bahkan, akan mengejutkan koalisi yang saat ini sudah terbentuk, seperti Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan.

"Partai Demokrat jika berkoalisi dengan PDIP akan menjadi sebuah ekspresi kekaguman. Ini adalah Koalisi Persatuan Indonesia, layaknya sila ketiga, koalisi terbaik di era reformasi selama terjadinya pilpres," kata Efriza.

> **Ini menunjukkan pemerintahan akan berjalan berkelanjutan, tidak ada lagi pilah dan pilih kebijakan, seperti ini milik Partai Demokrat dan ini karya PDIP. Artinya beberapa proyek mandek bisa dilanjutkan**

Dia menilai, duet Ganjar-AHY sebenarnya amat dinantikan oleh masyarakat. Dia memprediksi bahwa pasangan tersebut juga akan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat.

Dia meyakini, Ganjar-AHY bisa melanjutkan program dan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama menjabat. Apalagi, SBY dan Megawati juga pernah menduduki kursi RI-1. Sehingga, kedua tokoh tersebut dapat saling berkolaborasi untuk pembangunan Indonesia ke depannya.

"Ini menunjukkan pemerintahan akan berjalan berkelanjutan, tidak ada lagi pilah dan pilih kebijakan, seperti ini milik Partai Demokrat dan ini karya PDIP. Artinya beberapa proyek mandek bisa dilanjutkan," terang Efriza.

Dia juga menilai sosok AHY memang diperhitungkan oleh PDIP. Sebab, AHY masuk bursa kandidat cawapres potensial Ganjar Pranowo. Tidak hanya itu, Megawati juga telah memberikan lampu hijau bagi Partai Demokrat jika ingin berkoalisi dengan PDIP.

"Kedua partai ini sama-sama beruntung, karena PDIP bisa melakukan suksesi kepemimpinan," tutur Efriza.

Efriza menambahkan, Ganjar-AHY juga akan membuat anak-anak muda antusias untuk ikut dalam partisipasi di Pilpres. Sebab, keduanya capres dan cawapres yang didukung oleh kalangan muda.

"Keduanya juga dalam kapasitas elektabilitas sama-sama tinggi, akan saling menguatkan antar capres dan cawapres," jelas Efriza.

Dia meyakini jika koalisi PDIP-Demokrat terwujud, kemungkinan besar Presiden Jokowi akan mendukung penuh duet Ganjar Pranowo-AHY di Pilpres. Hal ini juga akan membuat getir duet pasangan lain.

"Jika koalisi ini dapat terwujud, diyakini Presiden Jokowi akan mendukungnya," ucap Efriza.

Selain itu, Jokowi juga pastinya akan percaya terhadap pasangan tersebut terkait keberlanjutan program dan pembangunan yang selama ini dikerjakan. "Sehingga bisa memberikan hal positif atas kebijakan Jokowi saat ini," kata Efriza.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Partai Demokrat akan lebih condong berkoalisi ke PDIP usai menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan.

Yunarto menganggap hal itu dapat diterka dari pujian SBY terkait manuver PDIP lewat pertemuan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan AHY beberapa waktu lalu. Pujian tersebut terlontar dari SBY setelah Demokrat dikhianati oleh Anies yang lebih memilih Cak Imin.

"Kalau mau diterka dalam beberapa bulan ke belakang, kita bisa menerka komunikasi politik lebih banyak dilakukan dan yang cukup mencengangkan adalah pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY. Sesuatu yang dianggap tadinya oleh pengamat, kalangan dunia politik hampir tidak mungkin dilakukan karena sentimen sejarah tidak baik," ujarnya, Senin, 4 September 2023.

Selain pujian SBY terhadap pertemuan Puan-AHY, Yunarto menganggap cuitan SBY mengenai mimpinya tentang pertemuan antara Megawati, Presiden Jokowi, dan presiden ke-8 terpilih dalam sebuah kereta api Gajayana menuju tempat tujuan masing-masing dapat diterka sebagai dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

"Saya pikir itu sebuah sikap pribadi yang saya pikir akan tercermin juga di sikap Partai Demokrat, arahnya lebih kepada koalisi dengan kubu Mas Ganjar," katanya.

Secara garis besar, Yunarto pun menganggap Demokrat tidak bisa berlama-lama larut dalam kekecewaan setelah Anies dipasangkan dengan Cak Imin oleh NasDem. Sehingga, dirinya mewanti-wanti agar Demokrat segera bergabung di antara kubu koalisi Prabowo atau Ganjar dalam rangka tidak luput dalam pemberitaan terkait Pilpres 2024.

Tak hanya terkait Pilpres, jika memang Demokrat akhirnya memutuskan berkoalisi dengan PDIP, maka akan terwujud pula rekonsiliasi antara SBY dan Megawati yang dianggap telah lama terjadi sejak Pemilu 2004.

Di sisi lain, nama yang dinilai cocok mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 adalah mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Meski Partai Golkar yang kini menaungi Kang Emil ada di barisan pendukung Prabowo Subianto, namun peluangnya berpasangan dengan Ganjar tetap terbuka.

Apalagi, pada Jumat, 8 September 2023, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menjelaskan, apabila Ridwan Kamil diminta menjadi

bakal cawapres Ganjar Pranowo, itu merupakan kehormatan dan tidak ada alasan Partai Golkar melarang.

"Kalau diminta berpasangan dengan Pak Ganjar, saya kira itu sebuah kehormatan dan bagi Golkar, tentu tidak ada alasan untuk melarang karena saya yakin bahwa dia tetap sebagai salah satu Waketum DPP Partai Golkar," ujar Agung Laksono.

Agung juga meyakini Ridwan kamil akan tetap berada di Golkar, meski melakukan penjajakan untuk mendampingi Ganjar sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Menurutnya, Golkar pernah mengalami situasi semacam itu, yakni saat Golkar tidak mengusung kader pada kontestasi pilpres, tetapi kader tersebut justru diminta sebagai pendamping bagi bakal capres di koalisi lain. Bahkan, Agung mengaku Ridwan Kamil telah mendiskusikan hal itu dengan dirinya dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Meski begitu, jika Ridwan Kamil maju sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo, hal itu bukan keputusan dari partai Golkar. Sebab, Golkar tidak pernah menyodorkan nama Ridwan Kamil sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar.

"Kalaupun ada (Ridwan Kamil maju sebagai cawapres pendamping Ganjar), itu atas nama individu. Nggak bisa atas nama partai lagi. Kalau atas nama individu kan kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau atas nama partai nggak bisa. Karena partai sudah menetapkan, kita mengusung Pak Prabowo (jadi capres)," kata Agung.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, juga mengatakan dirinya senang jika tiap tokoh Golkar, tak hanya RK, masuk dalam bursa capres atau cawapres di Pilpres 2024.

"Ya, saya sebagai wakil ketua umum partai golkar tentu saja senang kalau misalnya RK atau ketua umum kami Airlangga Hartarto dinominasi untuk menjadi capres atau cawapres," kata Bamsoet di kawasan SCBD, Minggu, 10 September 2023.

Terkait hambatan RK menjadi cawapres Ganjar lantaran Golkar telah mendukung Prabowo sebagai bakal capres, Bamsoet menyebut pernyataan dukungan terhadap Prabowo belum diresmikan Golkar.

Bamsoet menyebut partainya baru dalam waktu dekat akan menggelar rapat membahas peresmian dukungan terhadap Prabowo.

"Jadi, artinya sekarang ini walau ketua umum sudah sampaikan dukungan kepada Prabowo dan kita semua enggak ada yang keberatan, tapi secara partai tentu akan kita putuskan dalam forum yang sama ketika memutuskan dukungan kita untuk ketum sebagai capres," jelas Bamsoet.

"Segera. Saya sudah berkomunikasi dengan seluruh pengurus, tetapi belum ketemu ketum. Tetapi dari ketum saya mendapat pesan bahwa partai kita akan segera membuat forum rapat pimpinan untuk memutuskan dukungan kepada Prabowo," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pun menanggapi positif pernyataan Golkar yang tidak melarang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

"Meskipun Partai Golkar sudah memberikan dukungan kepada Gerindra dan Pak Prabowo, tetapi apa yang dikatakan Pak Agung Laksono tentu saja merupakan hal yang positif, yang menjadi bagian konsideran dari kesadaran kami," ujar Hasto di kantor DPC PDIP Banten, Minggu, 10 September 2023.

Meski begitu, politisi asal Yogyakarta itu menyerahkan keputusan sosok bakal cawapres Ganjar kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Nanti Ibu Megalah yang akan melakukan, mengolah untuk menetapkan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," tegasnya.

Ia menyebutkan sosok bakal cawapres Ganjar harus solid, kompak, serta memiliki visi dan misi yang sama terhadap masa depan. Kemudian, memiliki tanggung jawab, komitmen juang hingga saling melengkapi.

Hasto juga membenarkan adanya pertemuan tertututp antara Megawati dengan Ridwan Kamil. Namun, pertemuan tertutup tersebut diklaimnya membicarakan ihwal perjuangan Soekarno.

"Pak Ridwan Kamil telah menggelorakan bagaimana perjuangan Bung Karno di Kota Bandung melalui pembentukan PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Kemudian monumen ketika Bung Karno ditahan di penjara di Banceuy," ujar Hasto.

"Secara garis besar itu membahas tentang bagaimana benang merah perjuangan dari Bung Karno, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Karena Pak Ridwan Kamil juga menjadi bagian dari arsitek yang ikut bersama sama menginisiasi pembangunan Bung Karno di Aljazair," sambungnya.

Ditanya, apakah ada pembahasan soal peluang Ridwan Kamil menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? Hasto menjawab diplomatis. Ia hanya menyampaikan, bakal cawapres sudah mengerucut dari tujuh menjadi lima nama.

"Muncul tujuh nama dan tujuh nama itu kemudian diperincikan menjadi lima nama. Nah sehingga nama-nama yang dipersepsikan positif oleh rakyat tentu saja PDI Perjuangan melakukan proaktif melakukan kajian secara mendalam terhadap nama-nama tersebut," ujar Hasto.●

Gaet Cak Imin Jadi Wapres

ANIES MULAI MAINKAN POLITIK IDENTITAS

Duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadapi tantangan besar satu bulan jelang pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024. Kini, lawan yang harus dihadapi pasangan Amin ini bukan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Munculnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 membuat tensi politik kembali memanas. Setelah adanya pemanggilan terhadap Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), duet Amin disebut-sebut bakal memainkan politik identitas.

> **Politisasi apa, politisasi masjid? Kami tidak pernah mempolitisasi masjid. Tapi enggak tahu di massjid kok banyak Amin**

Ada beberapa alasan yang menyebutkan bahwa duet Amin bakal memainkan politik identitas. Pasangan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Perubahan itu kemungkinan akan didukung dua partai politik yang berbasiskan Islam. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk menggantikan Partai Demokrat yang hengkang, Partai Keadilan Sejahtera diyakini akan tetap memberikan dukungannya untuk Anies Baswedan meski yang dipilih sebagai cawapres adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Penyebutan duet "Amin" sebagai akronim pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Cak Imin juga dikait-kaitkan dengan politisasi agama.

Tudingan-tudingan itu langsung mendapatkan bantahan dari Cak Imin yang menegaskan tidak ada politisasi agama dalam nama Amin. Apalagi, mereka juga tidak menggunakan masjid untuk politisasi.

"Politisasi apa, politisasi masjid? Kami tidak pernah mempolitisasi masjid. Tapi enggak tahu di massjid kok banyak Amin," kata Cak Imin di TMII, Jakarta, Kamis, 14 September 2023.

Dalam pertemuan dengan tokoh agama di Kelenteng Kong Miao, Cak Imin menyampaikan bahwa seharusnya dalam demokrasi yang sehat tidak ada konflik terkait SARA. Sayangnya, adu domba dengan ujaran SARA masih sering muncul di media sosial.

"Demokrasi harus semakin tumbuh sehat, tidak ada konflik SARA, atau adu domba SARA yang masih muncul di sosial media," kata Cak Imin.

Cak Imin mengajak seluruh pihak, termasuk para timses calon presiden, untuk menghentikan politisasi SARA di Pemilu 2024. Sudah seharusnya dibangun pertarungan politik demokrasi yang sehat.

"Kita hentikan semuanya. Saya minta semua pihak, termasuk tim koalisi manapun untuk menghentikan eksploitasi SARA di dalam kompetisi Pemilu 2024, sehingga demokrasi kita demokrasi yang sehat," ujar wakil ketua DPR RI ini.

Cak Imin sebelumnya juga menegaskan, dia dan Anies Baswedan siap menolak politik identitas. Hal itu disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

"Jadi kalau ada politik identitas, Mas Anies dan saya terdepan menolak politik identitas," kata Cak Imin saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 6 September 2023.

"Tapi identitas tidak bisa dipungkiri rakyat bisa memiliki identitasnya masing-masing," sambung dia.

Cak Imin juga menyebut telah berd-

iskusi panjang terkait politik identitas dengan Anies. Diskusi empat mata yang dia lakukan memberikan kesimpulan bahwa Anies pada dasarnya sama dengan apa yang Cak Imin perjuangkan.

"NKRI harga mati, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah final, (itu) komitmen saya dengan Mas Anies," tutur Cak Imin.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengaku tak khawatir koalisi pendukung pasangan Anies Baswedan-Cak Imin disebut sebagai motor politik identitas. Menurut Syaikhu, koalisi yang beranggotakan PKS, NasDem dan PKB ini adalah gabungan dari nasionalis-religius.

"Kami tidak khawatir ini menjadi politik identitas ya, saya kira ini perpaduan partai yang mungkin memiliki basis keumatan dan basis nasionalisme," ujar Syaikhu saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.

"Karena itu, saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum partai NasDem bahwa justru dengan koalisi ini tidak ada lagi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret selesai sudah kita songsong masa depan ini lebih baik," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh meyakini pasangan Anies-Cak Imin mampu mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Paloh juga menyampaikan selamat tinggal untuk politik cebong dan kampret.

"Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sistem nilai-nilai kebangsaan kita," ujar Paloh saat deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023.

Menurut Paloh, politik cebong dan kampret memunculkan adu domba, pemecah belah, dan perusak nilai kebangsaan. Dia pun mengucapkan selamat datang untuk politik yang lebih baik, yakni politik kebhinekaan.

"Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebhinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seluruhnya di negeri yang kita cintai ini," katanya.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak perlu menggunakan politik identitas untuk mendapatkan suara. Hal itu disampaikan merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait munculnya Bakal Capres Ganjar Pranowo di tayangan azan Maghrib di televisi swasta.

Angga menyebut, Anies selama memimpin Jakarta mengeluarkan kebijakan pro wong cilik dan menekankan pada keadilan sosial.

"Alhamdulillah Anies Baswedan yang kebijakannya pro wong cilik dan keadilan sosial, tidak perlu pakai politik identitas untuk mendapatkan suara," ujarnya dalam keterangannya, Rabu, 13 September 2023.

Angga sepakat dengan Hasto bahwa penggunaan politik identitas hanya untuk orang yang tidak memiliki rekam jejak prestasi. "Sepakat dengan Pak Hasto, biasanya kalau enggak ada rekam jejak bela wong cilik, senangnya menggusur paksa, akan pakai politik identitas untuk menutup kekurangannya," ujar Angga.

Angga menjelaskan, bila seseorang tak punya rekam jejak membela rakyat dan senang menggusur paksa, justru akan menggunakan politik identitas untuk menutupi kekurangannya.

"Biasanya kalau enggak ada rekam jejak bela wong cilik, senangnya menggusur paksa, akan pakai politik identitas untuk menutup kekurangannya," ujarnya.

Koordinator Presidium DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), La Ode Basir, juga memberikan respons atas tudingan politik identitas yang ditujukan pada Anies Baswedan.

"Harmony Awards menjadi bukti bagaimana Kementerian Agama mengakui terciptanya kerukunan antarumat beragama di DKI ketika dipimpin Mas Anies," ujar La Ode Basir, Kamis, 14 September 2023.

Ia pun menjelas-

kan, pada Januari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta menerima Harmony Award Tahun 2020 yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Penghargaan Harmony Award menjadi bukti komitmen Anies dalam membangun kerukunan di ibu kota. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Agama kepada daerah, seperti DKI Jakarta, yang berhasil menciptakan harmonisasi dalam kehidupan beragama.

Menurut La Ode, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama dengan serius. Itulah alasan Kementerian Agama memberikan Harmony Award.

"Melalui penghargaan Harmony Award, Kementerian Agama mengakui bahwa Pemprov DKI mampu menjaga harmonisasi dalam kehidupan beragama," ujarnya.

La Ode menegaskan bahwa selama kepemimpinan Anies di DKI Jakarta, kerja sama antarumat beragama terus dibangun. "Apakah ada ketegangan antarumat beragama di Jakarta selama kepemimpinan beliau? Apakah ada ketegangan tinggi antarumat beragama? Tidak ada," tambahnya.

Sementara itu, pegiat media sosial, Denny Siregar, menyebut, Anies Baswedan tidak perlu khawatir lagi tentang politik identitas setelah menggandeng Cak Imin menjadi cawapres di Pilpres 2024. Menurut Denny, dengan bergabungnya PKB, maka wajah kotor Anies Baswedan akibat politik identitas bisa bersih karena PKB identitik dengan Nahdatul Ulama (NU).

"Dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas, kalau ada PKB Anies kan bisa mendadak NU dan massanya NU itu banyak banget loh, ada sekitar 40 juta orang, terbanyak di Jawa Timur daerah kekuasaannya PKB," ungkap Denny dikutip dari YouTube COKRO TV, Kamis, 7 September 2023.

Selain itu, dengan bergabungnya PKB dan Anies, maka potensi kemenangan yang dihitung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh semakin besar, karena wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur bisa dikuasai untuk Pilpres 2024.

"Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat dan PKB kuasai Jawa Timur maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh, Jawa Tengah sih lewatin aja deh karena di sana sudah pasti nggak bisa ngalahin seorang Ganjar Pranowo," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai perubahan tidak mungkin terwujud dengan duet Anies-Cak Imin, hanya bisa melalui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres.

Sehingga, selain AHY, atau bahkan dengan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, secara kualitas, Anies tetap tidak akan mungkin membuat perubahan.

"Semua orang menganggap bahwa hanya melalui Anies-AHY, perubahan bisa dilakukan. Memang secara kualitas memang itu. Kan enggak mungkin perubahan Anies dengan Sandi, Anies dengan Cak Imin, Anies dengan Erick Thohir segala macam itu," kata Rocky dalam YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 6 September 2023.●

PEMILU, RELAWAN POLITIK, DAN PARTAI BAYANGAN

Relawan politik dalam lanskap politik Indonesia kian menempati posisi penting. Relawan politik dalam perkembangannya turut serta dalam proses penentuan jabatan publik melalui jalur pemilihan (political elected) ataupun dalam penempatan jabatan publik melalui jalur penunjukan (political appointed).

Belakangan, preferensi politik relawan politik dinantikan, bahkan direbutkan, karena dinilai menjadi penentu elektabilitas kandidat.

Sejatinya, relawan politik merupakan manifestasi dari keterlibatan warga (civic engagement) dalam aktivitas politik di ruang publik. Nina Eliashop (2013) menyebutkan, relawan politik memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan secara langsung pada obyek yang dituju. Dalam konteks ini, relawan politik bekerja di area gagasan dan ide yang beririsan dengan kebijakan publik.

Rene Bekers (2005) menekankan, relawan tidak sekadar pada ranah advokasi politik yang terkait langsung dengan urusan mereka, tetapi juga manifestasi dari ekspresi identitas sosial, yang bertujuan untuk berkontribusi bagi orang lain, serta meningkatkan peluang pasar tenaga kerja di waktu mendatang.

Namun, dalam praktik di lapangan, aktivitas relawan politik semakin menyempit. Alih-alih membincangkan soal gagasan dan ide, area kerja relawan disederhanakan pada urusan individu tokoh politik. Kerja relawan politik disimplifikasi pada area dukungan terhadap figur politik yang hendak maju dalam kontestasi elektoral.

Di titik inilah, aktivitas relawan politik tak terhindarkan pada urusan mobilisasi massa, mengumpulkan dana, dan mengelola isu. Esensi area kerja relawan politik yang hakikatnya di tataran ide, konsep, dan aksi menjadi tereduksi.

Partai Bayangan

Keberadaan relawan politik menempati posisi penting dalam proses pemilihan (pre-election) ataupun pascapemilihan (post-election). Dalam proses elektoral, relawan politik melakukan apa yang dilakukan partai politik, seperti penggalangan massa, penggalangan dana, dan penggalangan isu.

Begitu juga pascaelektoral, relawan politik menjadi pintu masuk rekrutmen jabatan publik, baik dalam penentuan maupun pengisian jabatan publik.

Dalam konteks tersebut, tugas dan fungsi relawan politik senyatanya seperti partai politik. Maka , tak berlebihan bila menempatkan relawan politik, meski konteks dan latar politik berbeda, meminjam istilah yang pertama kali dilansir Lorraine Woellert dalam Bussiness Week, sebagaimana disebut David Horowitz dan Richard Poe (2007), sebagai partai bayangan (the shadow party).

Keberadaan partai bayangan ini digambarkan sebagai institusi di luar partai politik, tetapi peran dan fungsinya kurang lebih sama dengan parpol.

Joseph Fishkin dan Heather K Gerken (2015) mengungkapkan, partai bayangan ini melakukan aktivitas layaknya kerja partai politik, seperti memobilisasi massa, mengelola dana kampanye, mengampanyekan kandidat, hingga mempekerjakan juru kampanye dalam waktu tertentu. Ciri lainnya, partai bayangan ini dikendalikan oleh sedikit orang, hierarkis, dan jauh lebih solid alias tidak keropos.

Praktik relawan politik ini dalam kenyataannya tidak hanya dijumpai dalam kontestasi pilpres ataupun pilkada. Dalam pemilu legislatif, keberadaan relawan politik juga menjadi tulang punggung kandidat. Wujudnya berupa tim yang terstruktur (di luar struktur partai) yang dibentuk mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Fenomena tim pemenangan di luar partai ini kian mudah dijumpai dalam sistem pemilu proporsional terbuka ini.

Area kerja relawan politik dalam pilpres dan pilkada jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan tim pemenangan dalam pemilu legislatif. Ruang lingkup aktivitas relawan politik untuk pilpres atau pilkada, seperti yang tergambar dalam partai bayangan, lebih kompleks. Sementara ruang lingkup relawan politik untuk pemenangan calon anggota DPR, areanya lebih sempit, hanya fokus

Oleh: Ferdian Andi
Pengajar HTN/HAN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)

dalam satu daerah pemilihan (dapil) dan langsung di bawah koordinasi kandidat.

Persoalan yang muncul adalah terkait ketiadaan aturan soal dana kampanye dalam proses pemilihan yang ditujukan terhadap relawan politik. Keberadaan relawan politik yang bukan entitas partai politik atau tim pemenangan tidak menjadi obyek yang diatur dalam aturan pemilu.

Pada Pasal 327 Ayat (1) dan (2) UU 7/2017 tentang Pemilu disebutkan soal batasan maksimal sumbangan yang berasal dari perseorangan sebesar Rp2,5 miliar dan batasan sumbangan yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan nonpemerintah maksimal Rp25 miliar. Pembatasan sumbangan ini memiliki nilai penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan terbebas dari dana yang bersumber dari aktivitas ilegal, seperti korupsi ataupun kejahatan pencucian uang.

Lebih dari itu, pembatasan sumbangan untuk menghindari praktik quid pro quo atau barter sumbangan kampanye dengan fasilitas negara yang dilakukan oleh penyumbang dengan kandidat yang kelak terpilih di jabatan publik.

Begitu juga mengenai pelaksanaan kampanye pemilu, merujuk pada Pasal 269 Ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, disebutkan tentang siapa saja yang terlibat dalam kampanye, yakni parpol atau gabungan parpol pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Keberadaan relawan politik, yang sejatinya melakukan aktivitas kampanye, tak masuk dalam obyek pengaturan ini.

Karena itu, relawan politik idealnya menjadi obyek pengaturan dalam hukum pemilu. Pengaturan tentang penggalangan dana, massa, dan isu di publik menjadi hal yang penting untuk diatur oleh penyelenggara pemilu (regulator). Rasio legis dalam UU Pemilu semestinya dapat ditransformasi melalui pengaturan mengenai relawan politik. Upaya ini sebagai respons atas eksistensi relawan politik dan menghadirkan pemilihan umum yang akuntabel.

Masa Depan Partai

Eksistensi relawan politik yang bermetamorfosis menjadi partai bayangan memberi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Relawan politik memiliki irisan dengan partai politik dan kandidat dalam pemilu.

Keberadaan relawan politik juga menjadi tantangan bagi eksistensi parpol seperti dalam ideologisasi, kaderisasi, dan edukasi politik bagi warga.

Fenomena perpindahan keanggotaan parpol yang terlihat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis KPU menunjukkan rendahnya ikatan politik antara anggota partai dan parpol. Dalam sejumlah kasus, parpol hanya menjadi kendaraan politik bagi politisi.

Keberadaan relawan politik sejatinya sama persis dengan apa yang dilakukan parpol. Di beberapa hal, relawan politik mereduksi fungsi dan eksistensi parpol. Di sinilah letak tantangan yang harus dijawab dengan tandas oleh parpol.

Perubahan mendasar dalam tata kelola parpol penting dilakukan untuk menjawab tantangan di depan mata. Proses ideologisasi, kaderisasi, demokratisasi, dan pendidikan politik semestinya semakin kukuh dilakukan oleh parpol.

Upaya ini untuk memastikan parpol yang menjadi pilar penting demokrasi makin terlembaga. Pelbagai langkah ini sekaligus menjawab keberadaan relawan politik yang dalam beberapa hal telah menjadi partai bayangan yang membayang-bayangi eksistensi partai politik.

Di atas semua itu, di titik ideal, partai politik ataupun relawan politik sama-sama menjadi medium artikulasi keterlibatan publik dalam politik. Keduanya tidak dalam rangka menegasikan satu dengan lainnya.

Hanya saja, pengaturan terhadap relawan politik mendesak dilakukan sebagai wujud pengelolaan keterlibatan publik. Di sisi yang lain, partai politik harus segera melakukan pembenahan.●

SRIWIJAYA RANAU GRAN FONDO DARI SUMSEL UNTUK INDONESIA

Event tahunan Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) kembali digelar untuk kelima kalinya di pelataran Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Pelaksanaan SRGF 2023 ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Tahun ini, Sriwijaya Ranau Gran Fondo melibatkan tidak kurang dari 1000 peserta, termasuk di antaranya pembalap nasional asal Sumsel, Ade Agung Binatara. Selain itu, ada pula peserta dari mancanegara, seperti Australia, Prancis dan Pakistan.

SGRF 2023 memperlombakan sepuluh kategori. Kategori Road Bike (RB) Men Elite dengan jarak tempuh 102 kilometer memperebutkan hadiah satu unit mobil.

Kemudian, kategori RB Men Junior, RB Master A, RB Master B, RB Women Junior, dan RB Women, masing-masing memperebutkan hadiah sepeda motor. Selanjutnya, kategori MTB Men, MTB Women, Tiny Wheel Men, dan Tiny Wheel Women, memperebutkan hadiah sepeda Polygon Siskiu D5. SRGF 2023 juga dimeriahkan dengan keikutsertaan peserta fun bike untuk kategori umum.

Selain mendapatkan hadiah tersebut, para pemenang dari berbagai kategori diberikan medali dan sejumlah uang pembinaan.

Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung kegiatan. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang hadir langsung menyemarakan event yang telah ditetapkan sebagai salah satu agenda nasional yang berlokasi di danau terbesar kedua setelah Danau Toba tersebut.

"Kita ketahui bahwa Sriwijaya Ranau Gran Fondo ini merupakan yang kelima kalinya kita gelar. Banyak dampak positif yang kita dapatkan, utamanya ekonomi di sekitar begitu menggeliat," ucap Herman Deru.

Contoh nyata dampak positif yang dirasakan daerah ini dengan digelarnya SRGF adalah aneka jajanan dan kuliner yang dijual warga banyak yang terjual.

Demikian juga dengan penginapan yang penuh dipesan. Namun, yang tak kalah penting, objek wisata Danau Ranau kian dikenal di kancah nasional.

"Inilah salah satu alasan saya menginisiasi event digelar setiap tahun," tutur Herman Deru.

Bupati OKU Selatan, Popo Ali Martopo, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru dan seluruh peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah meramaikan SRGF 2023 di Danau Ranau.

"Geliat ekonomi masyarakat luar biasa. Homestay terisi penuh yang memberikan efek besar terhadap roda perekonomian sekitar," ungkapnya.

Adapun dalam SRGF 2023, pembalap asal Yogyakarta, Ahmad Yoga, berhasil menjadi juara di kategori RB Men Elit. Dia berhak membawa pulang satu unit mobil sebagai hadiahnya.

Penyerahan kunci secara simbolis dilakukan Gubernur Herman Deru didampingi Bupati OKU Selatan dan Forkopimda yang hadir. Pembagian hadiah ini sekaligus menjadi penutup rangkaian SRGF 2023.

Ahmad Yoga mengaku sangat senang dalam keikutsertaannya di SRGF 2023. Dia mengatakan sudah tiga kali ikut event tersebut dan baru tahun ini berhasil meraih juara pertama dan berhak membawa pulang satu unit mobil sebagai

hadiah utama.

"Lintasannya bagus, cuaca juga bagus, terima kasih untuk Sriwijaya Ranau Gran Fondo. Semoga tetap jaya dan adakan terus acara seperti ini," ucap Yoga.

Memukau Sejak Awal

Digelar pertama kali pada 2019, Sriwijaya Ranau Gran Fondo berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Bukan itu saja, Gran Fondo di Danau Ranau mampu membangkitkan ekonomi sekaligus menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia.

Penyelenggaraan Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2019 menjadi momen bersejarah dan langsung mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan event ini diyakini menjadi salah satu destinasi wisata andalan nasional ke depan.

Para peserta Sriwijaya Ranau Gran Fondo melintasi rute sejauh 115 km yang dimulai dari Pelataran Danau Ranau di Banding Agung - Simpang Sender-Buay Rawan-Muaradua -Buay Rawan-Simpang Sender-Villa Pusri. Kemudian, mereka menyusuri pinggiran Danau Ranau dan kembali ke Banding Agung sampai ke garis finish.

Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2020 menjadi pelaksanaan kedua dan berlangsung lebih meriah. Bahkan, Gubernur Herman Deru menyiapkan satu unit mobil bagi pemenang pertama, satu unit motor untuk juara kedua, dan televisi bagi juara ketiga.

Pemberian hadiah itu tak lain sebagai ungkapan rasa bangganya karena suksesnya pelaksanaan Sriwijaya Ranau Gran Fondo. Meskipun masih dalam suasana Covid-19, namun tak menghalangi antusias masyarakat dalam dan luar daerah untuk berpartisipasi.

Selain Festival Danau Ranau, event Sriwijaya Ranau Gran Fondo ini juga dapat menjadi sarana Kabupaten OKU Selatan untuk mempromosikan daerah ini ke kancah nasional maupun internasional. Banyaknya tamu yang datang mendongkrak segala kegiatan perekonomian, khususnya bagi kegiatan pelaku UMKM.

Lalu, Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2021 untuk ketiga kali berturut-turut sukses digelar. Bahkan, peserta cycling challenge di tahun ketiga ini terlihat lebih ramai dari tahun sebelumnya. Sedikitnya 2.440 peserta dari 20 provinsi di Indonesia dan luar negeri, seperti Inggris, turut meramaikan kegiatan tersebut meski masih dalam suasana pandemi Covid-19.

SRGF 2021 juga mendongkrak perekonomian masyarakat di OKU Selatan. Parameter meningkatnya ekonomi tersebut terlihat dari banyaknya hotel dan homestay yang dibangun.

Meningkatnya peserta dalam SRGF 2021 ini tak lepas dari dampak infrastruktur yang baik. Gubernur Herman Deru memang terus konsisten dalam pengembangan infrastruktur di Sumsel.

Pada event selanjutnya, Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2022, tercatat tidak kurang dari 3.000 pesepeda dari dalam maupun luar negeri ambil bagian.

Tingginya antusias peserta SRGF 2022 disambut baik Gubernur Herman Deru. Bahkan, menurut dia, dari tahun ke tahun jumlah peserta terus meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, menurutnya, ke depan harus lebih dipertajam dari segi kategori lomba maupun destinasi yang ditampilkan. Selain itu, yang tak kalah lebih penting adalah promosi harus lebih digencarkan.

"Yang lebih penting pola pikir harus diubah bahwa SRGF ini bukan semata-mata kepariwisataan, olahraga, ataupun rekreasi. Tapi inilah cara kita menggerakan ekonomi masyarakat OKU Selatan yang didukung tingginya animo peserta dan dukungan masyarakat," tegas Herman Deru.●

89,65 PERSEN MASYARAKAT SUMSEL PUAS DENGAN KINERJA HDMY

Upaya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) dalam mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya kepuasan publik yang mencapai 89,65 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel 2022 meningkat 0,66 poin menjadi 70,90 atau tumbuh 0,83 persen dibandingkan capaian 2021. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat atau penduduk di suatu daerah.

Peningkatan IPM di Sumsel terjadi pada semua komponen, baik kesehatan, Pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Menurut Gubernur Herman Deru, pembangunan daerah tidak lepas dan butuh sinkronisasi antara instansi tingkat provinsi dan pemerintah pusat serta kabupaten/kota.

"Nah, kita sudah melihat rapor kita di mana hasil capaian pada tahun sebelumnya tentu akan menjadi pijakan bagi kita merencanakan tahun ke depan," tambahnya.

Herman Deru mengatakan, sinkronisasi ini harus diawali dengan data yang benar dalam menciptakan perencanaan dan pelaksanaan yang juga benar, sehingga produknya makin lebih baik.

"Selama kita bicara pembangunan kenapa wajib bicara tentang infrastruktur? Artinya ada infrastruktur dan non-infrastruktur tujuannya hanya satu, yakni mempercepat kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Herman Deru mengungkapkan, dengan berbagai peningkatan dan capaian di berbagai bidang, seperti infrastruktur, turunnya angka kemiskinan dan angka stunting, tentunya menjadi kebanggaan Pemprov Sumsel dan kabupaten/kota.

"Di dalam capaian ini sering saya sampaikan jangan cepat berpuas diri atau star syndrome, meskipun rapot baik tapi jangan terlena, bahkan harus melakukan yang lebih lagi," tuturnya.

Meningkatnya pelayanan publik ini bisa dilihat dari survei kepuasaan masyarakat pada 2022 yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel.

- Institusi pelayanan pelayanan investasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai 90 persen.
- Institusi pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit Ernaldi Bahar (Erba) 83,58 persen.
- Institusi pelayanan publik lainnya yang dilakukan Biro Organisasi 90,41 persen.
- Pelayanan publik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 89,84 persen.
- Pelayanan publik dari Dinas Perpustakaan 86,66 persen.
- Pelayanan publik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 98,45 persen.
- Pelayanan publik dari Badan Kepegawaian Daerah 86,86 persen.
- Pelayanan publik dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 91,40 persen.

Bila dirata-ratakan,

maka kepuasan publik mencapai 89,65 persen atau masuk kategori sangat tinggi. Meningkatnya kepuasan pelayanan publik ini juga ditandai dengan keberhasilan Pemprov Sumsel mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya.

Ekonomi Tumbuh Signifikan

Kepemimpinan HDMY juga mampu membangun sektor ekonomi yang lebih kuat lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sumsel pada triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen (yoy).

Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,91 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 9,48 persen.

Ekonomi Sumsel pada triwulan II-2023 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen (qtq).

Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,86 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,38 persen.

Perekonomian Sumsel masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 27,12 persen. Lalu, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 17,55 persen. Selanjutnya, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,51 persen.

"Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Selatan mencapai 58,18 persen. Perekonomian Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp158,88 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp90,59 triliun," katanya.

Pertumbuhan ekonomi Sumsel triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 (yoy) juga tumbuh sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali jasa kesehatan dan pengadaan air yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,15 persen dan 2,71 persen.

"Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,91 persen, diikuti administrasi pemerintahan sebesar 10,94 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 10,36 persen. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,13 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 7,08 persen," tuturnya.

Sementara itu, lapangan usaha industry pengolahan dan pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,14 persen dan 1,97 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi semester I-2023 terhadap semester I-2022 (c-to-c), mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali pengadaan air yang terkontraksi sebesar 1,87 persen.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh signifikan sebesar 13,02 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 10,04 persen, informasi dan komunikasi sebesar 8,98 persen.

Lalu, administrasi pemerintah sebesar 8,98 persen. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,38 persen. Pertambangan dan penggalian yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 8,14 persen. Sedangkan industri pengolahan serta pertanian, kehutanan dan perikanan masing-masing tumbuh sebesar 2,72 persen dan 2,56 persen.●

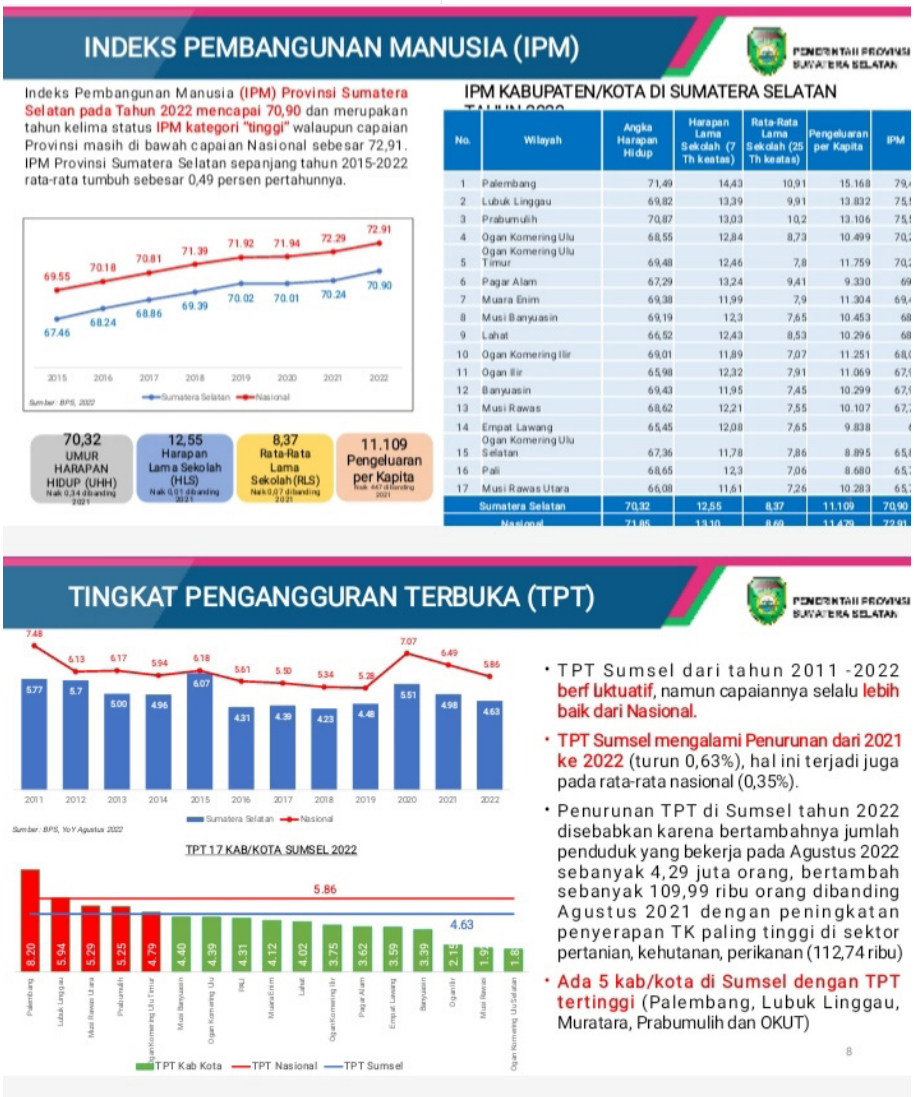

TERTINGGI TURUNKAN STUNTING

Kegigihan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) dalam menurunkan angka stunting membuahkan hasil positif.

Sumsel berhasil masuk dalam tiga besar provinsi di Indonesia dengan penurunan angka stunting 6,2 persen melebihi capaian nasional di 2022.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, merinci berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, penurunan stunting di Sumsel mencapai 6,2 persen. Pada 2021 angka stunting di Sumsel mencapai 24,8 persen, lalu pada 2022 menjadi 18,6 persen.

"Saya ucapkan terima kasih, terutama ke gubernur, bupati/wali kota, target ini terjadi masa pandemic, bukan masa biasa. Mudah-mudahan masa pandeminya sudah terkendali, tahun ini bisa lebih baik. khususnya Sumsel, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, turunnya di atas 5 persen itu saya ucapkan terima kasih," katanya.

Selain penurunan angka stunting, angka kematian bayi di Sumsel juga turun tajam hingga 89 persen dalam rentang waktu 50 tahun terakhir. Tersedianya infrastruktur kesehatan yang ditunjang tenaga medis dan non-medis menjadikan banyaknya bayi dan ibu terselamatkan pada saat proses melahirkan.

Dalam rentang 50 tahun (periode 1971-2022), angka kematian bayi (IMR) menurun signifikan dari 25 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 16,78 per 1.000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020.

Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya atas kerja sama berbagai pihak dalam menekan angka stunting di Sumsel. Sebab, sinergitas antara Pemprov Sumsel dengan pemkab/pemkot merupakan suatu keharusan, di samping peran dari TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan organisasi wanita lainnya yang telah turut andil dalam menurunkan stunting.

"Apa yang dicapai Pemprov Sumsel merupakan akumulasi dari hasil kerja para bupati/wali kota serta kalangan

organisasi wanita, termasuk petugas penyuluh kesehatan yang ada di desa-desa," tegas Herman Deru.

Sejumlah upaya dilakukan Pemprov Sumsel bersama pemkab dan pemkot dalam menekan angka stunting, di antaranya masifnya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang merupakan satu terobosan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari sebelumnya sebagai konsumen menjadi penghasil. Artinya, masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dengan cara menghasilkan sendiri untuk pemenuhan gizi keluarga.

> **Apa yang dicapai Pemprov Sumsel merupakan akumulasi dari hasil kerja para bupati/wali kota serta kalangan organisasi wanita, termasuk petugas penyuluh kesehatan yang ada di desa-desa.**

Selain itu, Pemprov Sumsel mengoptimalkan Satuan Tugas Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka kasus stunting yang didukung tenaga bidan, kader PKK, dan kader keluarga berencana.

Revitalisasi posyandu yang tersebar di pelosok Sumsel juga diikuti dengan peremajaan timbangan digital ke seluruh pusat layanan kesehatan yang tersebar di 17 kabupaten/kota, serta penyediaan ruangan khusus bagi ibu menyusui di tempat kerja.

Pada 2020, Pemprov Sumsel menganggarkan Rp10,4 miliar untuk pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) pada enam kabupaten/kota prioritas. ●

JADI LUMBUNG PANGAN NEGARA

Majunya sektor pertanian di Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Mawardi Yahya (HDMY) menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut jika Sumsel merupakan salah satu provinsi ujung tombak penyangga pangan di Tanah Air.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melibatkan Sumsel dalam Gerakan nasional menghadapi El Nino yang diprediksi akan menyebabkan krisis pangan dunia.

"Sumsel sudah menjamin 2.000 ton beras untuk Indonesia. Ini sangat kami apresiasi dan kami harap Sumsel tidak hanya menjadi provinsi yang nyaman pangan di daerahnya, tapi juga penyangga pangan nasional," kata Syahrul Yasin Limpo.

Tidak hanya itu, Mentan juga optimistis Sumsel mampu menambah 150 ribu hektare lahan tambah tanam. Apalagi Sumsel tidak kekurangan dalam hal pertanian. Sumsel juga sudah memberi jaminan untuk berkontribusi dalam menghadapi dampak El Nino.

"Kurang lebih 150 ribu hektare lahan di Sumsel ini bisa jadi eksisting yang akan menghasilkan pangan dan jadi lumbung bagi negara ini. Saya yakin Sumsel dapat menjadi pahlawan dalam hal pangan," bebernya.

Di sisi lain, Mentan menyebut, jika sejauh ini stok beras di Tanah Air masih sangat aman dan terkendali. "Untuk stok beras nasional saat ini sangat baik. Apalagi ke depan masih ada 800 ribu hektare sawah yang siap panen. Tapi kita tidak boleh juga terlalu percaya diri dan mengupayakan cadangan pangan dalam menghadapi El Nino," paparnya.

Gubernur Herman Deru mengatakan, Sumsel sangat siap untuk menambah lahan tambah pangan seluas 150 ribu hektare guna menghadapi dampak El Nino.

"Kesanggupan ini tentu tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga semua unsur, termasuk para petani. Sumsel tentu yakin ini akan berhasil," ujarnya.

Herman Deru mengatakan, pemerintah pusat juga terus memberikan perhatian khusus terhadap produksi pertanian di Sumsel. "Kementan juga terus mendukung dengan berbagai hal, mulai dari bibit, alsintan dan lainnya. Kami harapkan ini dapat mengubah pola pikir petani, sehingga tidak selalu mengharapkan bantuan,"

tegasnya.

Diketahui, luas lahan baku sawah di Sumsel totalnya mencapai 470.602 hektare. Rinciannya, irigasi seluas 75.798 hektare, sawah tadah hujan 52.912 hektare, sawah pasang surut 214.454 hektare, dan sawah lebak 127.438 hektare.

Produktivitas Petani Meningkat

Upaya Pemprov Sumsel dalam meningkatkan produksi pangan terus dikebut. Salah satunya dengan cara membangun beberapa saluran irigasi teknis yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yang menjadi sentra tanaman pangan.

Terbaru, Gubernur Herman Deru meresmikan infrastruktur irigasi yang telah dibangun Pemprov Sumsel pada 2019-2022 di Kabupaten Lahat senilai Rp220 miliar. Peresmiannya dipusatkan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Tebat.

Dalam peresmian infrastruktur irigasi tersebut dirangkaikan dengan kick off Rehabilitasi Irigasi 2023 yang masing-masing terletak di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Musi Rawas.

Gubernur Herman Deru menyebut hingga saat ini setidaknya 93 persen infrastruktur irigasi di Sumsel sudah berfungsi. Diharapkan infrastruktur irigasi itu mampu meningkatkan produktivitas petani dari dua kali tanam menjadi tiga kali tanam setiap tahunnya.

"93 persen irigasi di Sumsel sudah dapat difungsikan, tinggal bagaimana masyarakat petani memanfaatkannya. Dari dua kali taman menjadi tiga kali taman setiap tahunnya," harapnya.

Herman Deru berharap wilayah yang telah memiliki irigasi di Kabupaten Lahat mampu bersaing dengan daerah lainnya dalam hal peningkatan produksi padi. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, juga sebagai stok pangan nasional.

"Saya berharap Kabupaten Lahat mampu meningkatkan produktivitas pangan, bukan saja untuk kebutuhan masyarakat Lahat akan, tetapi juga sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional," tambahnya.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari amanah dari pemerintah pusat yang menjadikan Sumsel satu dari enam provinsi yang ditunjuk sebagai daerah penyangga pangan nasional.

"Kita harus emban amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kita harus bersinergi bersama bupati/wali kota yang punya potensi dalam hal pertanian," tambahnya.

Herman Deru menyebut dalam meningkatkan produksi pangan setidaknya ada dua opsi yang dapat dilakukan, yakni ekstensifikasi dengan perluasan areal pertanian atau meningkatkan produksi dengan cara memperbaiki sistem pertanian dengan intensifikasi lahan yang ada.

"Jika kita lihat, untuk Kabupaten Lahat ini kedua opsi tersebut memungkinkan dilakukan. Bahkan, untuk ekstensifikasi pada 2021 sudah hampir 200 hektare," ungkapnya.

Herman Deru juga menilai banyak faktor yang berperan dalam meningkatkan produktivitas petani. Selain infrastruktur irigasi, juga infrastruktur jalan serta penanganan pasca panen.

"Saya apresiasi upaya yang dilakukan para bupati dan wali kota yang punya misi dan visi yang sama dalam hal memajukan sektor pertanian ini. Termasuk membangun infrastruktur di beberapa sentra produksi yang menjadikan ongkos angkut petani menjadi hemat," terangnya.●

Herman Deru Luncurkan Sumsel Berkat

BEROBAT CUKUP PAKAI KTP

Pelayanan kesehatan untuk warga Sumatera Selatan kini semakin mudah. Tidak perlu pakai surat keterangan apapun, cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kini mereka sudah bisa mendapat pengobatan gratis, apapun penyakitnya.

Pelayanan kesehatan untuk warga Sumatera Selatan kini semakin mudah. Tidak perlu pakai surat keterangan apapun, cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kini mereka sudah bisa mendapat pengobatan gratis, apapun penyakitnya.

Layanan pengobatan gratis cukup menggunakan KTP ini diluncurkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melalui Universal Health Coverage (UHC). Program tersebut diberi nama Sumsel Berkat atau Berobat Pakai KTP.

Program ini dimaksudkan untuk mencapai target perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen pada 2024 dan sesuai Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Gubernur Herman Deru menegaskan, Program Sumsel Berkat merupakan langkah dalam menyamaratakan semua layanan kesehatan dengan tidak membedakan jarak tempuh dan ranking sosial masyarakat.

"Kesehatan adalah hak seluruh Masyarakat, jadi tidak boleh dipolitisasi. Masyarakat berhak mendapatkan servis secara utuh," tegas Herman Deru.

Menurut Herman Deru, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Layanan kesehatan tidak boleh terbengkalai, tidak boleh pasrah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat kita sangat butuh terhadap pelayanan kesehatan," tambahnya.

Gubernur Herman Deru menegaskan, dari 17 kabupaten/kota, 11 daerah sudah mencapai UHC dan ada 6 daerah lainnya masih harus menyamakan layanannya. Sebab, Pemprov Sumsel sudah membingkai dalam Program Sumsel Berkat. Sehingga dana talangan untuk pelayanan masyarakat yang harus dibuatkan BPJS menggu-

nakan KTP dan ketika yang bersangkutan sakit menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel.

"Kita nyatakan Sumsel menjadi provinsi 100 persen UHC, di mana 305 ribu masyarakat yang belum memiliki BPJS dana talangannya kita siapkan," katanya.

Herman Deru menegaskan, semua layanan kesehatan harus bermuara ke JKN. Namun, kemampuan masyarakat perlu di-backup oleh pemerintah, sehingga dibutuhkan data yang valid melalui DTKS.

Jadi Contoh Daerah Lain

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengakui Program Sumsel Berkat sangat luar biasa dan menjadi salah satu langkah maju, semua bekerja keras dan bekerja tuntas.

"Semoga dengan adanya Program Sumsel Berkat ini menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk segera mencapai tujuan UHC-nya," ungkapnya.

Ali Ghufron Mukti mengapresiasi Sumatera Selatan di mana penduduknya yang telah terjamin program JKN mencapai 8.396.170 jiwa atau setara dengan 95,90 persen populasi. Ini menjadi contoh pemerintah daerah yang memiliki komitmen terhadap hak dasar masyarakat yang harus bisa dipenuhi.

"Kesehatan harus diakses dengan mudah tanpa kesulitan keuangan. Ada tiga prioritas hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisnawarman, mengatakan, sesuai Edaran Gubernur No. 900/2657/BPKAD tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pengalokasian Anggaran BPJS secara penuh pada APBD kabupaten/kota, APBD Sumsel tidak lagi menganggarkan untuk PBI Provinsi. Sesuai dengan edaran tersebut, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemprov Sumatera Selatan setiap tahun memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota pada APBD Sumsel dengan total hingga 2023 mencapai Rp4,7 triliun.

Kemudian, per 1 September 2023 secara nasional penduduk Indonesia yang telah terjamin program JKN mencapai 262.865.343 jiwa atau 94,64 persen populasi. Sedangkan, untuk Sumatera Selatan, penduduk yang telah terjamin program JKN mencapai jumlah 8.396.170 jiwa atau 95,90 persen.

Dengan kata lain, Sumatera Selatan telah mencapai UHC. Dalam upaya mencapai UHC tersebut, Pemprov Sumsel mengalokasikan anggaran

untuk mendaftarkan 305.248 jiwa penduduk sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi.

"Saat ini ada 11 kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang telah mencapai UHC, yakni Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, dan Kota Prabumulih," ungkapnya.

Sesuai Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor:054/SE/Dinkes Tahun 2023 tentang Sumsel Berkat, Gubernur Sumatera Selatan akan melaunching Program Sumsel Berkat agar dapat berjalan lancar, tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya, sekaligus sebagai upaya mencapai tujuan Program UHC.

Untuk itu, dia meminta pemerintah kabupaten/kota agar dapat memastikan seluruh Puskesmas (Fasilitas Kesehatan Tingkat I) di wilayahnya masing-masing melayani masyarakat ber-KTP Sumsel yang akan berobat.

"Bagi masyarakat Sumsel yang belum memiliki jaminan kesehatan, saat membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut Rumah Sakit dapat mengajukan kepesertaannya ke Dinas Kesehatan Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat," tuturnya.●

PKS NGGAK BISA JAUH DARI ANIES

Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terus merayu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Anies bahkan memuji PKS setinggi langit sebagai partai yang mampu menjaga Indonesia dari perpecahan dan bisa mengharmonikan keberagaman.

Bak gayung bersambut, PKS juga nampaknya masih akan setia mendukung Anies, meski kini yang menjadi pendampingnya adalah Cak Imin yang notabene adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Apalagi, kedua partai selama ini kerap berseberangan, di mana PKB ada di barisan pemerintah, sementara PKS ada di kubu oposisi.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengamini adanya pandangan yang menyebut bahwa partainya dan PKB memiliki persepsi yang berbeda. Tak jarang, hubungan keduanya disebut layaknya air dan minyak.

Namun, ia membantah hal tersebut dan mengungkapkan peluang besar keduanya dalam satu koalisi. Khususnya setelah Anies Baswedan memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres.

"Saya bilang Insya Allah sebentar lagi akan menjadi kopi dan gula yang menyatu, menjadi kopi yang nikmat dan itu satu kemenangan besar buat umat, yang tadinya quote and quote kita sering dipersepsikan berbeda, tapi ternyata kita bisa bersama mengantarkan kemenangan buat AMIN (Anies-Muhaimin)," ujar Mardani dalam sebuah diskusi daring, Jumat, 8 September 2023.

PKS sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Rencananya, kedua partai tersebut akan bersilaturahim ke Kantor DPP PKS.

Pasangan Anies-Muhaimin juga direncanakan hadir dalam silaturahim tersebut. Setelah silaturahim tersebut, ia meyakini bahwa dalam waktu dekat PKS akan segera mengumumkan sikap dukungan kepada pasangan tersebut.

"Kami berbincang, tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lainnya, semuanya penting, semuanya berkontribusi besar. Semuanya kita satukan dalam semangat perubahan untuk persatuan dengan memenangkan AMIN di Pilpres 2024," ujar Mardani.

PKS sendiri tak dalam posisi jual mahal terkait belum diputuskannya sikap mereka setelah Partai Demokrat memilih keluar dari Koalisi Perubahan. Namun, PKS memiliki mekanisme di internalnya dan masih menghormati

kesepakatan yang ada sebelumnya.

"PKS masih terikat dengan Nasdem, masih terikat dengan Mas Anies Baswedan, kalau PKB masuk, posisinya sangat jelas, ahlan wa sahlan. Jadi, sekarang PKS sedang menunggu (keputusan Majelis Syura), kita ingin sama-sama, bahasanya sebelum kita tampil di luar, kita selesaikan urusannya dulu di dalam," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, membantah partainya dan PKB berseteru. Dia menegaskan kedua partai tersebut akur.

"Jadi kalau ada pengamat yang mengatakan itu massa PKS dan PKB enggak cocok, enggak akur, itu surveyor atau pengamat yang suka ngomporngomporin. Karena fakta di lapangan kita akur-akur saja antara massa PKS dengan PKB," kata Hidayat di Jakarta Selatan, Minggu, 10 September 2023.

Hidayat mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Cak Imin yang dideklarasikan menjadi cawapres Anies Baswedan. Pertemuan dilakukan menilai PKS resmi mengusung Anies sebagai Capres 2024 mendatang dengan koalisi Perubahan bersama Nasdem.

Pertemuan akan dilakukan setelah Cak Imin selesai melaksanakan ziarah ke makam Wali Songo. Setelah adanya pertemuan tersebut, pihaknya akan segara melakukan sidang majelis syuro untuk memutuskan usulan Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies.

"Jadi memang Cak Imin juga menginginkan dan mengusulkan pertemuan itu, dan saya kira memang ada keperluan juga agar Majelis Syuro segera bersidang. Karena kan sekarang pendaftaran presiden dimajukan, jadi kita memang harus segera membuat keputusan dan karena kita adalah organisasi yang mempunyai aturan ya Majelis Syuro akan bersidang," jelasnya.

Hidayat menambahkan, sejauh ini akar rumput PKS mendukung deklarasi Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun demikian, dia menegaskan keputusan nantinya tergantung sidang Majelis Syuro.

"Mayoritas di PKS dan akar rumput di PKB mereka menyambut dengan baik adanya PKB masuk dalam koalisi ini, dan cak Imin menjadi cawapres disambut dengan baik oleh akar rumput PKS maupun PKB," kata dia.

"Tapi nanti akan diputuskan secara resmi melalui Majelis Syuro PKS dan Majelis Syuro juga anggotanya mewakili anggota PKS seluruh Indonesia. Insya Allah mereka sangat bertanggung jawab untuk dalam rangka memenangkan Pak Anies, karena kata kuncinya PKS itu capresnya adalah pak Anies dan cawapresnya berikutnya akan dibicarakan, termasuk besok itu," imbuhnya.

Perwakilan Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengaku optimistis PKS akan mendukung pasangan Anies-Muhaimin. Bahkan, ia mengaku bahwa pihaknya belum memikirkan skenario pemenangan tanpa PKS.

Ia sendiri membantah adanya ketegangan antara PKS dengan PKB dalam pengusungan Anies-Muhaimin. Bantahannya terbukti dari Partai Nasdem dan PKB yang baru saja menggelar pertemuan informal dengan PKS pada Kamis, 7 September 2023 malam.

Hadirnya PKS tentu akan memperkuat koalisi pengusungan Anies-Muhaimin di berbagai wilayah In-

donesia. PKB akan meningkatkan suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang selama ini dipandang sebagai kelemahan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Partai Nasdem memiliki basis massa yang sangat kuat di luar Pulau Jawa. Sedangkan PKS memegang peranan yang sangat penting dalam menguatkan Anies-Muhaimin di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

"Jadi semuanya sangat penting dan kami punya harapan besar supaya tiga partai ini bisa terus bersama-sama," ujar Sudirman.

Hadirnya PKB dan PKS juga menguatkan basis pemilih Anies-Muhaimin di berbagai kalangan pemilih Muslim. Harapannya dengan hadirnya PKS, tentu akan menguatkan pasangan tersebut dalam berbagai spektrum pemilih.

"Semua partai sangat melengkapi, yang kami bersyukur spektrumnya kan sangat baik, dari nasionalis diwakili oleh Nasdem, kemudian dari teman-teman Nahdliyin. Insya Allah Pak Anies mendapat dukungan kuat juga dari kalangan Muhammadiyah, tapi juga Islam perkotaan," ujar Sudirman.

Sudirman juga mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan PKS lewat rapat Majelis Syura. Namun, ia yakin PKS akan tetap dalam barisan pengusungan Anies-Muhaimin.

"Setahu saya Majelis Syura belum bersidang, jadi saya tidak pernah mendengar ada info atau kabar bahwa PKS tidak mendukung Anies. Info yang saya dengar bahwa PKS istiqomah bersama Pak Anies, tinggal memutuskan doa untuk calon (wakil) presidennya," ujar Sudirman.

Setelah adanya silaturahim dari Muhaimin, PKS kemungkinan besar akan menggelar Rapat Majelis Syura. Forum tersebut untuk memastikan sikap partai setelah adanya deklarasi pasangan Anies dengan Muhaimin.

Lewat keputusan Rapat Majelis Syura PKS sebelumnya, partai bersepakat untuk mengusung Anies sebagai bakal capres. Jelasnya, keputusan tersebut kemungkinan besar tak akan berubah setelah adanya deklarasi pasangan dengan Muhaimin.

Tak Ada Pilihan

Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC), Rio Prayogo, meyakini PKS akan tetap mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 meski kini telah dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar.

Menurut Rio, PKS tak punya opsi kecuali mendukung Anies. Kunci dukungan PKS ada pada Anies, bukan wakilnya. Sehingga, partai tersebut akan tetap mendukung Anies dengan siapapun ia dipasangkan.

Artinya, PKS akan menyetujui duet Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024. Namun, PKS harus tetap memutuskan hal itu lewat rapat Majelis Syuro sebagai prosedur keorganisasian.

Di sisi lain, Rio meyakini duet Anies dan Cak Imin bukan kabar mendadak bagi PKS. Menurut dia, mereka hanya tidak dilibat. Komunikasi NasDem dan PKB sama saat PKS juga menjalin komunikasi dengan PPP.

"PKS tahu kok, tapi mungkin belum dilibatkan langsung. Sama. Seperti komunikasi PKS dengan Sandi Uno kan jg tidak melibatkan NasDem sebagai mitra koalisi," kata Rio.

Dia menilai ketidakhadiran PKS dalam deklarasi Anies dan Cak Imin di Surabaya juga faktor penting. Apalagi, deklarasi tersebut juga dilakukan secara mendadak dan PKS perlu menyatakan sikap organisasi mereka.

Menurut Rio, kunci PKS di Pilpres hanya ada pada Anies. Sehingga, mereka akan kehilangan momentum untuk meraih suara jika tak mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, juga berpendapat, PKS bakal tetap bertahan mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. PKS akan tetap bertahan di Koalisi Perubahan.

"Memang PKS itu sejak awal tidak terlampau ngotot dan tidak punya figur untuk dipaksakan berpasangan dengan Anies. Jadi tidak mengherankan ketika Anies misalnya memilih Cak Imin sebagai pendampingnya itu santai-santai saja, dan tidak terlampau agresif menyerang Anies gitu ya," kata Adi.

Kondisi ini, kata Adi, berbeda dengan Partai Demokrat yang sejak awal sudah sangat yakin bahwa Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan dipilih dan dipinang sebagai pendamping Anies. Terlebih, Demokrat adalah partai yang bisa mendorong Anies untuk bisa maju dalam Pilpres 2024 dengan kecukupan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Selain itu, Demokrat juga mempunyai figur namanya AHY yang relatif punya elektabilitas untuk mengisi posisi bakal cawapres. Apalagi, ada janji yang selalu diberikan oleh Anies Baswedan kepada AHY bahwa keduanya akan bisa berdampingan. "

Tapi nyatanya, itu semua bubar total, semuanya itu punah, semuanya itu sirna ketika Anies akhirnya diputuskan berpasangan dengan Cak Imin. Jadi beda di situ. PKS enggak ngotot, PKS enggak agresif karena tak punya kader, beda dengan Demokrat merasa punya AHY, punya daya elektabilitas yang cukup tinggi dan sangat dibutuhkan oleh Anies untuk berlayar," kata Adi.

Adi berpandangan, basis konstituen PKS cenderung memilih Anies Baswedan dibandingkan bakal calon presiden lain seperti Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Sebab, pemilih Anies kebanyakan melabuhkan hati ke PKS sebagai partai yang dipilih dalam Pemilihan Legislatif 2024.

"Bagi PKS, yang penting nempel pada sosok Anies, tentu dengan harapan berkah politik elektoralnya akan berdampak secara signifikan kepada PKS," jelasnya.

Adi menilai, efek ekor jas atau coat-tail effect dari kandidat bakal capres yang menyebabkan peningkatan suara untuk partai politik akan hilang jika PKS meninggalkan Anies Baswedan. "Kalau hengkang misalnya, ke Prabowo ataupun ke Ganjar misalnya, PKS tidak akan mendapatkan coat-tail effect, satu-satunya cara supaya PKS itu dapatkan coat-tail effect, berkah elektoral dari Anies adalah terus bersama Anies," ucapnya.

Di sisi lain, dia memandang masih ada persoalan mendasar bagi PKS untuk bisa bersama PKB. Misalnya, perbedaan perihal kebiasaan dalam ibadah keagamaan.

"Kita tahu bahwa basis konsituen PKS dan PKB itu memang cukup berjarak, saling bertabrakan satu sama lainnya, bahkan saling bermusuhan cukup lama. Tinggal bisa dilihat ke depan apakah basis konstituen PKS, basis konsituen PKB yang selama ini beda mazhab bisa seiring sejalan atau justru akan menimbulkan friksi-friksi," kata Adi.

"Mereka itu bisa menjadi menyebab insoliditas antar pendukung, karena apapun judulnya pendukung PKS dan PKB itu tidak pernah ketemu satu sama yang lain, karena persoalan ibadah-ibadah keagamaan," terangnya.●

CATATAN UNTUK PEMIMPIN MASA DEPAN

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan peta koalisi partai politik di Indonesia bisa berubah setiap saat tergantung situasi dan cuaca politik di Tanah Air.

Hal tersebut diungkapkan Bamsoet sambil berkelakar saat Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani duduk berdampingan bersama Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid dalam acara peluncuran buku terbarunya di SCBD, Jakarta Selatan, Minggu, 10 September 2023.

"Pak Arsul terima kasih atas kehadirannya, beliau wakil ketua MPR RI dari PPP. Satu lagi Kiai Haji Hidayat Nur Wahid dari PKS, kebetulan duduk bersebelahan lain koalisinya. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan melintang, saya yakin dan percaya koalisi yang ada saat ini bisa berubah-ubah, tergantung situasi dan cuaca politik," kata Bamsoet.

Dalam peluncuran dua bukunya yang berjudul "Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045" dan "News Maker Satu Dasawarsa The Politician Senayan", Bamsoet mengungkapkan bahwa buku-bukunya adalah kegalauan terhadap kondisi Indonesia yang disuarakan.

Bamsoet mengatakan, kegalauan yang dituangkan dalam dua buku terbarunya adalah soal Indonesia yang belum memiliki rancangan pembangunan jangka Panjang. Sehingga, setiap berganti presiden visi-misi pembangunan jangka panjang Indonesia juga ikut berganti.

Kegalauan lain yang dirasakan Ketua MPR itu adalah Indonesia tidak memiliki protokol darurat apabila terjadi kejadian luar biasa. Salah satu contoh nyatanya adalah pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga tiga tahun lamanya.

Menurut Bamsoet, protokol darurat tersebut sangat vital dalam menghadapi salah satu momen krusial yang akan menentukan masa depan bangsa, yakni momen tahun politik 2024.

"Kemudian kegalauan berikutnya adalah saya sebagai Ketua MPR, saya melihat bahwa bangsa kita, konstitusi kita tidak ada pintu darurat, tidak ada protokol kalau terjadi sesuatu yang luar biasa pada bangsa ini. Saya ambil contoh apakah di ruangan ini bisa ada yang menjamin Pemilu besok 14 Februari 2024 bisa dilaksanakan sesuai jadwal?" tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan konstitusi, anggota legislatif akan berakhir pada 1 Oktober 2024 dan kemudian diangkat anggota legislatif baru hasil pemilu dan jabatan presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

"Kalau pemilu tidak dilaksanakan, maka seluruh jabatan hasil pemilu tidak ada. DPR tidak ada, apalagi presiden tidak bisa dilantik, yang tersisa hanya Panglima TNI dan Kapolri," kata Bamsoet.

Kegalauannya yang ketiga adalah soal demokrasi transaksional atau demokrasi NPWP (nomer piro wani piro atau nomor berapa berani berapa). Dia khawatir parlemen akan diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki modal cukup untuk kampanye, tetapi tidak memiliki kepiawaian atau tidak memiliki nilai-nilai kebangsaan dan ideologi partai yang diikutinya.

"Kemudian yang ketiga adalah apakah terus kita biarkan demokrasi yang seperti ini yang ujung-ujungnya nanti kita akan terjebak pada oligarki, para pemegang modal. Kita terjebak pada demokrasi angka-angka, demokrasi yang mahal, yang hanya nanti bisa dimiliki oleh para pemilik modal?" ujarnya.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa Indonesia harus memiliki tokoh politik, hukum, ekonomi, dan kekuasaan yang dapat menjaga masing-masing pilar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menurutnya keempat bidang tersebut saling berhubungan.

Ia mengatakan bahwa politik tanpa hukum bisa menimbulkan anarki, hukum tanpa politik hanya menjadi rangkaian kata-kata, serta politik dan hukum tanpa kekuasaan hanya berupa angan-angan.

"Jika ingin menjadi negara maju

yang modern, Indonesia harus memiliki tokoh politik, tokoh hukum, tokoh ekonomi, dan tokoh kekuasaan yang bisa menjaga masing-masing pilar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Bamsoet.

Oleh karena itu, dia berharap kegalauan yang dituangkan dalam tulisannya, bisa menjadi referensi bagi para pemimpin masa depan bangsa dalam menyusun kebijakan dan membangun negeri untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045.

"Nah, ini PR (pekerjaan rumah) kita semua, mudah-mudahan ke depan pemimpin kita yang kita akan pilih 2024, tanggal 14 Februari 2024, nanti mampu melihat persoalan dan mampu menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Bamsoet mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting. Menurut dia, bangku pendidikan bisa mencetak peserta didik yang pintar secara akademik sekaligus memiliki karakter kebangsaan.

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan peserta didik yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila," kata dia.

Bamsoet juga mengajak perguruan tinggi, melalui lembaga kajian dan penelitian, untuk mengkaji sistem politik dan pemilihan langsung yang dilakukan dari mulai tingkat pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, legislatif, hingga presiden.

Dalam konteks keindonesiaan, kata Bamsoet, praktik kehidupan demokrasi dijiwai sila keempat yang mengamanatkan penegakan kedaulatan rakyat, serta melembagakannya dalam mekanisme permusyawaratan dan perwakilan.

Menurut dia, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam lembaga perwakilan, idealnya dapat dimanifestasikan salah satunya melalui representasi politik di DPR, representasi kedaerahan di DPD, dan representasi golongan atau kelompok fungsional yang bisa terwadahi dalam utusan golongan.

Ia memandang perlu terus melakukan pembangunan hukum, salah satunya dengan mengganti produk hukum yang berasal dari zaman sebelum Indonesia merdeka, melakukan pembaharuan hukum nasional, hingga membentuk hukum baru.

MPR, lanjut dia, saat ini sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0.

Bamsoet mengutarakan bahwa urgensi menghadirkan PPHN berangkat dari kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif dan bisa menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara, serta bisa menjadi panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.

Selain memastikan program pembangunan tidak mangkrak, menurut dia, keberadaan PPHN juga akan menjawab megatrend dunia seperti kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia.

Bamsoet juga berharap peran MPR semakin kuat dalam mengawal bangsa dan negara di masa akan datang.

"Di masa depan, kita tidak tahu persis angin sejarah akan membawa MPR ke bentuk peran dan kekuasaan seperti apa. Tapi saya berharap, kita semua berharap, peran MPR di masa depan itu bisa kian kuat untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik," katanya pada peringatan Tasyakuran Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.

Dia menjelaskan sepanjang sejarah negeri ini, MPR terus mengalami perubahan dalam peran yang dimainkan, serta kekuasaan yang dimiliki. Perubahan itu sejalan dengan dinamika dalam kehidupan politik di Indonesia, yang terus mencari bentuk terbaik, untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai kesejahteraan bersama.

Dia merasa bersyukur hingga usia ke-78, MPR RI telah menjadi bagian dari kerja keras bangsa untuk mencapai tujuan pemerintahan negara. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bamsoet menegaskan sejarah MPR adalah cerminan sejarah negeri ini dalam pencarian jati dirinya. Dia meyakini pencarian jati diri, tidak akan pernah berhenti selama Indonesia masih ada.

"Dinamika adalah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" ujarnya. ●

BAWASLU-KPU BELUM JUGA AKUR

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 hingga 150-an hari menuju pencoblosan masih saja diwarnai silang sengketa antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ibarat dua sisi mata uang, tugas dan fungsi KPU adalah panitia penyelenggaraan pesta demokrasi yang dipelototi oleh Bawaslu guna memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip konsitusional, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja

Dalam beberapa kali tahapan krusial Pemilu Serentak 2024, Bawaslu dan KPU kerap memunculkan perseteruan pendapat. Sebut saja yang baru-baru ini terjadi dalam tahapan pencalonan anggota legislatif di DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan itu, Bawaslu merasa dijegal kinerja pengawasannya oleh KPU. Sebab, sistem informasi pencalonan (Silon) yang dimanfaatkan KPU sebagai instrument pendaftaran hingga verifikasi data serta dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) dibatasi, bahkan ditutup aksesnya.

Setelah hampir lima kali berkirim surat ke KPU untuk permohonan membuka akses Silon, Bawaslu tak mendapat respon yang sesuai harapannya. Alih-alih, justru 9.919 nama bakal caleg ditetapkan masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) tanpa ada pengawasan melekat dari pengawas Pemilu.

Karena dirasa menyalahi aturan, akhirnya Bawaslu memilih mengadukan KPU akibat pembatasan akses Silon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Sidang perkara yang diadukan Bawaslu tersebut digelar pada Senin, 4 September 2023, dan dihadiri oleh 7 Anggota KPU yang antara lain Hasyim Asyari sebagai Ketua, serta 6 ketua divisi yakni Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajad, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, dan Parsadaan Harahap. Mereka disebut sebagai Teradu I hingga Teradu VII.

Sementara, dari Bawaslu yang disebut sebagai pihak Pengadu di antaranya hadir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang didampingi oleh Anggota Bawaslu yang menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty, serta Anggota Bawaslu yang menjabat Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono.

Dalam momen tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari membantah membatasi Silon kepada Bawaslu, dengan mengklaim mengikuti aturan hukum terkait perlindungan data pribadi masyarakat, sehingga akses Silon kepada Bawaslu tidak dibuka maksimal, melainkan hanya diberikan ketika ditemukan dugaan pelanggaran.

"Tidaklah benar jika para Teradu (KPU) dianggap melakukan pembatasan para Pengadu (Bawaslu) ihwal data dan dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD. Mestinya para Pengadu memahami langkah-langkah para Teradu dalam konteks menjalankan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga data dan dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD. Kebijakan yang dimaksud juga berlaku pada Pemilu 2019 ketika saya sebagai teradu juga menjadi bagian dari anggota KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2019," ucap Hasyim di hadapan Majelis siding yang dipimpin Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Sementara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersikukuh KPU tidak menjalankan tugas sesuai PKPU 10/2023 ten-

tang Pencalonan Anggota Legislatif, serta disebut melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemilu, Peraturan PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Karenanya, dia meminta kepada DKPP agar menjatuhi hukuman tegas kepada seluruh pimpinan KPU, karena adanya Silon dalam tahapan pencalonan anggota legislatif oleh KPU. "Memohon kepada DKPP memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada," pinta Bagja saat membacakan petitumnya dalam persidangan.

Yang menarik, dalam sidang tersebut juga dihadirkan mantan Ketua Bawaslu periode 2013-2017 yang juga Ketua DKPP periode 2017-2022, Prof. Muhammad, yang bertindak sebagai saksi ahli menjelaskan tentang kedudukan hukum KPU, Bawaslu, dan juga DKPP dalam sistem ketata negaraan di Indonesia dalam hal Pemilu.

"Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih DPD secara langsung oleh rakyat, UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 7," urai Prof. Muhammad.

Makna satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu itu adalah antara KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki prinsip atau nilai kesetaraan dan kesamaan dalam satu tujuan, yaitu menyelenggarakan pemilu. Walalupun dalam praktik kerjanya terdapat karakteristik fungsi masing-masing.

"KPU konsen pada tata kelola teknis pemilu, Bawaslu konsen pada tata kelola pengawasan pemilu, dan DKPP konsen pada tata kelola perilaku penyelenggara pemilu," sambungnya.

Dari situ, dia menyatakan bahwa ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki prinsip atau nilai kesetaraan atau kesamaan dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang sesuai azas konstitusional, sebagai hadirnya tanggung jawab bersama atau kolektif.

"Untuk mewujudkan efektivitas tanggung jawab kolektif tersebut, secara khusus KPU dan Bawaslu perlu untuk saling terbuka, saling mendukung, saling bantu membantu, saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengoreksi dalam makna positif," tuturnya.

Oleh karena itu, Prof. Muhammad memandang KPU dan Bawaslu seharusnya saling berkolaborasi untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas di 2024. Bukan justru seperti berkontestasi dan makin memperkeruh suasana politik menjadi semakin tak menentu dengan silang sengketa permasalahan hukum di antara keduanya.

"Pembatasan durasi sekitar 15 menit pada tahap verifikasi administrasi kurang atau tidak memadai untuk mendapatkan hasil pengawasan yang cermat, kredibel dan akuntabel. Idealnya, durasi ditambah atau tetap di-

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari

tentukan durasi waktunya. Karena, KPU berkepentingan memastikan terlaksananya PKPU terkait jadwal, program dan tahapan memenuhi azas kepastian hukum," ungkapnya.

"UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi argumentasi KPU dalam membatasi akses Silon tidak tepat jika diberlakukan pula kepada Bawaslu sebagai bagian integral penyelenggara Pemilu. Pembatasan akses Silon atas data dan dokumen persyaratan pencalonan hanya diberlakukan kepada pihak publik luar penyelenggara Pemilu," tegas Prof. Muhammad.

Cara pandang pelaksanaan pemilu yang berintegritas bermula dari profesionalitas para penyelenggara pemilu juga datang dari Peneliti Utama Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro.

Belakangan ini, dia memperhatikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dihantui meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP yang diisukan berkelindan dengan partai politik yang notabene sebagai kontestan pemilu.

"Terus terang, penyelenggara sudah membuat catatan tesendiri, bermasalah dengan parpol. Parpol yang diuntungkan, dan publik yang sudah menaruh trust-nya berkurang atau public distrust, dan itu bisa akumulatif. Tolonglah penyelenggara pemilu (yang di antaranya) KPU, Bawaslu, dan DKPP itu berfungsi efektif, melakukan tusi-nya secara profesional, jangan partisan," ujar Siti Zuhro dalam diskusi KedaiKOPI di bilangan Jakarta Pusat, Kamis, 8 September 2023.

Sosok yang kerap disapa Mbak Wi itu menyayangkan kualitas kepemimpinan lembaga penyelenggara pemilu sekarang semacam ikut berkontestasi dengan peserta pemilu. Padahal, kepemimpinan KPU dan Bawaslu yang terpilih dari hasil seleksi saat dirinya ikut menjadi tim seleksi, tidak pernah macam-macam atau aneh-aneh dalam menjalankan tugasnya. ●

PEMILU HARUS RIANG GEMBIRA

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pelaksanaan Pilpres 2024 disikapi dengan suasana persaudaraan dan kegembiraan. Kiai Ma'ruf menyebut, seharusnya pilpres sebagai ajang kontestasi memilih pemimpin tidak diliputi suasana permusuhan.

"Mestinya disikapi dengan kegembiraan, dengan suasana persaudaraan itu seperti orang misalnya balapan kayak anak-anak balapan itu kan, siapa yang menang siapa yang kalah abis itu kan ketawa semua gembira," ujar Kiai Ma'ruf dalam Dialog Kebhinekaan seperti dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Minggu, 10 September 2023.

Kiai Ma'ruf berharap tidak perlu ada pihak yang saling bermusuhan atau menjelekkan satu sama lain. Sebagai ajang memilih pemimpin terbaik, maka perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar.

"Pasti dalam rangka memilih itu kan tidak sama, pilihan itu tidak sama. Karena itu, kalau ada yang satu milih A, yang satu milih B. Itu normal saja, mestinya itu tidak disikapi kemudian kenapa dia milih A, kenapa dia tidak milih B," ujar Kiai Ma'ruf.

"Karena itu, kalau ada yang kemudian timbul marah-marahan kemudian saling menjelekkan mestinya itu tidak perlu, ada di dalam sistem pemilu yang kita lakukan itu sesuai dengan namanya pesta demokrasi," sambungnya.

Wapres menekankan jangan sampai perbedaan pilihan politik memicu pembelahan di masyarakat. Ia juga tidak ingin polarisasi yang terjadi pada 2019, kembali terjadi pada 2024.

"Kita kan berkaca di 2019 ya, itu terjadi pergesekan sampai keluar istilahnya itu cebong kampret ya itu artinya saling menjelekkan. kalau itu kita tidak dikendalikan, maka tidak mustahil 2024 itu juga akan terjadi seperti itu," tegas dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun berpesan kepada seluruh pihak mulai dari penyelenggara Pemilu, peserta pemilu seperti partai politik dan juga para calon menjaga kondusifitas pemilu. Khususnya elite politik yakni pimpinan partai hingga tim kampanye para calon menggunakan cara-cara yang tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.

"Karena itu kita selalu terus mengantisipasi dan ini terletaknya pada pimpinan partai politik sendiri dan tentu tim kampanyenya. Hal-hal seperti ini harus sudah dibuat untuk tidak terjadi seperti itu," katanya.

Kiai Ma'ruf pun mengapresiasi sejumlah silaturahim politik yang dibangun partai dalam mencairkan suasana jelang pemilu. Ia berharap hal ini terus dipertahankan hingga pilpres usai.

Khusus di media sosial, Kiai Ma'ruf juga menekankan agar tim kampanye dari masing-masing calon tidak menggunakan cara-cara yang mengandung ujaran kebencian.

"Saya lihat masih ada pihak-pihak yang ingin menggunakan seperti itu, di medsos-medsos itu, ada ungkapan yang kebencian seperti permusuhan. Ini yang harus diawasi jangan sampai

itu kemudian memberikan pengaruh kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu terprovokasi melalui cara-cara seperti itu, sangat mungkin apa yang pernah terjadi 2019 itu bisa terulang lagi dan itu yang harus Kita waspadai," ujarnya.

Kiai Ma'ruf juga meminta penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan sikapnya netral dan adil. Sebab, penyelenggara pemilu memegang peran vital dalam mensukseskan Pemilu 2024.

"Sebagai penyelenggara pemilu itu harus betul-betul adil, jangan memihak, jangan kelihatan seperti memihak kepada kelompok tertentu. Itu akan menimbulkan kemarahan dari pihak yang lain, itu sikap," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf mencontohkan, jika dalam penyelenggaraan terdapat peserta pemilu melakukan pelanggaran, maka KPU-Bawaslu harus menegakkan sanksi sesuai ketentuan. Menurutnya, jangan sampai ada perlakuan berbeda yang memicu kemarahan dari peserta pemilu lainnya.

"Apabila terjadi pelanggaran, harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan tanpa pandang bulu. Pihak mana pun kalau dia melakukan pelanggaran harus ditegakkan sesuai dengan aturan. Kalau tidak, nanti juga akan menimbulkan kemarahan dari pihak yang lain. Kalau yang satu ditindak, yang satu tidak, ada perlakuan yang tidak adil," ujarnya.

Selain itu, dia juga menekankan agar KPU dan Bawaslu memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Mulai dari sisi kelengkapan logistik pemilu hingga pengawasan dari pusat hingga tingkat terkecil.

"Jangan sampai penyelengggaran kita itu tidak terpenuhi, ada surat-surat yang tidak cukup, ada tempat yang tidak memadai, perlengkapannya kurang, kemudian spek pengamanan itu juga harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Saya kira kalau semua berjalan dengan baik, tidak ada celah untuk orang kemudian terjadi kemarahan atau sehingga terjadi ketidakdamaian," ujarnya.

Ia menekankan kepada penyelenggara dan peserta Pemilu 2024 dan masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa selama berkontestasi. Sebab, sebagai pesta demokrasi, pemilu harus disambut dengan riang gembira tanpa adanya perpecahan yang berpotensi memecah belah bangsa ke depan.

"Marilah kita jaga keutuhan bangsa. Kita akan berpesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik menjadi pemimpin bangsa, tentu semua pihak ingin memenangkan pertarungan itu, tetapi tetap harus menjaga cara-cara yang baik. Dan jangan karena keinginan kita untuk menang, mengorbankan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, juga mewanti-wanti agar para tokoh politik tidak menciptakan konfrontasi antara nilai keagamaan dan nasionalisme pada Pemilu 2024.

"Mestinya kita sudah selesai soal nasionalime dan agama. Jadi, para tokoh dan juga warga bangsa tidak perlu mengonfrontasikan sendiri antara nasionalime dan agama, antara sikap kecenderungan nasionalis dan agamais," kata Haedar.

Alih-alih mempertentangkan nasionalisme dan agama, menurut Haedar, para elite politik maupun peserta yang berkontestasi pada Pemilu 2024 semestinya mampu menghayati keduanya secara bersamaan. "Soal di sana ada lebihnya, ya itu soal keunggulan dan di sanalah letak pilihan Bapak Ibu dan Saudara sekalian," ujar Haedar.

Dia berharap Pemilu 2024 tidak lagi memunculkan dikotomi dengan menciptakan posisi diametral atau pemisah antara agama dan nasionalisme. Justru yang paling penting adalah bagaimana mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan atau keislaman dengan nasionalisme.

"Sekaligus memberi makna substantif pada nilai keislaman atau keagamaan, dengan kenegarawanan atau kebangsaan," tutur dia.

Haedar memandang proses politik dan demokrasi di Indonesia dewasa ini sejatinya sudah tidak ada lagi pertarungan ideologi, kecuali who gets what, when, and how atau siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya.

Kendati demikian, ia percaya bahwa seluruh elite politik yang berkontestasi pada Pemilu 2024 masih memiliki idealisme untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai yang tertuang dalam konstitusi. "Nah, justru kita bawa agar itu bisa dibuktikan dalam realitas politik," tutur Haedar.

Pengalaman lima kali penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi, bagi Haedar, semestinya sudah cukup membuat Bangsa Indonesia mampu bersikap lebih dewasa dan matang seraya menghindari permusuhan dan kebencian.

"Saya yakin para tokoh politik banyak yang bertanggung jawab dan memiliki kerangka kebangsaan dan keagamaan yang baik," kata dia.●

PETAHANA TANTANG CALON LAWAN

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, dan Wakil Gubernur, Ria Norsan, resmi mengakhiri masa jabatannya pada 5 September 2023. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Harrison Azroi sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Sutarmidji sudah menyatakan niatnya untuk kembali bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2024. Ini berarti ia siap untuk mengabdikan diri kembali jika terpilih dalam periode kedua sebagai orang nomor satu di Kalbar.

"Saya tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau DPR RI. Mengenai Pilgub, kita akan melihat nanti. Namun, hingga saat ini, saya tetap berpikir bahwa saya akan maju karena masih memungkinkan," ungkap Sutarmidji.

Dirinya mengaku, siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur Kalbar harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang.

"Jadi, siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, harus bersiap-siap. Saya juga harus bersiap sejak sekarang," tegasnya.

Sebagai petahana, Sutarmidji merasa bahwa dirinya tidak perlu melakukan persiapan yang lebih besar untuk menghadapi Pilgub Kalbar 2024. Ia bahkan berpendapat calon-calon baru atau tokoh-tokoh yang berniat berpartisipasi dalam kontestasi politik tersebut harus lebih siap daripada dirinya.

"Para calon baru yang ingin maju harus lebih siap, karena Kalbar berbeda dengan pulau Jawa. Di Jawa, seseorang dapat menyelesaikan perjalanan mengelilingi daerah dalam satu hari," katanya.

Meskipun akan bersaing dalam Pilgub Kalbar 2024, Sutarmidji tetap terbuka untuk berdiskusi atau berbicara dengan calon-calon lainnya. Baginya, kompetisi bukanlah tentang menciptakan permusuhan, tetapi yang lebih penting adalah untuk mencapai sinergi di antara semua pihak.

"Kita semua adalah orang Kalbar. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menciptakan konflik atau perpecahan, karena negara harus tetap bersatu dan utuh," jelasnya.

Terkait calon wakil gubernur yang akan mendampinginya nanti, Sutarmidji menyatakan Ria Norsan akan tetap menjadi pasangannya.

"Tentang hal ini, kita akan lihat nanti jika ada perubahan. Namun, untuk saat ini, saya ingin tetap berpasangan dengan Pak Wakil (Ria Norsan)," ungkapnya.

Penuhi Janji

Sutarmidji menegaskan seluruh janji-janji kampanye ketika mencalonkan diri sebagai gubernur telah dijalankan. "Kalau janji saya rasa semuanya sudah, ini klaim kami ya, sudah kita jalankan," ujar Sutarmidji, Rabu, 30 Agustus 2023.

Dia mencontohkan progres pembangunan pada tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan.

Sutarmidji mengatakan, janji membebaskan biaya pendidikan sudah dilakukan dengan menggunakan anggaran hampir Rp200 miliar. Kemudian, pembenahan infrastruktur pendidikan juga telah banyak dilakukan.

"Kita sampai akhir 2023 ini membangun 54 sekolah baru dan memperbaiki 100 ribu lebih set kursi meja, karena waktu itu sudah parah betul, saya rasa kursi meja di sekolah sekarang 80 persen sudah modern, belum lagi yang lain-lainnya, laboratoriumnya, ruang pertemuan, sudah," paparnya.

Pada bidang kesehatan, Sutarmidji mengaku telah banyak melakukan perubahan dan perbaikan pada RSUD dr Soedarso.

"Rumah sakit itu pembenahannya tidak gampang, kita bangun gedung rawat inap dua lantai, kemudian cath lab jantung lengkap, kemudian radioterapi, kemudian sekarang sedang

dibangun ruang rawat anak untuk 100 bed, kemudian pelayanan klinik gigi modern, mata modern, yang jelas yang banyak dikunjungi pasien," ujarnya.

"Sehingga pembenahan-pembenahan ini tidak saya klaim 100 persen sudah baik, tapi setidaknya progresnya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan tingkat kepercayaan masyarakat pada Soedarso lebih baik, buktinya dari sisi pendapatan Soedarso besar," sambungnya.

Kemudian, pada pembangunan infrastruktur jalan, dari 49,71 persen jalan mantap saat awal jabatannya, pada akhir 2023 diperkirakan bisa mencapai 78 persen.

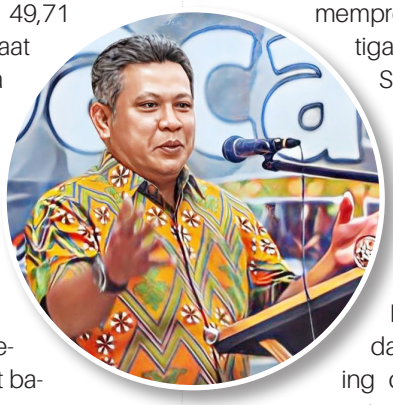

"Nah, artinya kita bisa memperbaiki hampir 30 persen dalam waktu 5 tahun. Ini sebenarnya suatu prestasi yang sangat-sangat bagus, kalau klaim kita ya," ucapnya.

"Dan banyak lagi yang kita perbaiki, termasuk misalnya penataan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tampilan tata kelola pemerintahan. Nah, PAD itu dari Rp1,7 triliun ketika kita mulai, sekarang per akhir tahun ini perubahan anggaran yang sudah disusun KUA PPAS-nya itu Rp3,26 triliun," jelasnya.

Sutarmidji menjelaskan pemerintahannya berjalan efektif hanya tiga tahun lebih sedikit. Hal tersebut dikarenakan karena di tengah perjalanan pemerintahannya diserang oleh Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, dengan keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi, pembangunan di seluruh Kalbar terus berjalan.

"Kondisi Covid-19 dua tahun itu kita tidak bisa apa-apa, pendapatan menurun, tapi pembangunan tetap jalan dengan keterbatasan-keterbatasan," ucapnya.

Sutarmidji mengungkapkan, selama Covid-19, Pemprov Kalbar kehilangan banyak anggaran akibat dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagainya.

"Itu bisa setara dengan kalau kita buat jalan itu hampir 100 kilometer, artinya kalau Rp8 miliar per km itu kita bisa kehilangan sekitar Rp800-an miliar," jelasnya.

Tiga Pasangan Calon

Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi, mengeluarkan prediksi terkait Pilgub Kalbar 2024. Ia meramalkan bahwa pemilihan ini akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Namun, ia menyatakan situasi politik masih dinamis.

"Sampai saat ini, peta politik di Pilgub Kalbar masih sangat cair. Tapi, saya memprediksi bakal diikuti tiga pasang calon," kata Syarif Usmulyadi.

Salah satu perubahan yang dianggap mungkin adalah pemisahan pasangan petahana Sutarmidji dan Ria Norsan. Jika ini terjadi dan keduanya bersaing dalam Pilkada, maka potensi tiga pasangan calon dianggap lebih mungkin terjadi.

Namun, masih belum ada kepastian mengenai apakah Sutarmidji dan Ria Norsan akan kembali berduet sebagai pasangan calon.

Syarif melihat adanya nama-nama yang memiliki potensi maju dalam Pilgub Kalbar. Selain Sutarmidji dan Ria Norsan, ada pula Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Ketua Komisi V DPR Lasarus, dan Bupati Sambas Satono.

Sutarmidji sebagai petahana memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup, serta capaian pembangunan yang dianggap kuat. Sehingga, ia diyakini akan kembali maju dalam Pilgub Kalbar 2024.

"Partai yang berpotensi mengusungnya termasuk PPP, Golkar, NasDem, dan PKS," tambahnya.

Ria Norsan juga memiliki potensi sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Ia memiliki popularitas yang kuat dan pengalaman sebagai Bupati Mempawah selama dua periode.

"Norsan juga dikenal dengan citra agamis dan kemampuan logistik yang mumpuni," ulasnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, juga kini sedang aktif berkeliling Kalbar yang menandakan kesiapannya untuk masuk ke dalam bursa pencalonan calon gubernur. Namun, Syarif melihat bahwa ia mungkin lebih cocok sebagai calon wakil gubernur.

Ada juga Ketua Komisi V DPR Lasarus yang juga telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Kalbar 2024. "Lasarus memiliki pengalaman politik yang kaya dan partainya, PDIP, merupakan pemenang Pemilu 2019. Ia memiliki peluang besar untuk diusung oleh partai tersebut," bebernya.

Bupati Sambas, Satono, sebagai pendatang baru di dunia politik juga memiliki potensi karena pengalamannya sebagai birokrat dan prestasinya dalam membangun daerahnya. "Namanya disebut-sebut sebagai calon wakil gubernur yang dapat diterima di berbagai kalangan," tambahnya.

Lasarus yang juga Ketua DPD PDIP Kalbar mengklaim telah mempersiapkan dua modal kuat untuk bersaing dalam Pilgub Kalbar 2024.

Lasarus menyatakan bahwa jika diberi kesempatan oleh masyarakat untuk menjadi gubernur, dia memberikan jaminan bahwa kepemimpinannya akan lebih baik daripada gubernur petahana.

Modal pertama yang diandalkan Lasarus adalah pengalamannya yang luas sebagai pimpinan DPR selama tiga periode. Modal kedua yang dimiliki Lasarus adalah jaringan hubungan yang luas di pemerintah pusat.

Lasarus menambahkan, pengalaman dan jaringan yang luas ini akan dia manfaatkan sebaik mungkin jika dipercaya untuk memimpin Kalimantan Barat. •

Khofifah Indar Parawansa

JADI CAWAPRES ATAU GUBERNUR JATIM

Khofifah Indar Parawansa tengah menjadi pusat perhatian karena disebut sebagai kandidat potensial untuk posisi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Selain itu, Khofifah juga memiliki elektabilitas tinggi untuk kembali maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Ketua Umum Muslimat NU ini bahkan mengumumkan bahwa sejumlah partai politik telah memulai komunikasi tentang kemungkinan dirinya maju sebagai cawapres.

Walaupun begitu, Khofifah menekankan bahwa keputusannya masih dalam tahap penantian. Dia belum pasti menerima atau menolak tawaran tersebut.

"Kami akan menunda keputusan sampai proses konfirmasi dilakukan bersama. Jadi saat ini belum dalam posisi 'ya atau tidak'," kata Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini menegaskan, dia akan mengambil arahan dari tokoh agama yang terkemuka.

Sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Khofifah menjelaskan bahwa langkah-langkah kebijakan selanjutnya akan didiskusikan secara organisasional.

"Setiap langkah kebijakan yang berkaitan dengan organisasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Ini belum terjadi, sehingga konfirmasi dan klarifikasi diperlukan," tegasnya.

Khofifah menegaskan bahwa PBNU selalu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Dia juga menyoroti hubungan komunikasi yang baik antara partainya dengan berbagai partai politik di daerah.

Saat ini, Khofifah telah masuk dalam daftar sepuluh besar calon wakil presiden potensial. Dalam survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting, Juli 2023, Khofifah menduduki peringkat ke-9 dengan elektabilitas sebesar 2,3 persen.

Ini menjadikannya lebih tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Yenny Wahid, dan Gibran Rakabuming Raka.

Sementara, Partai Demokrat dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Selain itu, partai berlambang mercy ini juga mengumumkan niatnya untuk mengajukan Emil Dardak sebagai pasangan Khofifah untuk periode kedua.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan, komunikasi antara Khofifah dan Emil tetap berjalan intens.

"Sikap kami adalah mendukung Bu Khofifah," ungkap

Herzaky.

Selaku Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky menjelaskan bahwa Emil Dardak secara rutin memberikan masukan kepada Khofifah. Hasil dari komunikasi ini, menurut Herzaky, menegaskan bahwa Khofifah dan Emil akan tetap berpasangan dalam periode kedua kepemimpinan.

"Saat ini, Mas Emil memberikan kontribusi berupa masukan, yang memperkuat keyakinan kami bahwa kami akan melanjutkan perjalanan ini bersama-sama," tegas Herzaky.

Dalam hal pengaturan proporsi, rencananya tidak akan mengalami perubahan. Khofifah akan tetap menjadi Cagub sementara Emil Dardak akan mendampinginya sebagai Cawagub Jatim 2024.

"Jadi, niat kami adalah untuk mengusung Bu Khofifah sebagai cagub dengan Mas Emil berada di posisi wakil gubernur. Itulah rencana kami di Jawa Timur," jelas Herzaky.

Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraj, mengamati bahwa persaingan dalam Pilgub Jawa Timur semakin terfokus pada tiga tokoh utama.

Data terbaru dari survei ARCI mengidentifikasi tiga nama yang mendominasi perbincangan, yaitu Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, dan Achmad Fauzi Wongsojudo.

"Dalam penelitian terbaru kami, nama-nama tersebut mendapat sorotan utama dengan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak berada di peringkat teratas," ulasnya.

Hasil survei yang dilakukan oleh ARCI dalam rentang waktu 4 hingga 15 Juli 2023 melibatkan 1.250 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Khofifah berada di posisi teratas, diikuti oleh Emil di posisi kedua. Sementara Achmad Fauzi Wongsojudo atau Cak Fauzi semakin mendekati dengan erat kedua nama sebelumnya.

Baihaki menjelaskan bahwa dalam hasil simulasi yang melibatkan 12 nama calon, elektabilitas Cak Fauzi berhasil mencapai 11,2 persen. Meskipun berada di bawah Khofifah dan Emil, namun performa tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan bagi Cak Fauzi.

Dalam simulasi yang lebih terfokus melibatkan hanya empat nama calon, elektabilitas Cak Fauzi terus meningkat. Tokoh muda asal Madura ini berhasil meraih 15,1 persen dukungan. Peningkatan ini menjadikan posisinya semakin mendekati Khofifah dan Emil.

Baihaki menilai peluang kecil jika Khofifah tetap menggandeng Emil. Pasalnya, Baihaki melihat kedekatan antara Khofifah dan Emil kian jauh. Putra Khofifah, Ali Mannagalli Parawansa, sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Mundurnya Ali menjadi pertanyaan besar hubungan politik antara Khofifah dan Emil.

"Kelihatan kalau di antara gubernur dan wakil gubernur ini ada perpecahan, putranya saja sampai mundur," ujarnya.

Oleh Karena itu, Khofifah perlu memikirkan opsi lain untuk mencari pendampingnya di Pilgub Jatim 2024.

Menurutnya pilihan yang paling realistis ada di sosok Cak Fauzi. Ia dinilai populer karena dikenal sebagai sosok pemimpin yang kalem dan santun. Sesuai dengan adat ketimuran, sehingga disukai masyarakat di pedesaan.

"Kalau gaya kepemimpinan Cak Fauzi lebih cool," pungkasnya.

Direktur Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W Oetomo, mengatakan, pasangan Khofifah dan Emil Dardak masih berpotensi melanjutkan masa jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim. Mochtar, elektabilitas Khofifah dalam Pilgub Jatim 2024 paling tinggi, sebesar 34,2 persen.

Mochtar menyebut, elektabilitas Khofifah jauh meninggalkan nama-nama lain seperti Tri Rismaharini (18,4 persen), Emil Dardak (11,5 persen), Eri Cahyadi (6,7 persen), hingga Anwar Sadad (5,5 persen). Bahkan, nama-nama lain seperti Gus Ipul hingga Sarmuji elektabilitasnya di bawah 5 persen.

Mochtar memaparkan, untuk cawagub Jatim, elektabilitas Emil Dardak sangat kokoh meninggalkan nama-nama lain. Elektabilitas suami Arumi Bachsin itu mencapai 35,8 persen.

"Elektabilitas Emil sebagai Cawagub Jatim jauh meninggalkan nama lain yakni 35,8 persen. Kemudian disusul Eri Cahyadi 15,7 persen, Puti Guntur 7,3 persen, Anwar Sadad 6,8 persen. Nama-nama lain angkanya di bawah 5 persen," jelasnya.

Tak hanya itu, Mochtar menyebut, jika Khofifah tetap maju di Pilgub Jatim, maka pasangan paling potensial yang bisa digandeng ialah Emil Dardak.

"Jika Khofifah belum declare di Pilpres, kita prediksi angkanya sulit dua digit karena belum declare. Jika sudah declare dan melakukan langkah kongkret, bisa jadi naik dalam konteks Jatim. Kalau berhasrat jangan sampai terlambat, daripada ketinggalan kereta," jelasnya.

"Kalau di Pilgub, dari data bisa dibaca bagaimanapun per hari ini kalau Khofifah-Emil berpasangan dalam hitungan sederhana melihat elektabilitas keduanya digabung memang tertinggi. Bahwa komposisi Khofifah-Emil paling potensial, iya. Tapi hasil pilpres juga sangat menentukan pilgub ini," pungkasnya.•

PENANTANG BAYANGI PETAHANA DI JAMBI

Gubernur Jambi petahana, Al Haris, diprediksi tetap diunggulkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan siap meraih kemenangan jika mencalonkan diri untuk periode kedua masa jabatannya.

Meski begitu, Al Haris belum mau buka-bukaan mengenai langkahnya di Pilkada 2024. Dia lebih memilih fokus dulu mengurus masyarakat ketimbang mengumbar rencananya maju di periode kedua.

"Saya enggak ada sosialisasi, jangan kita sibuk kampanye-kampanye, biarkan kita fokus dulu urusin rakyat dan urusan yang lain biarkan masyarakat menilainya," kata Al Haris.

Meski Al Haris merupakan calon petahana yang menjadi primadona di Pilgub Jambi 2024 nanti, namun dia tak mau lebih mengarah urusan Pilkada lantaran fokus tujuannya bekerja.

Al Haris juga tak menapik jika nanti di Pilgub Jambi 2024 akan banyak kemungkinan yang terjadi soal partai pengusung. Namun, kini dia tak mau dikaitkan dulu ke urusan Pilgub Jambi.

"Ya apapun itu semua sangat memungkinkan ya, semua sangat memungkinkan tinggal lagi semua proses kita ikuti, itu," ucap Al Haris.

Analis Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin, mengatakan, Al Haris merupakan sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat Jambi untuk kembali melanjutkan masa kerjanya.

"Walau masih bisa terjadi beberapa dinamika yang kemudian mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang, tetapi sampai hari ini, saya masih berkeyakinan Al haris bakal memenangkan Pilgub Jambi 2024 untuk dua periodenya," kata Pahrudin, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Pahrudin mengatakan, dalam Pilgub Jambi 2024 nanti, ada empat nama yang punya peluang besar untuk maju. Keempat nama itu mulai dari Al Haris sebagai petahana, Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Bupati Tanjabtim Romi Hariyanto, serta Bupati Bungo Mashuri.

Walau dari empat nama itu punya peluang maju, hanya saja, nama Al Haris masih sangat teratas mengungguli beberapa kandidat tersebut.

"Nah di antara empat kandidat ini, ada yang paling teratas tentu saja secara apapun lah, baik dari elektabilitas atau apapun itu jelas petahana yakni Al Haris, lalu ada Fasha kemudian Romi selanjutnya Mashuri," ujar Pahrudin.

Meski sangat masih jauh terlaksana, akan tetapi secara politis, Pahrudin menilai persoalan Pilgub Jambi 2024 tentunya sudah sangat dekat untuk dibahas.

"Kalau kita lihat bagaimana sih kontestasi menuju Pilgub Jambi ini? Saya prediksi yang akan ikut itu terdiri dari tiga pasang atau tiga kandidat ya," sebut Pahrudin.

Dia juga menyebutkan dari ketiga calon yang akan maju nanti di Pilgub Jambi, Pahrudin mengaku bahwa nama Al Haris yang dianggap paling populer dan punya elektabilitas tinggi oleh masyarakat Jambi.

"Ya bagaimana pun Al Haris ini dari tiga nama itu dia yang paling Primadona ya, karena hampir semuanya ya diinginkan dari seorang pemimpin apalagi dalam konteks gubernur Jambi dimiliki oleh beliau, tinggal nanti bagaimana beliau mengolahnya dan menatanya secara baik lagi untuk tim kerjanya itu," terang Pahrudin.

Tidak hanya itu, sejauh ini, dia juga menyebutkan bahwa Al Haris punya tingkat elektabilitas dan popularitas cagub yang tinggi dari pasangan mana pun yang bakal maju.

"Al Haris popularitas paling tinggi, lalu akseptabilitasnya juga lebih unggul dibandingkan yang lain. Apalagi kemudian ada pula elektabilitasnya ya. Kalau dibandingkan atau dinilai dari nama yang maju itu, tentu saja Al Haris masih memilik peluang yang sangat besar dibandingkan yang

lain," ucap Fahrudin

"Namun ingat, meskipun begitu tentu saja politik sangat dinamis ya, bisa saja terjadi beberapa dinamika yang kemudian mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang," lanjut dia.

Antusiasme terhadap Pilgub Jambi semakin meningkat seiring dengan dirilisnya hasil survei elektabilitas kandidat calon gubernur untuk Pilgub Jambi 2024 oleh Lembaga survei Sigma Idea Indonesia. Dalam hasil survei ini, ketiga nama yang telah disebutkan sebelumnya bersaing dalam hal elektabilitas dan popularitas.

Sementara itu dari hasil survei dari Sigma Idea Indonesia mengidentifikasi tiga tokoh sebagai potensial calon Gubernur Jambi 2024. Ketiga tokoh tersebut adalah Al Haris, Romi Hariyanto dan Syarif Fasha.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Al Haris mendominasi dalam hal elektabilitas dengan persentase sebesar 23,6 persen. Diikuti oleh Romi Hariyanto dengan persentase 15,0 persen, dan Syarif Fasha dengan persentase 13,5 persen.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin (UIN STS) Jambi, Masiyan M Syam, menyatakan, hasil survei ini mencerminkan bahwa Romi Hariyanto mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat.

Ia berpendapat bahwa adanya alternatif kandidat merupakan hal baik. Menurutnya yang penting adalah bagaimana kandidat-kandidat tersebut mampu menawarkan solusi-solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

"Demokrasi akan lebih bermakna jika diisi oleh individu-individu yang baik, yang benar-benar mewakili keinginan masyarakat dan berkomitmen untuk melayani rakyat," bebernya.

Pengamat politik dari Universitas Jambi, Dori Effendi, menambahkan, berdasarkan hasil survei, ketiga tokoh tersebut dinilai layak oleh masyarakat untuk menjadi gubernur.

Ia mengungkapkan bahwa Al Haris memiliki kekuatan dari segi pengaruhnya sebagai gubernur saat ini, serta memiliki dukungan kuat di wilayah Jambi Barat. Romi Hariyanto memiliki kekuatan di wilayah Jambi Timur dan sebagai bupati Tanjung Jabung Timur sampai 2024. Sedangkan, Syarif Fasha memiliki dukungan dari Partai NasDem dan basis massa yang luas.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Lembaga Kajian Politik Regional (LKPR) juga merilis tingkat elektabilitas calon gubernur Jambi, di mana Al Haris tetap berada di posisi teratas. Selain elektabilitas, LKPR juga merilis hasil survei untuk popularitas dan akseptabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jambi.

Dalam survei elektabilitas, Al Haris berada di puncak dengan 22,67 persen. Posisi kedua ditempati Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto 15,50 persen. Lalu, Wali Kota Jambi Syarif Fasha dengan 12,33 persen, Bupati Bungo Mashuri 9,50 persen, Bupati Batanghari Fadhil Arief 6,33 persen, dan Bupati Kerinci Adirozal 3,50 persen.

Pada survei popularitas, Al Haris meraih 89,17 persen. Posisi kedua Romi Hariyanto dengan 75,33 persen. Selanjutnya Syarif Fasha 62,50 persen, Mashuri 42,83 persen, Fadhil Arief 39,67 persen, dan Adirozal 30,50 persen.

Pada survei akseptabilitas atau penerimaan, Al Haris tetap di urutan pertama dengan 47,33 persen. Lalu diikuti Romi Hariyanto 42,50 persen, Syarif Fasha 39,17 persen, Mashuri 26,67 persen, Fadhil Arief 21,50 persen, dan Adirozal 15,33 persen.

Direktur LKPR, Noviardi Ferzi, mengatakan, tingkat popularitas dari para kandidat cenderung naik.

"Adirozal popularitasnya di wilayah Kerinci-Sungai Penuh. Ada peningkatan Mashuri karena dia ketua partai, juga Fadhil Arief faktor juga ketua partai. Jadi popularitas itu meningkat," ungkap Noviardi.

Sementara, untuk Al Haris sudah tentu tinggi karena jabatannya sebagai Gubernur Jambi. Untuk Romi Hariyanto dan Syarif Fasha juga naik dikarenakan faktor penyebaran baliho dan alat peraga yang sudah dipasang dimana-mana.•

PETAHANA MASIH PUNYA PELUANG TOLAK NYALEG DEMI NYAGUB

Peta politik jelang Pemilihan Gubernur Bengkulu 2024 menjadi semakin dinamis dengan munculnya sejumlah tokoh yang mendeklarasikan pencalonan mereka. Namun, yang masih menggantung adalah kelanjutan karir politik sang petahana, Rohidin Mersyah.

Diketahui Rohidin Mersyah masih mempunyai peluang untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Bengkulu pada 2024. Hal ini dikarenakan masa jabatannya sebagai gubernur Bengkulu definitif pada periode 2016-2021 kurang dari 2 tahun 6 bulan, sehingga dihitung sebagai satu periode.

Juru Bicara Rohidin Mersyah, Zulkarnain Kaka Jodho, mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai rencana kelanjutan karir politik Rohidin Mersyah.

Zulkarnain menegaskan, saat ini, Rohidin masih sepenuhnya fokus pada penyelesaian masalah-masalah dan pembangunan Bengkulu.

"Sampai sekarang Pak Gubernur belum mempertimbangkan untuk maju kembali. Beliau masih berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan melanjutkan pembangunan Bengkulu yang masih tersisa hingga akhir tahun ini," ungkapnya belum lama ini.

Di sisi lain, Rohidin Mersyah telah menyatakan tidak ingin melirik Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Saat ini, dia masih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan daerah.

"Saya kalau Pileg sudah dipastikan enggak, kalau pilkada, jawaban politik saya masih lihat situasi. Karena bagi saya, pimpinan di daerah itu potensi orang lain juga banyak, " kata Rohidin.

Saat dikonfirmasi mengenai rencananya untuk kembali maju di Pilgub 2024, Rohidin enggan berkomentar banyak. Namun, satu hal yang dipastikan oleh politisi Golkar ini adalah dirinya tidak akan maju sebagai calon anggota legislative (caleg).

"Jawaban politik saya masih lihat situasi nanti. Saya juga sudah mencoba menduduki jabatan gubernur dan menunjukkan karya dan kemampuan saya sudah terukur. Nanti saya akan lihat, kalau Pileg sudah pasti tidak," jelas dia.

Tidak hanya itu, Rohidin Mersyah menyoroti potensi kerja sama antara partai politik dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mungkin akan berlanjut ke Pilkada Serentak 2024.

Kemungkinan adanya kolaborasi antara Rohidin dan Helmi dalam konteks ini tampaknya dapat terjadi setelah DPP Golkar dan PAN secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Menurut Rohidin Mersyah, peluang ini sangat besar, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Bahkan, peluang ini tetap besar, bahkan untuk partai-partai yang belum berkoalisi, terutama jika mereka sudah bersatu dalam DPP.

"Oh sangat besar, besar kemungkinan (Golkar Bengkulu bergabung dengan parpol di KKIR) pada pemilihan kepala daerah, bahkan dengan yang belum berkoalisi pun untuk bersatu itu sama besarnya juga, apalagi sudah berkoalisi di DPP," kata Rohidin Mersyah.

Dia juga menegaskan, komunikasi yang lebih baik antara partai politik dalam koalisi tersebut akan menjadi potensi besar ketika mereka melanjutkan kerja sama dalam Pilkada. Termasuk kemungkinan Golkar bermitra dengan PAN dalam Pilkada Bengkulu 2024.

"Semua kemungkinan itu dapat terjadi.

Di dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin, tinggal tergantung situasi terakhir dan formulasi yang terbaik," kata dia.

Saat ini, Rohidin Mersyah menjabat sebagai Gubernur Bengkulu dan kemungkinan besar akan menjadi pasangan Helmi Hasan, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu selama dua periode pada Pilgub Bengkulu 2024.

Rohidin menyatakan, semua kemungkinan ini bisa terjadi dalam politik, dan keputusan akhir akan bergantung pada situasi terakhir dan formulasi terbaik yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa Rohidin Mersyah dan Helmi Hasan sebelumnya bersaing dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu pada 2020. Saat itu, Rohidin berpasangan dengan Rosjonsyah, sementara Helmi Hasan berpasangan dengan almarhum Muslihan DS.

Sementara, Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, belum memutuskan apakah dia akan mencalonkan diri dalam Pilgub Bengkulu 2024 atau tidak. Meski begitu, Helmi menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pilgub Bengkulu jika masyarakat memilihnya sebagai kandidat.

Mengenai kemungkinan pencalonannya sebagai gubernur, Helmi mengisyaratkan bersedia bertarung dalam kontestasi tersebut dengan syarat bahwa ada permintaan dan dukungan kuat dari masyarakat.

"Keputusan untuk ikut atau tidak dalam Pilgub mendatang bergantung pada keinginan masyarakat. Jika masyarakat meminta dan mencalonkan, saya akan siap," ujarnya.

Helmi menjelaskan, dalam Pemilu ini, PAN berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Bengkulu.

Salah satu komitmen tersebut adalah memastikan perbaikan jalan-jalan di Bengkulu, sehingga tidak ada lagi jalan rusak seperti kubangan kerbau. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menyediakan layanan ambulance gratis dan memberikan bantuan kepada anak-anak yatim.

"Saya memberikan satu syarat kepada masyarakat Bengkulu jika mereka ingin melihat saya maju sebagai calon gubernur pada Pilgub 2024 nanti. Salah satunya adalah PAN harus meraih kemenangan dalam Pemilu 2024 dan memperoleh setidaknya 7 kursi serta memimpin di DPRD," jelas Helmi.

Sementara itu, Partai Gerindra juga sudah menyiapkan nama calon gubernur Bengkulu meskipun Pilkada baru akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua DPD Partai Gerindra Bengkulu, Suharto, mengatakan, sama seperti partai politik lainnya, pihaknya sebenarnya belum mengambil sikap untuk Pilgub Bengkulu 2024. Namun, Partai Gerindra telah mengatur sejumlah strategi berkaitan dengan Pilgub yang akan diselenggarakan setelah pemilu dan pilpres berlangsung.

Secara gamblang, Suharto mengatakan, strategi itu belum dapat disampaikan ke publik. "Untuk Pilgub kita bicarakan setelah Pileg dan Pilpres dulu. Setelah Pilpres dan Prabowo jadi presiden, maka kita akan lakukan starteginya," ujarnya.

Dia juga tak menampik sudah ada nama-nama yang dikantongi Partai Gerindra untuk menghadapi Pilgub Bengkulu 2024. Nama-nama itu juga berasal dari kader-kader terbaik Partai Gerindra yang dimiliki saat ini.

"Kami sudah mengantongi nama-nama calon dan sudah pasti itu salah satunya dari kader kita," terangnya.

Senada dengan Suharto, Ketua DPW Partai Nasdem Bengkulu, Fery Ramli, mengatakan, pihaknya masih fokus untuk menghadapi Pileg 2024. Apalagi, pihaknya akan menargetkan 7 kursi di DPRD.

"Masalah pilkada kita belum terpikir sejauh itu dan kita juga belum menerima arahan dari DPP Partai Nasdem. Tentunya kami fokus bagaimana caranya Partai Nasdem bisa mewakili Bengkulu untuk duduk di DPR, sehingga ke depan bisa ada perwakilan dari Bengkulu," kata Ferry.●

TOKOH BESAR BEREBUT KURSI RIAU-1

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mencuatkan nama Gubernur Riau Syamsuar sebagai petahana yang secara tegas diusung oleh Partai Golkar Riau dan akan berpasangan dengan Wardan.

Namun, ada beberapa tokoh yang juga diusung untuk maju dalam Pilkada Riau 2024 dan menjadi lawan Syamsuar. Mereka di antaranya Agung Nugroho, Achmad, M Nasir, dan Bupati Bengkalis, Kasmarni.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Riau Bidang Pemenangan Pemilu, Ikhsan, menjelaskan, usulan ini diajukan dengan asumsi partai beringin dapat mengusung kader sendiri dalam Pilkada 2024 karena memiliki 14 kursi di DPRD Riau.

"Jika Partai Golkar dapat mengusung kader sendiri dan meraih kemenangan dalam Pileg 2024 nanti, tentu kami berharap dapat mendukung kader-kader kami. Saat ini, kami fokus pada persiapan untuk Pileg 2024," ujar Ikhsan.

Ikhsan menjelaskan, usulan ini juga merupakan respons terhadap dorongan dan masukan dari kader-kader di bawahnya, terutama terkait dengan kemungkinan menggandeng Syamsuar dengan kader Partai Golkar dalam Pilkada 2024. Oleh karena itu, Wardan diusulkan sebagai calon wakil gubernur.

"Usulan yang kami ajukan masih dalam tahap survei dan identifikasi terhadap kader-kader Golkar yang memiliki potensi untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah di masa mendatang," tambahnya.

Meskipun Partai Golkar telah mencalonkan Syamsuar dan Wardan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Riau pada Pilkada 2024, ada satu nama kader yang tidak boleh diabaikan, yaitu Septina Primawati Rusli.

Septina Primawati Rusli adalah istri dari mantan politisi Partai Golkar dan mantan Gubernur Riau selama dua periode, Rusli Zainal. Perempuan ini juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Riau.

Pengamat komunikasi politik, Aidil Haris, menyebut, Septina Primawati Rusli tidak boleh dilewatkan dalam Pilkada 2024. Meskipun Partai Golkar Riau terus mengusung Syamsuar menduduki jabatan tersebut untuk periode kedua.

"Saya melihat Golkar kehilangan banyak tokoh, namun saat ini, jika ingin bersaing, Septina adalah kandidat yang paling berpotensi," ujar Aidil.

Septina, anak dari tokoh Riau, Ismail Suko, dianggap layak untuk dipertimbangkan, bukan hanya karena hubungannya dengan suaminya, Rusli Zainal, tetapi juga karena dia telah menarik perhatian Ketua DPW PPP Riau, Syamsurizal, untuk menjadi pasangannya dalam Pilgub Riau tahun depan.

"Ini sangat menarik, terutama ketika ada minat dari Syamsurizal. Semua bisa terjadi, tidak bisa diabaikan," tambah Aidil.

Meski demikian, Aidil juga

mengatakan bahwa Septina Primawati Rusli mungkin tidak akan dipilih oleh Partai Golkar sebagai calon gubernur, tetapi dia berpotensi untuk pindah ke partai lain.

"Namun, tidak menutup kemungkinan jika dia berhasil nanti, dia akan kembali ke Partai Golkar," katanya.

Sedangkan, Partai Demokrat ikut mengambil langkah pencalonan kader dalam posisi gubernur Riau 2024.

Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Agung Nugroho, menyatakan optimisme partai berlambang mercy dalam persiapan untuk berkompetisi dan memenangkan Pilgub Riau 2024.

"Insya Allah, Demokrat Riau akan mengusung kader internal untuk Pemilihan Gubernur Riau 2024," ujar Agung.

Dalam survei internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat, terdapat tiga nama kader yang masuk dalam pertimbangan untuk diusung sebagai calon gubernur. Ketiga kandidat tersebut adalah Agung Nugroho, Achmad, dan M Nasir.

Agung menjelaskan, saat ini partai sedang mengevaluasi potensi dari masing-masing kandidat sebelum mereka membuat keputusan akhir.

"Ada tiga nama yang masuk dalam survei pemilihan gubernur, yaitu saya sendiri, Agung Nugroho, Achmad, mantan Bupati Rokan Hulu yang juga anggota DPR, dan M Nasir yang juga anggota DPR. Semua memiliki potensi yang baik," ungkap Agung.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat Riau akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat.

"Nanti akan ditentukan oleh Ketua Umum dengan salah satu faktor pertimbangan adalah hasil survei internal," tambah Agung.

Selain keempat tokoh yang disebutkan sebelumnya, saat ini nama Bupati Bengkalis, Kasmarni, juga tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sebagai kandidat potensial yang dapat diusung dalam Pilgub Riau 2024.

Seniman, budayawan, dan politisi senior Riau, Akhmad RM, mengungkapkan, Kasmarni merupakan kandidat yang pantas dipertimbangkan dan memiliki potensi untuk menjadi calon gubernur Riau.

"Selama kepemimpinannya di Bengkalis, dia telah berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik, tidak menimbulkan masalah atau gejolak seperti yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya," ujar Akhmad.

Mantan Ketua Umum Dewan Kesenian Riau (DKR) ini juga menyarankan, agar Kasmarni mencari calon wakil gubernur dari daerah Riau daratan, seperti Indragiri, Pekanbaru, Kampar, dan wilayah lainnya.

"Sebagai saran dari saya, wakil gubernur yang dapat dipertimbangkan berasal dari daerah Riau daratan, seperti Indragiri Hilir atau Kampar, yang memiliki dukungan pemilih terbanyak kedua dan ketiga di Provinsi Riau," ujarnya.

Nama mantan Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, juga muncul sebagai salah satu bakal calon gubernur Riau di Pilkada 2024.

Meski belum ada pernyataan langsung dari Gatot, namun namanya makin disebut-sebut seiring gencarnya isu mengenai seorang jenderal bintang tiga yang akan maju di Pilgub Riau.

Sebelumnya, mantan gubernur Riau Annas Maamun juga sempat menyinggung soal posisi Riau Satu. Ia yang sudah lama mengaku akan kembali mencoba peruntungan di Pilgub Riau mengatakan tak gentar walau harus bersaing dengan nama-nama besar.

Diketahui, Gatot memang merupakan putra daerah Riau yang berasal dari Pekanbaru. Meski lahir di Solok, Sumatera Barat, tapi Gatot menghabiskan masa kecil hingga jelang dewasanya di Kota Pekanbaru. Sejak umur 6 tahun Gatot dibawa merantau ke Pekanbaru mengikuti kepindahan orangtuanya yang juga mengabdi sebagai polisi.

Ia mengenyam pendidikan mulai SD hingga SMA di Kota Bertuah. Gatot merupakan alumni SMA Negeri 1 Pekanbaru. Setamatnya dari SMA pada 1984, Gatot mendaftar masuk Akademi Kepolisian (Akpol). Hanya dua orang perwakilan Riau yang lulus saat itu, termasuk Gatot.

Gatot menjadi Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta sejak Desember 2019 dan masih aktif menjadi Koordinator Alumni SMA 1 Pekanbaru untuk Jakarta. Ia juga pernah menjadi Ketua Ikatan Alumni SMA 1 (Ikasmansa) Pekanbaru.

Dalam karirnya, Gatot pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan terakhir sebagai Wakapolri. Ia telah resmi pensiun sejak 28 Juni 2023 dalam usia 58 tahun.•

FITRIANTI TERPOPULER DI TEPIAN MUSI

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, akan segera mengakhiri masa jabatannya setelah memimpin selama satu dekade. Setahun jelang Pemilihan Wali Kota Palembang, sejumlah nama potensial muncul sebagai calon pengganti Harnojoyo.

Beberapa nama memiliki peluang besar untuk maju sebagai calon wali kota Palembang. Mereka di antaranya Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda; Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa; Mantan Sekretaris Daerah Sumsel, Nasrun Umar; Kepala Dinas PU Perkim Sumsel, Basyaruddin Ahmad; serta Charma Afrianto dan Akbar Alfaro.

Keenam kandidat calon wali kota Palembang ini memiliki elektabilitas yang semakin tinggi. Tapi siapa yang paling kuat untuk menggantikan posisi Harnojoyo?

Meskipun belum secara resmi mengumumkan pencalonannya, Fitrianti Agustinda atau yang akrab dipanggil Finda dipercaya akan ikut dalam Pilwako Palembang 2024.

Jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Palembang saat ini dianggap strategis untuk melanjutkan kepemimpinan Harnojoyo. Selain itu, Finda juga menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Palembang, sehingga memiliki modal sebagai ketua partai untuk mencalonkan diri. Dia terlihat aktif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan berinteraksi dengan masyarakat Palembang secara rutin.

"Doakan saja yang terbaik. Jika memang masyarakat Palembang menginginkan saya untuk maju dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar sebagai wali kota, tentu ini adalah amanah yang harus saya jalankan," ungkapnya.

Hasil survei yang dilakukan oleh Politika Institute yang berjudul "Preferensi Pemilih Calon Wali Kota Palembang 2024" menempatkan nama Fitrianti Agustinda sebagai yang paling populer dengan tingkat popularitas mencapai 91 persen dan tingkat akseptabilitas sebesar 86 persen.

"Tidak ada manusia yang sempurna,"sambungnya.

Finda berjanji jika diberi kesempatan untuk menjadi Wali Kota Palembang di masa depan, ia akan menjalankan tugas tersebut dengan lebih baik. Ia juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang saat ini tengah ditekuninya, termasuk program kesehatan untuk menurunkan angka stunting dari 1.000 menjadi 490.

"Saya akan menjalankan tugas apapun yang diamanahkan dengan baik, termasuk melanjutkan program-program yang telah berjalan. Siapa-

pun yang terpilih sebagai pemimpin nanti akan tetap mendapatkan dukungan kami untuk kemajuan Kota Palembang," tegasnya.

Di sisi lain, Ratu Dewa yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palembang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Palembang. Hasil survei menunjukkan, Ratu Dewa memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon wali kota. Namun, Dewa masih fokus pada tugasnya sebagai Sekda.

Meski begitu, Ratu Dewa belum mengakui secara terang-terangan bakal maju Pilkada Palembang.

"Saat ini kita masih memilih untuk fokus bekerja,"ulasnya.

Sementara, mantan Sekda Sumsel, Nasrun Umar, telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilwako Palembang. Spanduk kampanyenya bahkan sudah tersebar luas di Kota Palembang.

Pengalaman Nasrun sebagai Sekda Sumsel dan Penjabat Bupati Muara Enim dianggap sebagai modal yang cukup untuk bersaing dengan calon lainnya dalam Pilwako Palembang.

"Saya selalu hidup dalam keoptimisan yang tinggi, tapi tetap bertawadhu kepada Allah SWT," kata Nasrun Umar.

Calon kuat lainnya ada Basyaruddin Ahmad yang kini menjabat Kepala Dinas PU Perkim Sumsel.

Namanya bahkan sudah muncul dalam survei sebagai calon wali kota Palembang. Dia telah melakukan kampanye dengan memasang spanduk di berbagai sudut Kota Palembang.

Basyaruddin menegaskan pentingnya tindakan nyata dalam bekerja daripada sekadar kata-kata. Dia menyatakan rencana-rencana yang dibuat harus diwujudkan secara konkret.

Sebagai contoh, jika ia berbicara tentang Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat, maka hal tersebut harus benar-benar direalisasikan. Selain itu, stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring juga harus menjadi kenyataan, bukan hanya berupa wacana.

"Kemenangan dalam kontestasi politik ini akan tergantung pada strategi yang tepat, bukan hanya berdasarkan jumlah massa pendukung," jelasnya.

Visi dan misi Basyaruddin adalah menjadikan Palembang sebagai kota yang maju, modern, dan bermartabat. Dia juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh paguyuban, serta individu yang pernah berperan dalam pembangunan Kota Palembang.

Selanjutnya, Charma Afrianto telah menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilwako Palembang dan telah mengusulkan sejumlah program, seperti sekolah dan berobat gratis, serta peningkatan warung rumah di Kota Palembang.

"Saya akan mewujudkan program-program bukan hanya slogan," tegasnya.

Charma mengaku tujuannya mencalonkan diri menjadi wali Kota Palembang tidak berharap kekuasaan, melainkan untuk sosial.

"Perubahan total Kota Palembang," kata dia.

Nama yang juga populer adalah anggota DPRD Palembang, Akbar Alfaro, yang tampaknya juga akan maju kembali dalam Pilkada Palembang.

"Kalau terkait peluang maju bisa apa tidak, itu kehendak Allah dan kami hanya menjalankan. Kalaupun Allah menghendaki, saya harus realistis dengan keadaan saat ini. Namun, kami yakin dan optimis segala kemungkinan bisa terjadi," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin, juga menyatakan siap maju menjadi bakal calon Wali Kota Palembang pada Pilkada 2024. Namun, dia belum menentukan pasangannya.

"Insya Allah di tahun 2024 nanti kalau persyaratannya cukup, kondisinya memungkinkan akan mencalonkan jadi Wali Kota Palembang," kata Yudha.

Yudha mengatakan ada dua alasan dirinya maju pada Pilkada 2024. Pertama formal dan kedua personal. Secara formal, dirinya melihat Palembang memang kota maju, tetapi banyak hal yang masih bisa dikembangkan lebih hebat, besar, dan lebih jauh lagi.

"Artinya ruang untuk pengembangan itu sangat terbuka untuk kota sebesar Palembang ini. Bisa dikatakan Kota Palembang tertua di Indonesia, tetapi untuk manifestasinya di lapangan sepertinya kita agak masih kalah dengan kota-kota lain lebih junior dari kita," ujar putra mantan Gubernur Sumsel Prof Mahyudin ini.

"Ini harus kita kejar, karena kita ada potensi itu, karena memang dari dulu di sini (Palembang) pusatnya Kerajaan Sriwijaya yang menguasai tidak hanya Indonesia, tapi juga sampai dengan luar negeri. Kita kembalikanlah," sambungnya.

Yudha menambahkan, alasan personalnya maju pada Pilkada 2024 mendatang adalah karena ingin berbuat baik.

"Ya saya melihat menjadi seorang wali kota ini sebuah tools, kita ingin berbuat yang lebih baik, lebih besar lagi dengan kemampuan dan dengan portofolio yang sudah kita miliki saat ini," ungkap Yudha.

Meskipun sudah menyatakan sikap untuk maju calon Wali Kota Palembang, Yudha belum menentukan siapa pasangannya nanti. Sebab, ia masih menunggu dari hasil pemilihan legislatif dan presiden.

"Untuk pasangan belum memutuskan karena pileg lebih duluan di Februari 2024, sedangkan di Pilkada berada di November 2024," ujarnya.

Bukan itu saja, Yudha juga masih menunggu perolehan kursi-kursi partai, dan apakah kembali terjadi koalisi-koalisi.

"Jadi kita lihat berapa jumlah kursi parta-partai yang dapatkan, kemudian koalisi-koalisi seperti apa yang terjadi karena persyaratan untuk mencalonkan diri itu 20 persen dari jumlah kursi di DPRD sesuai dengan tempatnya masing-masing. Masih menunggu (pasangan), tapi kita sudah meniatkan diri Insya Allah mencalonkan diri di 2024 mendatang," ungkapnya.●

CARUT MARUT PALEMBANG DI AKHIR MASA JABATAN

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan wilayah Pasar 16 Ilir, Palembang, masih menimbulkan polemik dan terkesan dibiarkan. Selain menimbulkan kesemrawutan, kepastian PKL untuk berjualan di lokasi itu juga tidak ada jaminan sampai kapan mereka dipertahankan.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, puluhan PKL di sekitar gedung Pasar 16 Ilir ditertibkan Pemkot Palembang melalui petigas Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban itu membuat PKL kehilangan pekerjaan hingga akhirnya melakukan demo di DPRD Kota Palembang untuk meminta perlindungan.

Penertiban itu juga terkesan setengah hati. Pemkot Palembang yang awalnya terlihat tegas, akhirnya tidak bisa berbuat banyak, karena solusi yang mereka tawarkan malah merugikan PKL.

Imbasnya, Pasar 16 Ilir terkesan semrawut. PKL yang awalnya tertib, kini malah berjualan di tengah jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Di sisi lain, pembangunan renovasi Pasar 16 Ilir juga menjadi terhambat akibat terganggunya arus lalu lintas.

Pemandangan transaksi jual beli masih berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Langkah yang diambil oleh pemerintah dan pengelola seperti gertak sambal, karena kebijakan tersebut seperti tidak berlaku dan berpengaruh terhadap PKL.

Bahkan, PKL yang berjualan terkesan senang karena di lapak baru yang mereka tempati diberikan secara cuma-cuma, tanpa ada pungutan. Regulasi dari pemerintah memberikan kemudahan karena para PKL dibebaskan iuran lapak untuk dua tahun ke depan. Pemkot Palembang juga terkesan lepas tangan dan membiarkan semua kesemrawutan berjalan tanpa ada penertiban.

Humas PT Bima Citra Realty (BCR) selaku pengelola Gedung Pasar 16 Ilir, Wahyudi, mengatakan, pihaknya tidak tahu soal kesemrawutan tersebut karena bukan merupakan tanggung jawab mereka.

"Kalau kapasitas kami hanya selaku pengelola, domain kami hanya peruntukkan pengelolaan gedung dan fokus bangunan. Permasalahan PKL yang sempat ditertibkan beberapa waktu yang lalu itu di luar tanggung jawab kami. Itu kewenangan pihak Perumda Pasar karena PKL yang berjualan di badan jalan dan jalan tersebut di bawah naungan Dinas Perhubungan," terang Wahyudi.

Dia menjelaskan, untuk saat ini, tahap pembangunan belum dimulai. Namun, tim teknis sudah memulai melakukan aktivitasnya, seperti pemasangan scaffolding, loading barang dan lainnya.

"Untuk target pekerjaan per lantai kami perkirakan memakan waktu selama 4-5 bulan. Untuk pembangunan pasar ini sendiri kami tidak mengelola dari pemerintah kota, sebagian anggaran didapatkan dari investor dan mengelolanya sendiri," terang Wahyudi.

Terkait adanya penertiban yang dilakukan Pemkot Palembang, Wahyudi mengakui sempat terjadi kegaduhan. Saat itu mereka juga melibatkan 470

personil, mulai dari Satpol PP hingga aparat kepolisian.

Menurut Yanto, salah satu pedagang minuman, sebelumnya mereka sempat berjualan di dekat gedung Pasar 16 Ilir. Namun, sejak penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, mereka terpaksa pindah dan berjualan di pelataran jalan.

"Untuk berjualan di sini kami tidak dipungut biaya alias gratis untuk dua tahun ke depan, namun kami tidak tahu apakah kami akan ditertibkan lagi apa tidak," terang Yanto.

Yanto mengatakan imbas dari penertiban tersebut, omzet dagangannya sangat jauh menurun. Sebab, saat ini sudah jarang orang untuk berbelanja ke pasar. Di sisi lain, mereka juga tidak tahu nasibnya ke depan apakah dibolehkan kembali berjualan di dekat gedung Pasar 16 Ilir atau tidak.

Dirut Perumda Palembang Jaya, Abdul Rizal, sebelumnya mengatakan Pasar 16 Ilir saat ini pengelolaannya bukan lagi dilakukan pihaknya, tapi sudah dikerjasamakan dengan PT Bima Citra Realty per 17 Mei 2023. Oleh sebab itu, semua urusan pedagang mulai dari sewa lapak, kios dan lainnya diserahkan langsung pada pengelola baru.

"Pasar 16 Ilir hanya direnovasi, bukan dibongkar dan dibangun ulang, jadi tidak akan sama kasusnya seperti Pasar Cinde," tegas Rizal.

Lalu, pengelolaan Pasar 16 Ilir yakni Kerja Sama Operasi (KSO) bukan Build Operate and Transfer (BOT). Itu merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian, didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah.

Berdasarkan kerja sama KSO yang disepakati Pemkot Palembang dengan PT Bima Citra Realty, Pasar 16 Ilir hanya akan diubah namanya menjadi The Heritage 16 Ilir.

Ketua Gerakan Cinta Rakyat (Gencar), Charma Afrianto, mengatakan, akibat penataan yang salah ini pedagang yang dirugikan. Menurutnya, baik pedagang kaki lima maupun pedagang resmi keduanya sama-sama bayar retribusi.

"Jadi kalau dibilang ini revitalisasi, arahnya bukan itu, tapi penggusuran tepatnya, akibat memaksakan KSO yang bekerja sama dengan pengelola Pasar 16 dari Perumda Pasar ke PT Bima Citra Ralty (BCR). Selama ini kami tahu yang mengelola itu PT Ganda Tahta Prima (GTP) kontrak dari 2016

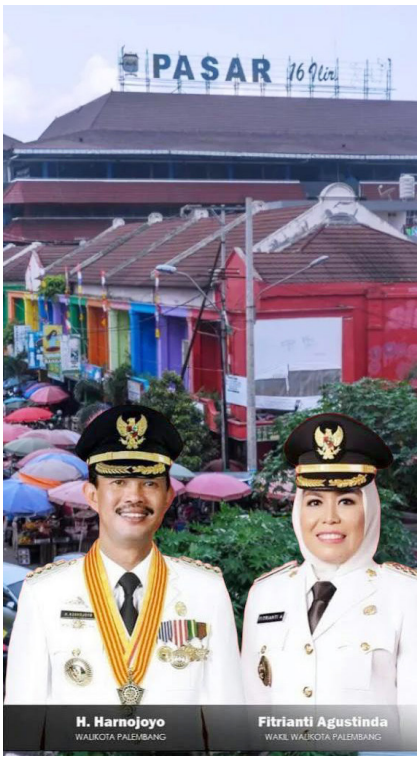

sampai 2023," terang Charma.

Charma mengatakan, revitalisasi ini sebenarnya bagus tetapi pelaksanaannya asal-asalan dan pemerintah seakan lepas tangan. Padahal, Pasar 16 Ilir adalah aset daerah dan wajib meminta persetujuan rakyat dulu. Sebab, pengelolaan aset daerah atau negara wajib meminta persetujuan rakyat melalui DPR.

"Namun dalam hal ini tidak ada. Kami diundang DPRD mempertanyakan mana KSO-nya, mana perjanjiannya, kami menjadi saksi hidup PT BCR tidak bisa menunjukan kerja sama, bahkan ada rekamannya, bahkan mereka baru akan membuat kerja sama," terangnya.

Dia menuturkan, pelaksanaan yang dimulai dari Januari, akad kerjasama nya belum ada, apalagi persetujuan DPRD. "Seharusnya, ada pansus dulu, paripurna, baru ada perda yang menyetujui peralihan kerja sama ini di Januari 2023," sambungnya.

Dia mengatakan, yang dipakai saat ini adalah Perda 1/2021, di mana dalam beleid itu banyak hal yang ditabrak, termasuk UU 1/2004. Adapun perda itu ditandatangani oleh Wali Kota Palembang, Harnojoyo, dan menabrak peraturan Kemendagri.

"Saya meminta kepada Wali Kota Palembang dengan tegas, bahkan saya sudah laporkan wali kota ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membubarkan Perumda Pasar. Kalau tidak mampu mengelola atau merombak PD Pasar, ganti semua orang yang tidak mampu mengelola. Masih banyak putra daerah yang mampu mengelola Perumda Pasar ini dengan baik. Pedagang dapat penghasilan, pemerintah dapat pajak dari retribusi, karena ini harus dikelola dengan baik," tegasnya.●

PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR SARAT KEPENTINGAN POLITIK

Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2023 telah menunjuk sepuluh penjabat gubernur melalui sidang tim penilai akhir (TPA). Sembilan penjabat gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Sementara, satu penjabat gubernur lainnya baru akan dilantik pada 19 September 2023. Para penjabat gubernur itu akan menjabat paling lama setahun dan bisa diperpanjang hingga terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Kesembilan penjabat gubernur yang sudah dilantik adalah Mayor Jenderal (Purn) Hasanuddin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Hasanuddin adalah mantan Pangdam Bukit Barisan periode 2021-2022. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.

Selain itu, ada Bey Triadi Machmudin, yang menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Bey sebelumnya menjabat sebagai Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Ada pula Komisaris Jenderal (Purn) Nana Sud-

jana sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah. Nana merupakan mantan Kapolda Metro Jaya. Lulusan Akpol 1998 itu juga pernah bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Adapun, Penjabat Gubernur Bali, Inspektur Jenderal (Purn) Sang Made Mahendra, merupakan purnawirawan Polri yang juga pernah menjabat sebagai staf khusus Mendagri. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal (Purn) Andap Budhi Revianto, juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Tenggara yang sejak Maret 2021 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tiga penjabat lainnya yang berasal dari birokrat sipil adalah Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhia Kalake, yang sejak 2022 menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Selain itu, ada Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Lalu, Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, yang menjabat Sekretaris Daerah Papua.

Sementara, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Gita Ariadi, baru akan dilantik pada 19 September 2023. Sebab, masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah berakhir pada tanggal tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pelantikan sembilan penjabat gubernur telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagi yang berlatar belakang purnawirawan TNI/Polri.

"Ada empat yang latar belakangnya dari TNI dan Polri, tapi mereka sudah pensiun. SK pemberhentiannya juga ada, semua lengkap administrasinya, jadi kita mengacu pada aturan hukum yang berlaku," kata Mendagri.

Mendagri mengatakan, keempat nama purnawirawan TNI/Polri tersebut sebelumnya telah beralih menjadi aparatur sipil negara di sejumlah kementerian/lembaga. "Tadi, yang empat tadi semuanya sudah purnawirawan, dan tidak dilarang mereka untuk menjadi aparatur sipil negara. Setelah mereka menjabat aparatur sipil negara, Eselon I struktural misalnya, staf ahli menteri itu adalah eselon I struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi penjabat gubernur," jelas mendagri.

Mendagri menjelaskan, UU 10/2016 tentang Pilkada sudah mengatur tentang pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut. Dalam UU Pilkada itu disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

"Kami memahami semangat daripada reformasi, demokratisasi, yang berorientasi penekanan kepada civilization, yaitu mensipilkan, pemerintahan sipil ya. Maka, kalau dari TNI dan Polri ingin menjadi penjabat, mereka harus berada pada posisi sudah purnawirawan, pensiun, setelah itu boleh masuk ke instansi sipil," terangnya.

Mendagri juga meminta sembilan penjabat gubernur yang baru dilantik bersikap netral. Mendagri melarang penjabat gubernur yang merupakan ASN terlibat dalam politik praktis.

"Tapi (terlibatlah dalam) politik negara untuk membangun daerah masing-masing, itu menjadi beban yang terpenting," tegas Mendagri.

Mendagri mengatakan, tujuan adanya penjabat kepala daerah adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan di daerah yang bersangkutan tetap berjalan. Kinerja penjabat kepala daerah bakal diawasi oleh banyak pihak. Kemendagri juga secara rutin mengevaluasi kinerja mereka.

Dia menegaskan, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi kepada penjabat kepala daerah yang terbukti tidak netral. Mendagri juga berpesan kepada para penjabat gubernur agar memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh negara, terutama presiden, ini dengan baik.

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk mendukung para penjabat gubernur tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Para penjabat gubernur juga diminta agar banyak meminta masukan kepada kepala daerah sebelumnya. Berbagai program yang positif agar diteruskan dan yang dinilai kurang agar dilakukan perbaikan. "Dan terus membangun hubungan dengan pejabat yang lama," tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengucapkan terima kasih atas berbagai kinerja yang telah dilakukan oleh kepala daerah yang kini habis masa jabatannya.

"Saya doakan semoga tetap husnul khotimah, yang paling utama tidak ada masalah di belakang hari, semua bisa selesai dengan baik, membawa nama yang baik, dan terima kasih banyak atas segala jerih payah, kerja keras yang luar biasa di daerah masing-masing," ujarnya.

Dekat Kekuasaan

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, mengatakan, jika melihat latar belakang para penjabat kepala daerah itu, sulit untuk tidak melepaskan kesan mereka dekat dengan kekuasaan. Baik itu kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, tokoh politik nasional, maupun tokoh partai politik tertentu. Asumsi itu karena masyarakat sulit melihat secara obyektif latar belakang kepakaran yang dimiliki para penjabat kepala daerah tersebut.

Jika ingin obyektif, kata Djohermansyah, idealnya penjabat gubernur harus memiliki kemampuan manajerial, kompetensi teknik, kompetensi sosial-kultural, dan kompetensi politik pemerintahan. Karena penunjukan penjabat juga dilakukan tidak secara transparan, terbuka, dan demokratis, akhirnya publik merasa tidak bisa memberikan masukan mengenai integritas calon. Calon-calon yang terpilih melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) di Kementerian Sekretariat Negara juga tidak bisa dipastikan usulan dari mana.

"Kalau tidak bisa diukur dengan kriteria obyektif, wajar jika publik menilai sembilan nama itu dekat dengan Presiden, tokoh parpol, dan nasional karena memang publik juga tidak tahu alasan latar belakang kemampuan dan integritasnya seperti apa," kata Djohermansyah.

Djohermansyah khawatir, jika penjabat gubernur tetap tidak dipilih berdasarkan sistem merit, justru pelayanan publik di daerah akan menurun. Sebab, para penjabat ini ibaratnya akan mengurus penyelenggaraan publik, mulai dari bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat.

Mereka akan berkecimpung menangani 32 urusan pemerintahan, mulai dari kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, investasi, dan sebagainya. Apalagi, mereka ditempatkan di provinsi-provinsi strategis, di mana harus ada percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang baik.

"Belum lagi soal netralitas mereka saat berhadapan dengan kepentingan politik, baik pemilu legislatif, maupun pemilu presiden. Kedekatan-kedekatan dengan tokoh nasional menjadi tidak elok. Perlu dibangun sistem yang tegas apabila terlihat tidak netral mereka bisa dicopot setelah evaluasi tiga bulanan," tegasnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, memandang persyaratan penjabat kepala daerah tidak begitu ketat karena hanya mensyaratkan jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya atau eselon I untuk penjabat gubernur, dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon II untuk penjabat bupati atau wali kota.

Ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan seleksi pejabat lembaga negara lainnya, seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih oleh tim panitia seleksi dan melalui serangkaian uji publik. Karena syarat yang tidak kompetitif itu, apabila ada faktor kedekatan politik kemudian menjadi logis.

"Polanya, pemilihan penjabat pada daerah-daerah strategis itu ada kecenderungan pembagian kekuasaan politik. Di Jateng, misalnya, diasosiasikan dekat dengan PDIP, Jabar dekat dengan Pak Jokowi. Ada kesan ingin menunjukkan kepentingan politik yang beragam atau fenomena akomodasi politik," kata Arya.

Kental Nuansa TNI-Polri

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyayangkan masih kentalnya nuansa penjabat gubernur yang berasal dari institusi TNI-Polri. Mereka masih berstatus aktif sampai pada menit-menit terakhir pelantikan penjabat. Bahkan, ada yang menu-

rut dia, tidak memenuhi aturan jabatan pimpinan tinggi madya karena jabatannya hanya staf khusus Mendagri, bukan staf ahli Mendagri. Ini, menurut dia, merupakan praktik-praktik mengakali peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun, terkait dengan indikasi kedekatan politik atau afiliasi politik penjabat gubernur yang dipilih dengan tokoh nasional, menurut dia, jabatan penjabat memang secara formal jabatan administrasi. Namun, jangan dilupakan bahwa jabatan itu juga dekat dengan tugas-tugas politik, seperti alokasi anggaran, menjaga netralitas birokrasi dan aparatur sipil negara, serta pelayanan publik. Menurut dia, jika pertimbangan penunjukan hanya sebatas administrasi, hal itu sangat naif.

"Kalau ditengarai ada penjabat-penjabat titipan jangan heran. Karena usulan sejak awal tidak dibuka semuanya. Di balik proses yang tidak transparan itu, logis saja jika kemudian faktor kedekatan politik yang menjadi pertimbangan utama pemilihan penjabat," kata Robert.

Mendagri Belum Terbuka

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proses penunjukan sepuluh penjabat gubernur yang dinilai masih tidak terbuka kepada publik. ICW menilai Mendagri Tito Karnavian tetap tidak patuh terhadap pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Jelang pelantikan 10 Penjabat Gubernur pada hari Selasa (5/9), Menteri Dalam Negeri tetap membangkang dari amanat konstitusi dan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan bahwa dokumen hukum serta informasi terkait penunjukan Penjabat Kepala Daerah harus terbuka bagi publik," kata Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, dikutip dari keterangan ICW, Senin, 4 September 2023.

Dalam putusan pertimbangannya, MK meminta pemerintah membuat aturan teknis terkait mekanisme penunjukan penjabat agar demokratis dan transparan. Namun, meski belum ada aturan teknis, Mendagri melantik lima penjabat.

ICW kemudian mengajukan permohonan ke KIP terkait transparansi sejumlah informasi dan dokumen pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Majelis Komisioner KIP mengabulkan sebagian permohonan ICW. Dari sejumlah informasi yang diminta pemohon seputar pengangkatan penjabat kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022, ada yang dikabulkan seluruhnya (informasi terbuka), ada informasi yang ditutup sebagian (yang terdapat informasi pribadi dihitamkan), dan ada informasi yang tidak dikuasai oleh termohon, sehingga tidak bisa diberikan.

"Ini secara terang benderang dipertontonkan pada 22 Agustus 2023, di mana Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima sejumlah dokumen yang diberikan secara langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri pasca putusan KIP Nomor 007/I/KIP-PS-A/2023," kata Agus.

Meski dalam surat Nomor 000.9.3.4/4478/SJ yang ditandatangani oleh Suhajar Diantoro selaku atasan PPID Kemendagri, dinyatakan bahwa terdapat iktikad baik untuk mendukung keterbukaan informasi publik, ICW menilai dengan membaca isi surat dan dokumen lampirannya, klaim tersebut faktanya tidak terbukti.

ICW menilai, Kemendagri akan mengulangi kesalahan dari proses penunjukan penjabat kepala daerah apabila melihat sepuluh individu yang dilantik pada 5 September 2023 sebagai penjabat gubernur. Oleh karena itu, ICW mendesak Kemendagri dan pemerintah untuk membuka seluruh informasi terkait latar belakang sepuluh individu penjabat gubernur yang akan dilantik pada September 2023.

"Kemendagri segera menyerahkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dan seluruh aturan teknis terkait pengisian posisi penjabat Kepala Daerah sebagai turunan dari Pasal 201 UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan hakim di putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan No. 15/PUU-XX/2022 kepada ICW," kata dia.

ICW, kata Agus, juga meminta Kemendagri segera menyerahkan dokumen penjaringan calon penjabat, dokumen usulan dan saran yang diterima Kemendagri terkait kandidat penjabat, dokumen pertimbangan dalam sidang Tim Penilai Akhir calon penjabat kepala daerah, serta dokumen rekam jejak dan latar belakang kandidat penjabat kepala daerah.

"Pemerintah segera menyusun, mengesahkan, dan mengundangkan peraturan pemerintah terkait mekanisme pengangkatan penjabat yang berpijak pada nilai transparan, akuntabel, dan partisipatif," pungkasnya.●

DEMOKRAT PASTI PILIH PDIP

Partai Demokrat telah membuka lembaran baru atau move on dari dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Setelah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena Partai Nasdem dan Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Partai Demokrat kini menyongsong peluang lain.

"Seperti yang telah saya sampaikan di taman politk ini beberapa hari yang lalu, pada Senin, 4 September yang lalu, saya menyampaikan bahwa Demokrat telah move on dan tentunya menyongsong hari-hari baik ke depan. Kita menyongsong peluang-peluang dan juga penuh harapan," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu, 9 September 2023..

AHY juga mengatakan 9 September merupakan tanggal yang bersejarah. Sebab, segenap kader merayakan hari jadi partai, sekaligus memperingati hari lahir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hari ini, 9 September merupakan hari yang bersejarah, tanggal yang selalu kita kenang, kita peringati, dan kita jadikan sebagai momentum sejak berdirinya partai. Tepat hari ini juga adalah ulang tahun ke-74 founding father kita, Bapak SBY," katanya.

AHY berterima kasih kepada kader yang telah menjaga spirit sukacita HUT Partai Demokrat. Dia menyebut sejatinya partai akan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) sebagai puncak perayaan HUT Partai Demokrat.

"Tadinya kita akan menyelenggarakan semacam rapimnas, peringatan atau puncak perayaan HUT partai, tetapi tentu karena ada situasi dan dinamika, kita harus undur sedikit," kata AHY.

Namun, AHY belum membeberkan tanggal penyelenggaraan rapimnas tersebut. "Pada saatnya itu akan kita lakukan dan insya Allah di saat itu kita sudah memiliki keputusan-keputusan yang juga akan menentukan perjalanan Demokrat ke depan," imbuhnya.

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK)

Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut, partainya berpikir rasional dan tidak menentukan syarat tertentu dalam berkoalisi pascahengkang dari Koalisi Perubahan. Namun, Demokrat menyatakan siap jika nantinya ada kadernya yang diajak menjadi cawapres oleh koalisi yang baru.

Herman menjelaskan, Partai Demokrat berpikir rasional karena saat ini mereka akan masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk, yakni koalisi pendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. "Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya, berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan apa yang secara rasional itu mungkin jadi porsinya Demokrat," kata dia.

Dia pun menegaskan Partai Demokrat tidak memaksa untuk menawarkan AHY menjadi cawapres bagi koalisi yang baru. "Kalau diajak jadi cawapres ya siap, tapi kalau pun tidak, kami lebih rasional untuk bergabung ke dalam koalisi ke depan. Mengikuti apa pun yang sudah jadi kesepakatan dan komitmen," katanya.

Herman yakin Partai Demokrat mampu menambah kekuatan untuk koalisi. Menurut dia, partainya memiliki jaringan, kader, calon legislatif (caleg), hingga struktur dan elektabilitas yang tinggi.

"Bahkan punya elektabilitas tertinggi sebagai cawapres dan ini menjadi modal dasar untuk pemenangan siapa pun nanti koalisi ke depan," ucap dia.

Herman mengatakan, pihaknya juga sudah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak bakal calon presiden Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Herman berharap komunikasi yang berjalan baik tersebut dapat membuka jalan ke mana arah berlabuh Partai Demokrat.

"Alhamdulillah, komunikasi berjalan baik dan mudah-mudahan ini adalah membuka jalan apakah nanti kepada Ganjar atau Prabowo tentu akan ditentukan di majelis tinggi partai dan terus kami bekerja, komunikasi," ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa Partai Demokrat tidak bisa memaksakan kehendak kepada koalisi pendukung Ganjar maupun Prabowo. "Sebagai pendatang baru dalam koalisinya, tentu kami juga berharap terbuka pintu itu dari pihak koalisi dan tidak bisa juga kami memaksakan," kata Herman.

Herman mengatakan, Partai Demokrat memprioritaskan rencana pertemuan lebih lanjut kepada dua bakal calon presiden tersebut. Menurut dia, komunikasi politik adalah hal penting untuk dilakukan.

"Ya, semua itu prioritas. Komunikasi politik ini penting. Negara ini dibangun oleh kita semua, oleh rakyat kita semua, oleh semua partai. Oleh karena itu, komunikasi dijalin dengan semua partai dengan para kandidat, tentu ini adalah sebuah iklim politik yang menurut saya harus dibangun oleh siapa pun," imbuhnya.

Partai Demokrat, kata dia, juga telah berkomunikasi dengan pimpinan partai yang mengusung Ganjar dan Prabowo untuk mengatur jadwal pertemuan. Dia belum menginformasikan kapan rencana pertemuan tersebut.

"Komunikasi sudah mendekati itu, sudah mendekati kepada para pimpinan partai. Kita tunggu saja," katanya.

Ketua BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron

Komunikasi Intensif

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan partainya segera menggelar pertemuan bersama elite Partai Demokrat. Basarah menyampaikan, saat ini, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, tengah mengatur jadwal pertemuan.

"Sedang dijadwalkan oleh Mbak Puan Maharani," kata Basarah, Sabtu, 9 September 2023.

Wakil Ketua MPR itu memastikan PDIP terus berupaya membangun komunikasi politik dengan partai lain, tak terkecuali Partai Demokrat. Prinsipnya, PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 terbuka dengan par-

tai politik manapun.

"PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politiknya kita terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai politik manapun, apalagi untuk mendukung Mas Ganjar, saya kira komunikasi politik dengan partai-partai politik, termasuk dengan Partai Demokrat masih terus dilakukan. Bagaimana hasilnya? kita lihat nanti," jelasnya.

Basarah juga enggan merespons pembahasan calon wakil presiden Ganjar Pranowo jika Partai Demokrat memilih bergabung dengan PDIP. Ia meminta agar menunggu hasil pertemuan terlebih dahulu.

"Ya kita lihat nanti bagaimana hasil pertemuan temen-temen Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan," ucapnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga mengatakan komunikasi politik dengan Partai Demokrat makin intens. Namun, dia belum bisa memberikan jawaban pasti apakah Demokrat akan bergabung bekerja sama memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga," kata Hasto.

Ia menuturkan, Puan Maharani juga sudah menemui AHY. Selain itu, Hasto juga menyatakan dirinya sudah menemui Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky. Komunikasi politik yang intens juga terus dilakukan, termasuk melalui Utut Adianto, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.

"Kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat. Ini hal yang bagus komunikasi politik membangun kesepahaman. Kami juga tegaskan kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sehingga kerja sama itu akan kokoh," terangnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, peluang pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pertemuan keduanya akan menentukan potensi koalisi Demokrat dan PDIP.

"Biarkan lah beliau ini berdua menikmati dan menjalani prosesnya. Bagi kami bicara mengenai koalisi atau kerja sama tidak harus dimulai oleh pertemuan antara keduanya," ujar Herzaky di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 September 2023.

Herzaky menyampaikan, Partai Demokrat menginginkan kedua tokoh bangsa itu bertemu. Meski demikikan, dia meminta sejumlah pihak tidak mendesak pertemuan itu segera digelar.

"Ya tentu, kita ingin lah ada pertemuan itu. Tapi bagaimanapun itu biarlah berproses, jangan didesak-desak, jangan diburu-buru," kata Herzaky.

Dia menambahkan, pertemuan SBY dan Megawati nantinya bisa menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam kerja sama politik Demokrat-PDIP.

"Kalau keduanya ketemu kan bisa memberikan sinyal-sinyal lain. Tetapi menurut kami biarkan berjalan alami dan berproses apa adanya," ungkap Herzaky.

Merapat ke Ganjar

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai, Partai Demokrat saat ini dalam posisi dilematis paska keputusannya hengkang dari Koalisi Perubahan.

Zaki menjelaskan, posisi dilematis itu diduga karena tidak banyak parpol yang merasa nyaman untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat yang memaksakan agar AHY diusung sebagai cawapres.

"Jadi saat ini Partai Demokrat dalam posisi dilematis. Mau ke mana-mana sulit. Tidak banyak pimpinan parpol yang merasa nyaman berunding dengan Pak SBY. Mau koalisi dengan PDIP ada kendala pertikaian lama den-

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah

gan Bu Mega. Pak SBY sejak lama diketahui dianggap mengkhianati Bu Mega," kata Zaki, Jumat, 8 September 2023.

Menurut Zaki, Demokrat juga akan menghadapi kesulitan apabila bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto. Sebab, posisi Prabowo dan SBY yang sama-sama merupakan mantan Jendral TNI menimbulkan persaingan ego antara keduanya terkait kepemimpinan.

"Gerindra dengan koalisi besarnya juga kurang membutuhkan PD, apalagi Pak SBY minta syarat macam-macam, jadi itu tidak mungkin ditawarin cawapres. Sudah banyak yang ngantri," ungkap Zaki.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, menilai Partai Demokrat tidak akan mudah membentuk poros baru atau poros keempat untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Demokrat bisa membentuk poros baru. Tapi itu tidak akan mudah. Perlu perhitungan dan lobi-lobi yang matang dengan PPP dan PKS," kata Najmuddin.

PPP disebut bisa saja berkoalisi dengan Demokrat karena partai berlambang Ka'bah tersebut merasa tidak dianggap penting bagi PDIP. Karena PDIP dapat mengusung Ganjar Pranowo tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sedangkan kader baru yang menjabat sebagai Badan Pemenangan Pemilu PPP, yakni Sandiaga Salahudin Uno, dinilai sangat berambisi ikut lagi di pilpres.

Sementara, PKS yang mengaku masih berkomitmen bersama Nasdem dan PKB mendukung Anies Baswedan dinilai rentan hengkang menyusul Demokrat. Karena PKS juga dianggap tidak terlalu berarti bagi Nasdem dan PKB yang telah mantap dengan pasangan Anies-Muhaimin.

Tapi yang jadi persoalan, menurut Najmuddin, apakah Sandiaga dari PPP mau hanya menjadi cawapres mendampingi AHY. Atau PKS hanya sebagai pelengkap dari koalisi baru tersebut.

Najmuddin menyarankan Demokrat bergabung saja dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo bersama Gerindra, PAN, dan Golkar. Di mana bila berhasil memenangkan Prabowo, AHY masih dapat mengamankan jatah kursi menteri.

Pengamat Politik, Jamiludin Ritonga

Lalu, Demokrat juga punya kans merapat ke PDIP mendukung Ganjar karena sebelumnya sudah terjalin komunikasi politik yang cukup intens antara AHY dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Tinggal bagaimana menghangatkan lagi hubungan SBY dengan Megawati. Dua tokoh ini diketahui masih belum akur sejak Pemilu 2004," ucap Najmuddin.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, meyakini Partai Demokrat tidak akan kembali lagi ke Koalisi Perubahan. Langkah politik Demokrat bisa saja diarahkan dengan bergabung ke PDIP.

"Partai Demokrat bisa saja berkoalisi dengan PDIP. Peluang itu dapat terwujud bila Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau melupakan masa lalu," kata Jamiluddin, Jumat, 8 September 2023.

Kemungkinan Demokrat dan PDIP berkoalisi sangat terbuka karena Megawati dan SBY mempunyai kepentingan yang sama. Keduanya sama-sama ingin menang di Pilpres 2024.

"Untuk itu, kedua tokoh ini kemungkinan bersatu untuk mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan. Kepentingan ini bisa saja mengalahkan persoalan pribadi mereka selama ini," ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan Ganjar Pranowo akan diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, duet ini juga kompetitif, apalagi bila dihadapkan dengan pasangan Anies-Cak Imin serta Prabowo Subianto.

Jamiluddin melihat Partai Demokrat sulit berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sebab, Gerindra didukung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum.

"Jadi, Partai Demokrat tampaknya lebih berpeluang berkoalisi dengan PDIP daripada Gerindra. Apalagi kalau AHY dan Puan Maharani aktif menyatukan kedua partai untuk berkoalisi," katanya.●

JANGAN PILIH PRESIDEN PEMECAH BELAH UMAT

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.

"Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Menag Yaqut saat menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Minggu, 3 September 2023.

Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Menag.

Karena itu pemimpin yang ideal, menurutnya, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan. "Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," tegasnya.

Menag menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.

"Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden, dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya," kata Menag.

Menag berharap Tarekat Tijaniyah dapat mengambil peran yang lebih besar menjelang tahun politik untuk mendamaikan umat, agar umat bisa tetap tenang, teduh, dan damai meskipun berbeda-beda dalam pilihannya.

"Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar. Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita," ujar Yaqut.

Sebelumnya, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Amien Suyitno, juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian itu untuk menolak politik identitas karena dapat mengancam persatuan. Ia mendorong ASN harus menjadi agen yang bisa mengeliminasi setiap penggunaan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan.

"Saya ingin menyampaikan pesan Gus Men (Yaqut Cholil Qoumas) tentang perlunya menolak politik identitas," ujar Amien.

Amien mengatakan politik identitas harus ditolak karena sangat berbahaya bagi harmoni dan kerukunan masyarakat Indonesia. Menurut dia, politik identitas dengan identitas manusia berbeda. Setiap orang tentu memiliki identitas masing-masing, baik jabatan, pekerjaan, kelompok gender, maupun agama, dan suku bangsa.

"Mengapa kita harus menolak politik identitas? Kalau terkait pentingnya identitas, memang iya. Lalu, apanya yang kita tolak? Yaitu politik identitas yang digunakan untuk kepentingan politik," kata dia.

Menurut Suyitno, identitas yang melekat, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tentu tidak bisa ditolak. Sebab, semua itu merupakan bawaan lahir. Akan tetapi, jika itu digunakan untuk kepentingan politik praktis, harus ditolak.

"Sebab, itu berbahaya. Apalagi, politik identitas dengan nomenklatur agama itu lebih berbahaya lagi. Karena kita punya pengalaman bahwa hal itu bisa menjadikan disharmoni antarkeluarga," katanya.

Amien menambahkan, disharmoni antarkeluarga masih bisa ditemui di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2019. Maka dari itu, menjadi penting untuk menolak politik identitas demi memperkuat harmoni di tengah perbedaan.

"Mereka belum move on. Ini nyata dan ini harus kita cegah," kata dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menilai positif imbauan Menteri Agama tersebut.

"Saya kira mungkin, ya kalau buat saya sih itu positif," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menilai, imbauan itu diberikan supaya masyarakat tidak lagi terjebak dalam perpecahan.

Gus Yahya juga menyatakan, terkait apakah akan akan membuat imbauan serupa kepada warga NU, sejauh ini keadaan masih aman-aman saja.

"Sejauh ini sih kita lihat keadaaan masih aman-aman saja, kita belum tahu perkembangannya nanti ya," ujarnya.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menanggapi imbauan Menag agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik menjelang Pilpres 2024. Cak Imin itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama Anies Baswedan mengamanut nilai-nilai kebangsaan yang sama.

"Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI Tahun 1945, itu sudah final. Komitmen saya dengan Mas Anies," ujar Cak Imin di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu, 6 September 2023.

Apabila disangkutpautkan dengan politik identitas, Cak Imin dan Anies dengan tegas menolak hal itu. Kendati demikian, dia tak memungkiri setiap masyarakat memiliki identitas sendiri.

Adapun politik identitas merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut.

"Akan tetapi, kami tidak terpengaruh oleh seluruh bentuk politik identitas yang berkembang," katanya.

Namun begitu, Menag diingatkan agar berhati-hati dalam memberikan pernyataannya berkaitan politik menuju Pilpres 2024. Hal ini karena pernyataannya yang mengimbau masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, jangan sampai pernyataan dari Menag justru malah memicu perpecahan di antara masyarakat.

"Gus Yaqut semestinya tidak membuat pernyataan-pernyataan kontradiktif atau anomali yang bisa memicu pertentangan di masyarakat. Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang justru akan mendapatkan respons yang negatif dari publik," kata Ujang, Selasa, 5 September 2023.

Ujang mengatakan, meski sah-sah saja dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi Gus Yaqut saat ini adalah pejabat publik. Karena itu, alih-alih mengeluarkan pernyataan yang memicu kontroversi, sebaiknya fokus bekerja menjalankan visi misi presiden.

Sebab, pernyataan tersebut justru berpotensi memicu munculnya politik identitas yang saat ini sudah jauh menurun dibandingkan Pilpres 2019.

"Para pejabat termasuk para menteri tidak perlu membuat pernyataan tidak perlu. Karena masyarakat sudah paham sudah tahu bahwa politik identitas harus ditinggalkan, politik SARA juga harus dihilangkan, adu domba juga harus dienyahkan, itu publik masyarakat sudah tahu itu," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengingatkan untuk menghormati pilihan politik setiap orang. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara perbedaan politik.

"Kita harus hilangkan ego, lalu juga memahami perbedaan, dan kita harus hormati beda pilihan siapapun di antara anak bangsa. Dan untuk tidak membangun politik yang berdasarkan identitas, SARA, fitnah dan narasi negatif lainnya," ujarnya. ●

PPP MENTOK DUKUNG GANJAR

Lobi-lobi politik di internal koalisi PDIP semakin alot. Pasalnya, nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo tak kunjung mengemuka di publik. Yang ada, justru ada gejolak dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ikut bergabung dalam koalisi.

Gejolak tersebut mulanya terjadi saat Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, membuka wacana akan loncat ke koalisi lain, apabila Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, tak disepakati menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024.

Arsul beralasan saat melontarkan wacana tersebut di awal Agustus kemarin, dengan menyebut banyak akar rumput di PPP yang belum setuju partai berlogo Ka'bah itu bergabung bersama PDIP. Sehingga, ada kemungkinan peralihan arah politik, termasuk jika Sandiaga Uno tak menjadi cawapres Ganjar.

Panasnya suhu politik di internal PPP pun menguat pasca Arsul membuka wacana tersebut. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya rapat internal mendadak pada Selasa malam, 8 Agustus 2023, dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono, didampingi Sekretaris Jenderal, Arwani Thomafi. Hadir juga jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara daring.

Hasil dari rapat tersebut, disampaikan oleh Juru Bicara PPP, Usman Tokan, adalah membahas penyataan Arsul, yang secara kelembagaan dinilai telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, karena dipastikan yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI itu telah melampaui kewenangannya dan tak sesuai fakta perkembangan di internal koalisi.

Bahkan, desas-desus yang beredar menyebutkan, Arsul yang dimutasi dari Komisi III DPR menjadi anggota Komisi II DPR merupakan bagian dari sanksi yang diberikan, karena telah mewacanakan PPP akan loncat koalisi jika Sandiaga Uno tak disetujui menjadi cawapres Ganjar.

"Seharusnya (Arsul) memahami betul mekanisme yang ada di tubuh Partai

Persatuan Pembangunan. Beliau adalah pakarnya hukum, kok bisa bicara sudah melampaui kewenangannya melebihi AD/ART," ungkap Usman dalam siaran persnya yang beredar.

Kendati begitu, PPP memastikan akan tetap berada di PDIP. Tetapi di sisi yang lain, Usman menyatakan partai yang dipimpin Mardiono akan tetap konsisten memperjuangkan amanat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP untuk menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar.

"Rapimnas berikutnya menetapkan Pak Sandiaga Salahudin Uno selaku kader partai sebagai cawapres mendampingi Mas Ganjar," sambung Usman.

Bicara peluang Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar, nampaknya memang tidak cukup kuat. Sebab, dalam suatu acara diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Kamis, 7 September 2023, politisi PDIP, Masinton Pasaribu sempat ditanya mengenai bocoran nama cawapres yang akan dideklarasikan.

Di antara nama-nama yang beredar di publik, Masinton sama sekali tidak menyebut Sandiaga Uno sebagai salah satu yang masuk radar PDIP. Justru, anggota Komisi III DPR itu malah menyebutkan nama politisi Partai Golkar yang baru saja pensiun menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hingga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Nama Mas Ridwan Kamil masuk dalam radar, seperti disampaikan Mbak Puan Maharani (Ketua DPP PDIP dan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar). Bahkan ada nama Mas AHY, ada Prof. Mahfud (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Kemanan), Pak Andika Perkasa (mantan Panglima TNI), dan ada beberapa nama lagi," ucap Masinton dalam acara diskusi OTW 24 yang diselenggarakan lembaga survei KedaiKOPI.

Di antara nama-nama yang menguat menjadi cawapres Ganjar, bisa saja salah satunya akan disepakati Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai pemilik wewenang tertinggi di internal partai dan paling berpengaruh di koalisi.

"Ya mungkin bisa saja (salah satu di atara nama-nama yang beredar). Cuman kan kita enggak tahu, keputusannya kan nanti. Kita tunggu saja kapan ada breaking newsnya," ujarnya.

Namun, Masinton memastikan PDIP memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memilih sosok cawapres bagi Ganjar yang juga baru saja berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023.

"Tentu dalam aspek elektoral ini, dalam pemilihan ini kan Jawa itu kunci. Karena populasi penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, tentu semua rebutan di Pulau Jawa. Artinya, kita juga enggak boleh mengabaikan aspek luar Jawa," paparnya.

"Karena sudah di atur dalam UU (pemilu) pemenang harus memperoleh lebih dari 50 persen per provinsi. Maka, ketika Jawa adalah kunci, semua konsentrasi ke sana. tetapi kita tidak boleh abai dalam konteks ke-Indonesian kita," sambung Masinton.

Kecamuk permasalahan yang terjadi antara PDIP dan PPP tersebut dipandang sebagai suatu dinamika politik yang biasa terjadi jelang kontestasi Pilpres oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indo-

nesia (PPI), Adi Prayitno.

"Perbedaan pendapat di antara partai itu pastiya ada ya. Termasuk di PPP. Tapi kalau melihat arus utama dan kecenderungannya, rasa-rasanya PPP tetap lebih condong bersama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Artinya, secara mayoritas dan kelembagaan hari ini, PPP tetap menyatakan tegak lurus bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo," tutur Adi kepada Info Indonesia, Jumat, 8 September 2023.

Kalau ada elit tertentu yang berbeda sikap politik, Adi menilai hal itu hanya sebagai wacana yang sengaja digaungkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, belum menjadi keputusan final PPP dan itu sebagai satu hal yang lumrah terjadi.

"Seperti Pak Arsul yang punya sikap politiknya berbeda dan disikapi internal, itu fenomena biasa dalam politik kita. Karena yang akan dilihat di kita pada prinsipnya adalah keputusan resmi dari partai pendukung tetap di PDIP atau pindah ke lain hati," katanya.

Dia berpendapat, kejadian beda pendapat antar elite partai banyak terjadi di selain PPP. Dia mengistilahkan persoalan tersebut sebagai bias politik yang disebabkan ketidakmatangan konsolidasi di internal di segala tingkatan.

Dari banyak kasus yang terjadi, pengajar politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu meyakini PPP telah dikandangi PDIP, mengingat sampai saat ini posisi Partai Ka'bah punya peluang membantu perolehan suara Ganjar di Pilpres 2024.

"Memang partai tidak bisa mengontrol secara aklamatif soal sikap dan kecenderungan perilaku elitnya. Pasti ada saja yang nyempil, pasti ada saja yang berbeda. Tapi yang dilihat oleh publik adalah bagaimana keputusan formal, keputusan final dari partai itu dalam Pilpres. Kalau PPP sejauh ini kecenderungan mayoritas politiknya lebih banyak tetap bersama PDIP dan Ganjar Pranowo," tutup Adi.

Tetap Istiqomah

Ketua Badan Pemenangan Pemili (Bappilu) DPP PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan, arah koalisi partai berlambang Ka'bah masih belum berubah. Artinya, PPP tetap seperti semula bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo.

"PPP tetap istiqomah dalam kerja sama dengan PDIP. Kita istiqomah. Karena ini bukan mencari jabatan dengan berambisi untuk mencari kekuasan semata. Tapi justru adalah politik amar ma'ruf nahi munkar. Politik penuh pengorbanan dan pengabdian," kata Sandi di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat, 8 September 2023.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kemudian menyebut, PPP dan PDIP berkomitmen memenangan Ganjar sesuai kesepakatan awal.

Saat ditanya peluangnya menjadi calon wakil presiden Ganjar, Sandi hanya menjawab dirinya dan PPP fokus terhadap topik yang dibutuhkan masyarakat.

"Solusi yang perlu kami hadirkan di tengah masyarakat, insya Allah kami bisa meyakinkan bahwa gagasan membangun Indonesia dengan percepatan pembangunan ini bisa kita wujudkan," ucap Sandi.

Eks wagub DKI periode 2017-2018 itu tak menampik baru-baru ini mendengar adanya isu peluang bekas gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, digaet menjadi cawapres Ganjar. Dia pun enggan mengomentari kabar tersebut. "Saya tidak dalam kapasitas menanggapi," kata Sandi singkat.

Sandi juga menegaskan, partainya tidak terlalu berambisi dan meminta-minta jatah cawapres dalam berkoalisi dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo. PPP semula bergabung mendukung capres Ganjar dengan harapan mendapatkan posisi sebagai cawapres. Adapun selain PDIP dan PPP, Ganjar sudah resmi didukung Partai Hanura dan Perindo.

Kini, Sandi menyebut, PPP mengusung gaya berpolitik mencari keberkahan dan pengorbanan untuk kehidupan masyarakat lebih baik. "Kita tak boleh ambisi tak boleh meminta-minta karena ini bukan politik mencari jabatan dan kekuasaan tapi mencari keberkahan melalui pengorbanan," kata Sandiaga.

Sandi mengatakan, baik dirinya, PPP, dan seluruh elemen partai berlambang Ka'bah itu sudah melakukan seluruh upaya duniawi meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Kini dalam 30 hari ke depan atau sebelum masa pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Sandi, seluruh elemen PPP sedang berjuang bersama.

Dia meminta pengurus PPP membuat

majelis ibadah supaya para pimpinan parpol koalisi diberi petunjuk untuk menentukan langkah terbaik demi pemenangan Ganjar pada Pilpres 2023. Sandi memastikan PPP tidak lagi mengincar cawapres Ganjar.

"Kita berdoa agar pimpinan parpol yang usung Ganjar Pranowo mendapatkan petunjuk dari sorga untuk menentukan langkah-langkah staretegis ke depan. Bukan hanya cawapres tapi juga langkah-langkah memenangkan hati dan pikiran masyarakat supaya pada Februari 2024 (pecoblosan) kita dapat amanah," ujar Sandi.

Sandi mengatakan, PPP menargetkan perolehan sebanyak 11 juta suara pada Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, PPP meraih 6.323.147 suara atau 4,52 persen.

"Target kita adalah anak-anak muda dan pemilih perempuan. Caranya kita menawarkan konsep ekonomi hijau untuk menjaga kestabilan harga, membuka lapangan kerja, dan hidup berkah," kata Sandi.

Di sisi lain, Juru Bicara PPP, Achmad Baidowi, mengatakan, koalisi baru memang sempat santer diwacanakan untuk terealisasi. Namun melihat kondisi politik saat ini, ia melihat bahwa wacana tersebut semakin sulit terwujud.

"Isu poros baru sampai sejauh ini saya melihatnya makin menipis. Awalnya agak santer biasa ya, kemudian sekarang sudah mulai menipis," ujar Baidowi.

Wacana poros baru tersebut berhembus ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ajakan dari salah satu menteri untuk membentuk koalisi tersebut. Poros yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun hal tersebut sangat sulit terealisasi, karena PPP sudah berkomitmen dalam kerja sama pengusungan Ganjar Pranowo. Meskipun, Partai Demokrat dan PKS belum mengambil sikap terbarunya soal Pilpres 2024.

"Jadi banyak problem terkait poros baru itu. Jadi sampai sekarang poros baru menjadi bagian kecil dari dinamika politik yang ada di Indonesia. Termasuk di PPP, karena PPP masih konsisten dengan hasil rapimnas," ujar Baidowi.

Ia sendiri mengamini adanya komunikasi antara Sandiaga Uno dengan PKS. Namun, komunikasi tersebut dalam rangka pembentukan koalisi besar, bukan poros baru. "Bukan poros baru, tapi komunikasi untuk masuk ke poros koalisi yang besar. Soal kemudian jadi bergabung atau tidak itu sekali lagi kembali ke mekanisme politik," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Baidowi juga menanggapi desas-desus yang menyebut bahwa mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dipilih jadi bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ia berpendapat, masuknya nama RK dalam kandidat pendamping Ganjar adalah hal yang lumrah.

"Masuknya nama-nama bakal cawapres dalam bursa yang dijalankan di internal koalisi itu hal yang wajar bagian dari dinamika politik. Semua orang boleh mewacanakan, siapapun boleh," ujar Baidowi.

Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama partai politik pengusung Ganjar memiliki mekanisme dalam penentuan bakal cawapres. Ia mengklaim, saat ini, hal tersebut belum mengerucut ke satu nama.

"Sehingga, tinggal bagaimana kita nanti duduk bersama memformulasikan nama-nama yang beredar. Toh sampai sekarang masih belum mengerucut nama-namanya," ujar Baidowi.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri bersama pimpinan PPP, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tentu akan membahas nama-nama potensial yang beredar. Lewat musyawarah mufakat, nama tersebut pasti akan diputuskan menjadi pendamping Ganjar.

PPP sendiri masih menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres dari Ganjar. Hal tersebut merupakan amanat Rapimnas yang digelar pada pertengahan 2023.

Para ketua umum partai politik pengusung Ganjar sendiri sudah menggelar rapat konsolidasi pada 4 September 2023 di Kantor DPP PDIP. Nantinya, ada ada rapat khusus untuk mendalami nama kandidat cawapres dari Ganjar.

"Di internal PPP karena keputusan Rapimnas adalah Pak Sandi. Kalau nanti ada perubahan sikap politik nanti menjadi kesepakatan bersama kita harus melegalkan kembali dalam rapat pimpinan nasional," ujar Baidowi.•

PARTAI UMMAT TAKUT GAGAL KE SENAYAN

Sejumlah partai politik diprediksi gagal lolos ke Senayan karena tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. Salah satu yang disebut tidak bisa lolos adalah Partai Ummat.

Meski mengaku santai dengan hasil sejumlah lembaga survei, Partai Ummat tetap saja punya kekhawatiran gagal mengirimkan kadernya ke Senayan. Hal itu bisa terlihat ketika Partai Ummat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 Ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menilai, ambang batas parlemen 4 persen itu sangat membebani partai politik peserta pemilu. Selain itu, aturan mengenai syarat untuk memenuhi ambang batas parlemen tidak berdasar.

"Karena logikanya tidak masuk akal dan sangat merugikan partai politik peserta pemilu," kata Ridho di Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Pasal 414 Ayat (1) tersebut berbunyi, "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR."

Ridho mengatakan, Pasal 414 Ayat (1) tersebut merupakan aturan yang tidak memberikan keadilan bagi partai politik. Aturan tersebut hanya memberikan keuntungan kepada partai politik yang sudah sering mengikuti pemilu.

"Karenanya, Partai Ummat akan mengajukan judicial review atau peninjauan kembali atas pasal bermasalah ini dan kami mengajak segenap anak bangsa agar bersama-sama menegakkan keadilan," tegas Ridho.

Dia menegaskan, partainya bertekad untuk melawan seluruh upaya kezaliman yang dilakukan kelompok tertentu demi mengambil keuntungan dari aturan yang bermasalah ini.

Dia menjelaskan, partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR di 47

Daerah Pemilihan belum tentu bisa menempatkan 47 wakilnya di parlemen bila 47 kursi itu diperoleh dari dapil yang jumlah pemilihnya sedikit.

Sebaliknya, kata Ridho, meskipun hanya memperoleh 19 kursi, tapi bila kursi tersebut didapatkan dari dapil yang jumlah pemilihnya banyak, maka partai politik tersebut bisa langsung melenggang ke DPR.

"Keganjilan ini bersumber dari ambang batas parlemen 4 persen yang basisnya adalah suara, bukan kursi. Ini jelas tidak adil dan cara berpikirnya ganjil," kata Ridho.

Hasil kajian dan simulasi yang dilakukan Partai Ummat menunjukkan partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa dan beberapa kursi di dapil Pulau Jawa sebanyak 47 kursi, atau setara dengan lebih dari 8 persen jumlah

Karena logikanya tidak masuk akal dan sangat merugikan partai politik peserta pemilu.

total kursi DPR. Namun, bila 47 kursi itu dikonversi menjadi suara, maka hanya menjadi 3,34 persen suara sah nasional.

"Dengan demikian, maka partai politik tersebut otomatis tidak lolos masuk Senayan karena ambang batas parlemen itu 4 persen suara sah nasional. Jelas ini cara berpikirnya kacau," jelas Ridho.

Ridho mengatakan, ketidakadilan ambang batas parlemen ini bisa dilihat pada kasus PPP yang pada Pemilu 2019 meraih 4,52 persen suara sah nasional. Padahal PPP hanya meraih 19 kursi dari dapil padat penduduk di sejumlah provinsi.

Penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasar atas perolehan suara sah nasional, kata Ridho, sangat tidak masuk akal, tidak proporsional, dan tidak adil.

"Bahkan, lebih dari itu, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Partai Ummat memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, dan membatalkannya demi hukum, serta melakukan perbaikan terhadap aturan tersebut.

Partai Ummat memohon kepada MK agar basis ambang batas perlemen tidak hanya didasarkan pada jumlah 4 persen suara atau voters, tetapi juga jumlah 4 persen kursi di parlemen.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, mengatakan, langkah Partai Ummat untuk menggugat ambang batas parlemen bentuk kekhawatiran dari partai besutan Amies Rais.

"Ini bisa jadi memang kekawatiran Partai Ummat karena melihat banyaknya partai berasaskan keislaman yang mengikuti kontestasi pada Pemilu 2024 mendatang," kata Iwan.

Dia menyebut, ceruk pemilih antara Partai Ummat dengan partai yang berbasis Islam relatif sama. Maka, Partai Ummat akan sangat kesulitan merebut suara pemilih Islam.

"Sehingga ceruk pasar pemilih mereka relatif sama dan menyulitkan Partai Ummat sebagai partai baru untuk bisa merebut penuh suara pemilih Islam," jelas pria yang akrab disapa Iwan itu.

Iwan mengatakan, karena ceruk pemilih Partai Ummat dengan partai berbasis itu sama, maka partai berlambang perisai bintang emas itu merasa berat untuk mencari ambang batas parlemen.

"Jadi secara kalkulasi hitungan partai umat merasa berat untuk bisa memenuhi ambang Batas parlemen 4 persen," terang Iwan.

Keberadaan Amien Rais di Partai Ummat juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap pemilih Islam. Dia memprediksi basis pemilih Partai Ummat ialah Muhammadiyah.

"Dengan adanya Amien Rais di dalam Partai Ummat bisa jadi hanya bisa sedikit meraih suara pemilih Islam, khususnya suara Muhammadiyah," kata Iwan.

Padahal, semua partai politik peserta pemilu ingin merebut ceruk pemilih muda yang diperkirakan mencapai 60 persen dari total suara sah. Iwan menyebut, Partai Ummat masih cenderung menjadi partai tertutup yang hanya mengkampanyekan tentang keislaman.

"Sehingga akan sulit meraih suara diluar ceruk pasar tradisionalnya," ujar Iwan.

Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, disebutkan hanya 7 partai peserta Pemilu 2024 yang lolos ambang batas parlemen. Artinya, dari 18 partai perebut kursi Senayan, 11 di antaranya masih mendapat elektabilitas di bawah 4 persen.

PAN dan PPP adalah partai yang pada periode 2019-2024 berhasil masuk parlemen, kini mendapat elektabilitas di bawah 4 persen, PAN (3,4 persen) dan PPP (1,6 persen).

Sedangkan partai baru maupun nonparlemen tidak ada yang mendapat elektabilitas di atas 4 persen. Partai nonparlemen dengan perolehan elektabilitas tertinggi adalah Perindo dengan 3,4 persen.

Di bawah tiga partai tersebut, elektabilitasnya di bawah 1 persen. Mayoritas mereka adalah partai baru, namun ada juga partai lama. Partai-partai tersebut adalah Partai Hanura (0,8 persen), PSI (0,8 persen), Partai Garuda (0,5 persen), Partai Gelora (0,4 persen), Partai Ummat (0,2 persen), PBB (0,1 persen), dan Partai Buruh (0,1 persen).

Di sisi lain, Partai kebangkinan Nusantara (PKN) tidak terekam pada hasil survei tersebut. Namun PKN tidak termasuk yang lolos ambang batas parlemen.

Sedangkan partai yang elektabilitasnya memenuhi ambang batas parlemen adalah PDIP (24,4 persen), Partai Gerindra (18,9 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (7,6 persen), Partai Golkar (7,2 persen), Partai Demokrat (7,0 persen), Partai Keadilan Sejahtera (6,3 persen), dan Partai Nasdem (5,9 persen)..●

HEBOH PENGHAPUSAN PERTALITE

Lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman memerlukan biaya tambahan. Tapi siapa yang siap menanggung beban?

Di tengah langit suram Jakarta karena index kualitas udara (air quality index, AQI) yang buruk, Pertamina mengusulkan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax yang beroktan rendah mulai 2024. Tapi, baru sekadar usulan.

Meski baru usulan, wacana penghapusan itu sudah memicu banyak reaksi. Biasalah, ada yang setuju dan tidak.

Mengenai usulan itu, PT Pertamina telah mengkaji penghapusan BBM jenis Pertalite, dan menggantinya dengan Pertamax Green 92, campuran antara Pertalite dengan etanol tujuh persen sehingga menghasilkan RON 92. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengemukakan, usulan itu sejalan dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menetapkan RON 91 sebagai produk BBM terendah yang bisa dijual di Indonesia.

Nicke mengemukakan pula, Pertamina menerapkan Program Langit Biru sejak dua tahun lalu, yang pada tahap pertama adalah menghapus keberadaan BBM RON 88 yang dikenal sebagai bensin premium. "Program pertama menaikkan BBM subsidi dari RON 88 menjadi RON 90. Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana Program Langit Biru tahap dua, di mana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 ke RON 92," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 30 Agustus 2023.

Menurut Nicke, langkah ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yakni BBM

yang diperbolehkan beredar nantinya minimal RON 91. "Aspirasi mengenai program langit biru tahap dua ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah, tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut.," ujarnya

Ketika menjadi program pemerintah, kata dia, Pertamax 92 harganya pun tentu ini akan regulated. "Tidak mungkin barang JBKP (jenis bbm khusus penugasan) harganya diserahkan ke pasar, karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya," sambung Nicke.

Dengan begitu, Pertamina menginginkan Pertamax Green 92 nantinya akan menjadi JBKP menggantikan Pertalite. Sehingga harganya akan diatur oleh pemerintah, di luar fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Nicke menegaskan, usulan Pertamax Green 92 sudah melalui kajian internal BUMN minyak dan gas itu. Menurut dia, masyarakat berhak mendapat bahan bakar dengan kualitas lebih baik bagi mesin kendaraan dan juga bisa menghasilkan gas buang emisi yang bersih. "Dengan beroktan lebih baik sehingga itu untuk mesin juga lebih baik sekaligus emisinya juga menurun, why not? Jadi usulannya itu," ujarnya.

Tampaknya tak ada yang keberatan dengan usulan meningkatkan oktan BBM yang menekan unsur pencemar udara. Nilai oktan diukur dengan standard Research Octane Number (RON), nomor (hasil) penelitian oktana. Selain itu, nilai oktan juga menunjukkan stabilitas bahan bakar yang berpengaruh pada performa mesin kendaraan.

Di Indonesia, bahan bakar bensin memiliki nilai oktan atau RON tertentu. Sebagai contoh, Pertamax Turbo memiliki RON 98, Pertamax memiliki RON 92, dan Pertalite memiliki RON 90. Angka oktan pada bahan bakar yaitu suatu bilangan yang menunjukkan seberapa tinggi tekanan yang akan diberikan sampai pada akhirnya bahan bakar akan terbakar secara spontan.

Sedangkan tinggi-rendah angka oktan merupakan perbandingan atau rasio dua senyawa kimia: iso-oktana dan n-heptana memiliki peringkat nol. Sehingga, campuran 90 persen iso-oktana dan 10 persen n-heptana akan mempunyai nilai oktan atau RON 90. Begitu juga RON 98 berarti mengandung dua persen kandungan n-heptana.

Lalu, apa urusannya RON dengan pencemaran atau penurunan kualitas udara? Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin pernah menjelaskan, RON di bawah 91 akan memicu keseringan terjadinya knocking atau ngelitik pada mesin. "Ketika mengelitik, maka akan ada banyak bahan bakar yang terbuang. Selain boros bahan bakar, juga akan meningkatkan polutan hidrokarbon, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida," ujar pria yang juga akrab disapa Puput.

Maka, sambungnya, wajib hukumnya menghentikan peredaran bensin yg RON-nya hanya 88 hingga 90. Artinya, tidak memadai dengan kebutuhan mesin kendaraan bermotor sekarang ini. "Kalau solar, maka solar harus dengan kadar belerang maksimum 50 ppm (particle per million). Sementara kalau solar 48, kadar belerangnya

masih sangat tinggi, yaitu 2000 ppm. Solar Dexlite, kadar belerangnya 1200 ppm, itu juga termasuk sangat tinggi," kata Puput.

Dalam kaitan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kajian mengenai penghapusan Pertalite dengan RON 92 masih berlanjut. "Nanti kita lakukan . Sekarang itu lagi dihitung. Ini kan apa namanya, semuanya masalah ke polusi juga. Kita mau pakai etanol berapa persen, supaya oktannya turun, supaya tadi sulfurnya kurang," ungkapnya usai menghadiri CEO Forum of ASEAN Bloomberg, Jakarta, Rabu, 6 September 2023.

Menurut dia, transportasi penyumbang terbesar polusi udara. Bahkan dia menyebut, 37 persen sepeda motor tak lolos uji emisi. Untuk itu, pemerintah berupaya membenahi dari segi kadar BBM-nya.

"Karena sampai hari ini kita lihat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ini dari transportasi. Hasil dari pengetesan di lapangan sekarang, 37 persen sepeda motor itu tidak lulus emisi. Jadi sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya. Jadi itu semua kita lakukan secara terukur," ucapnya.

Sebelum Pertalite dihapus dari pasaran, kata dia, pemerintah melibatkan program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera) untuk mengkaji hal tersebut. "Sekarang ini kita minta Prospera membuat studi detail masalah ini. Sekarang yang baru kita lakukan ini baru feeling, belum data yang lengkap. Jadi setelah studi ini selesai, dalam minggu-minggu depan kita akan targetin ini lebih bagus lagi," jelas Luhut.

Pertamina sendiri pada Juli 2023 telah meluncurkan Pertamax Green 92 yang direncanakan untuk pengganti BBM Pertalite. Luhut mengemukakan, pemerintah ingin memastikan penghapusan BBM dengan RON 90 tidak akan membebani masyarakat ketika Pertalite dihapus dari pasaran. "Kita akan tetap melihat supaya rakyat itu jangan sampai terbebani. Itu kuncinya," pungkas Luhut.

Nah persoalannya memang berapa harga eceran bahan bakar dengan RON lebih tinggi itu. Pertamina jelas-jelas menginginkan pemerintah menyediakan subsidi bagi BBM ramah lingkungan pengganti Pertalite. Ini yang pasti akan menjadi bahan perhitungan.

Dari sisi regulator teknis, Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah masih belum menyentuh usulan Pertamina mengganti Pertalite dengan bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki oktan lebih tinggi. "Kalau Pertamina membahas, silakan membahasnya, tapi pemerintah belum. Jadi industri dulu, silakan membahas, kan dibahas kan katanya, ya sudah silakan. Tapi pemerintah belum," kata dia di sela-sela acara Indonesia Sustainability Forum di Park Hyatt, Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Pak Dirjen Migas juga menambahkan, pemerintah pun belum memutuskan apakah akan menyetop penjualan Pertalite di tahun depan seperti kajian Pertamina. Terlepas usulan penghapusan Pertalite itu sejalan dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang.

Menurut Tutuka, penghapusan atau penggantian jenis BBM bersubsidi bukanlah persoalan yang sederhana, sebab melibatkan banyak unsur pemerintahan, bukan hanya di Kementerian ESDM. "Masalahnya tidak sederhana, tergantung masalah polusi, tidak demikian. Kan harus ada pertimbangan ekonomi dan sosial, dan itu tidak bisa dari Kementerian ESDM saja, harus ada kementerian lain," tandasnya.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menyebut penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19. "Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujarnya.

Menurut dia, pengamatannya di lapangan menunjukkan permintaan BBM RON di bawah 91 tetap tinggi. "Yang saya amati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi.

Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan

daya beli masyarakat masih sebatas itu," sambung Mulyanto.

Toh ia mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen LHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.

Ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Bukan sekedar latah dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju.

> Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah.

"Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka.

Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," tandas Mulyanto.

Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengemukakan, tidak pernah ada pernyataan bahwa BBM jenis Pertalite akan dihapus pada 2024. Erick mengatakan, PT Pertamina (Persero) akan fokus pada efisiensi penggunaan BBM jenis Pertalite.

"Tidak pernah ada statement Pertalite dihapuskan, tidak pernah ada loh. Tetapi efisiensi penggunaan Pertalite," kata Erick di Gedung Galeri Koperasi dan UMKM, Tangerang Selatan, Kamis, 7 September 2023

Erick mengatakan, efisiensi Pertalite tersebut untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran. "Jangan orang mampu beli bensin subsidi itu kan enggak boleh, itulah kenapa kemarin Pertamax sempat ada," ujarnya.

Menurut Erick, pemanfaatan BBM jenis baru yang dicampur dengan etanol perlu didukung terutama masyarakat kelas atas. Hal ini, kata dia, salah satu langkah untuk menekan polusi udara. "Seperti di Brazil sekarang sudah ada campuran BBM dengan bio etanol karena itu bagus, di Brazil itu 67 persen mobil pakainbio etanol akhirnya udara biru, jadi kita harus dorong," ucapnya.

Akhirnya, Bu Dirut Pertamina menegaskan, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan. "Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apa pun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut," kata Nicke.

Usulan Program Langit Biru Tahap 2 ini, sambungnya, akan menjadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan, Namun, jika nantinya usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harga jual Pertamax Green 92 tentunya akan diatur oleh pemerintah.

"Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya," kata Nicke.

Ya, udara dan lingkungan yang lebih berkualitas memang memerlukan biaya tambahan. Tampaknya negara yang diminta menanggung beban. •

KTT ke-43 ASEAN

WUJUDKAN ASIA TENGGARA EPISENTRUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Indonesia kembali sukses menggelar pertemuan internasional dengan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta, 5-7 September 2023.

Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemimpin dan menyebut bahwa KTT menghasilkan puluhan dokumen dan kerja sama konkret.

"Selama tiga hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan, menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra," ujar Presiden Jokowi.

Selama pertemuan, Presiden Jokowi menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh pemimpin yang hadir. Menurutnya, hal tersebut menguatkan harapan dan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

"Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas," imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden Jokowi menyebut bahwa perdamaian adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik untuk rakyat, kawasan, dan dunia. "Inilah esensi yang dibangun keketuaan Indonesia: menjadikan ASEAN matters sebagai epicentrum of growth," lanjutnya.

Meskipun demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pekerjaan besar ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Menurutnya, ASEAN akan terus menghadapi beragam dinamika dan kompleksitas tantangan global.

"Untuk itu, kita harus terus bahu membahu menavigasi tantangan menjadi peluang, menavigasi rivalitas menjadi kolaborasi, menavigasi ekslusivitas menjadi inklusivitas, dan menavigasi perbedaan menjadi persatuan. Kita harus jadi nahkoda di kapal kita sendiri," jelasnya.

Dalam upacara penutupan, Presiden Jokowi secara resmi menyerahkan tongkat estafet ketua ASEAN kepada Perdana Menteri (PM) Laos, Sonexay Siphandone, yang akan memegang

keketuaan ASEAN berikutnya. Presiden Jokowi pun mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama.

"Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerja sama untuk ASEAN yang damai dan makmur, serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan untuk keketuaan Indonesia 2023," ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan KTT ke-43 ASEAN telah menghasilkan sejumlah kesepakatan dalam upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan ASEAN.

"Walaupun di tengah situasi yang sulit, keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan," ucap Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin, Kepala Negara menekankan pentingnya rasa tanggung jawab yang besar untuk mencegah terjadinya konflik dan ketegangan baru.

"Di saat bersamaan, juga miliki tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog," tuturnya.

Presiden Jokowi memandang bahwa dunia saat ini membutuhkan jangkar dan rumah aman. Jika semua pihak terbawa dengan arus rivalitas konflik dan ketegangan di suatu tempat, maka dunia diyakini akan hancur.

"Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house," ujar Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi pun memastikan bahwa saat ini ASEAN telah berada pada jalur yang tepat untuk menjalankan peran sebagai kontributor stabilitas perdamaian.

Di samping itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa para pemimpin telah berhasil menyepakati East Asia Summit (EAS) Leader's Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Presiden menyebut bahwa kesepakatan tersebut dihasilkan setelah melalui proses panjang.

"Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah. Tarik menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi alhamdulillah konsensus tercapai," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menuturkan bahwa ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Indonesia dan ASEAN juga terus suarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk menyejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh RRT, Jepang, dan Korea," terangnya.

Presiden Jokowi mendorong seluruh anggota ASEAN meneguhkan kembali tekad untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai dan sejahtera. Meski dinamika global saat ini tidak mudah, tetapi Presiden meyakini ASEAN akan mampu melewati tantangan tersebut.

"ASEAN adalah contoh keberagaman yang harmoni, yang saling melengkapi, dan menguatkan. Perbedaan antarnegara ada, tapi tidak menjadi halangan kita untuk mewujudkan tekad dan cita-cita ASEAN," ujar Presiden.

Menurut Presiden, bonus demografi dan kepercayaan dunia terhadap ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik saat ini merupakan aset kuat ASEAN untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu,

Presiden mendorong agar momentum tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Momentum positif ini harus kita manfaatkan untuk menjadikan ASEAN sebagai masa depan dunia, menjadikan ASEAN jangkar perdamaian, jangkar kestabilan, dan jangkar kesejahteraan dunia," katanya.

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023, Indonesia berupaya meletakkan fondasi kuat sehingga ASEAN akan mampu memegang peran sentral dalam menjawab tantangan global. Presiden pun mengajak seluruh negara ASEAN untuk bersama-sama bergerak maju karena tanggung jawab terhadap ratusan jiwa rakyat ada di dalamnya.

Jajal MRT

Presiden Jokowi menghadiri acara peluncuran kartu jelajah berganda atau multi trip edisi khusus ASEAN yang digelar di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mencoba langsung kartu jelajah berganda tersebut untuk naik moda raya terpadu (MRT).

Tidak hanya didampingi sejumlah menteri, Presiden Jokowi turut mengajak serta para duta besar negara ASEAN dan mitra untuk bersama-sama menggunakan MRT menuju Gedung Sekretariat ASEAN. Tampak Presiden bersama sejumlah menteri dan para dubes naik di gerbong pertama MRT.

Sekitar pukul 08.39 WIB, MRT yang ditumpangi Presiden dan para dubes berangkat dari stasiun Bunderan HI. MRT kemudian melaju dan berhenti di tiap-tiap stasiun, mulai dari Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora Mandiri, Senayan, hingga Stasiun ASEAN.

Tiba di Stasiun ASEAN sekitar pukul 08.52 WIB, Presiden dan para dubes terlebih dahulu meninjau pameran foto terkait ASEAN. Setelahnya, Presiden dan para dubes berjalan kaki bersama-sama menuju Gedung Sekretariat ASEAN untuk menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 ASEAN.

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan, kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN tersebut diluncurkan dalam rangka menyambut keketuaan Indonesia di ASEAN. MRT Jakarta juga dipilih sebagai moda transportasi resmi ASEAN.

"Oleh karena itu, MTT (multi trip ticket) melakukan co-branding dengan ASEAN dan ini mengeluarkan kartu resmi MRT Jakarta dalam rangka transportasi ASEAN," ujar Tuhiyat.

Tuhiyat pun mengapresiasi semua pihak termasuk pemerintah yang telah memberikan dukungan terhadap keikusertaan MRT Jakarta dalam menyukses-

kan KTT ASEAN.

"Satu momen yang luar biasa menurut kami dan bangga MRT Jakarta terpilih sebagai official transport partners dalam rangka keketuaan ASEAN ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah men-support penuh sejak awal terkait dengan ASEAN dan khususnya MRT Jakarta," ucap Tuhiyat.

Dato' Nur Izzah Wong Mee Choo, Duta Besar Malaysia untuk ASEAN, yang ikut dalam rangkaian mengatakan bahwa ia telah penasaran untuk menaiki MRT sejak lama. Dato' Nur Izzah merasa istimewa karena bisa mencoba MRT pada Hari ASEAN.

"Saya merasa sangat terhormat untuk turut serta dalam acara ini. Hari ini merupakan pengalaman pertama saya untuk turun ke bawah dan menggunakan MRT. Saya tahu bahwa Halte Bundaran HI salah satu halte baru. Saya merasa sangat senang mendapat kesempatan ini, khususnya pada hari ulang tahun ASEAN," tuturnya.

Senada dengan Dato' Nur Izzah, Hjayceelyn M Quintana selaku Duta Besar Filipina untuk ASEAN mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan pertamanya mencoba MRT. Momen tersebut terasa lebih istimewa karena ia dapat menaikinya bersama dengan Presiden Jokowi dan bertepatan dengan hari ulang tahun ASEAN.

"Ini merupakan kesempatan pertama saya dan saya merasa sangat semangat dan merasa sangat terhormat bisa turut serta dengan Presiden Joko Widodo menaiki MRT untuk merayakan hari ulang tahun ASEAN," ungkapnya.

Duta Besar Filipina untuk ASEAN pun mengucapkan selamat atas ulang tahun ASEAN. Ia juga mendorong masyarakat untuk menggunakan MRT.

"Saya mengucapkan kepada warga negara anggota ASEAN, selamat hari ulang tahun ASEAN. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya harap kalian dapat untuk mencoba MRT," ungkapnya.

Apresiasi Pemimpin ASEAN

Para pemimpin ASEAN mengapresiasi keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Para pemimpin ASEAN menilai bahwa keketuaan Indonesia menghasilkan banyak capaian meski dalam situasi yang sulit.

"Semua leaders mengapresiasi keketuaan Indonesia. Banyak capaian meski di dalam situasi yang sulit. Tadi saya sampaikan komitmen beliau-beliau para pemimpin mengenai masalah persatuan, sentralitas, upaya untuk menjaga perdamaian, stabilitas diperkokoh kembali dan saya melihat komitmen itu menjadi makin kokoh pada saat pertemuan tadi," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Menurut Retno, para pemimpin juga menekankan pentingnya kerja sama untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan, dukungan terhadap implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Serta dukungan untuk memajukan ekonomi digital melalui

negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital atau Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Menlu juga menjelaskan, pada pertemuan Sesi Pleno KTT ke-43 ASEAN telah menghasilkan 11 dokumen yang diadopsi para pemimpin ASEAN. Pertama, ASEAN Concord IV untuk penyusunan Visi 2045. Kedua, untuk "ASEAN Matters", para pemimpin mengadopsi deklarasi mengenai ASEAN Human Right Dialogue.

"Ini adalah satu hal yang baru yang juga merupakan capaian Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler dan ini diadopsi oleh para leaders," ungkap Menlu.

Selain itu, diadopsi juga dokumen mengenai pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk ketahanan masyarakat ASEAN, perawatan dan pendidikan anak usia dini, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga, ketahanan berkelanjutan, serta perubahan iklim.

Selanjutnya, diadopsi juga dokumen mengenai Deklarasi Epicentrum of Growth, ketahanan pangan dan nutrisi dalam merespons krisis, Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital, dan kerangka ekonomi biru ASEAN.

"Blue economy framework ini juga merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa blue economy merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan," imbuh Menlu.

Dalam bidang kemaritiman, Indonesia juga mengembangkan agenda maritim antara lain disepakatinya ASEAN Maritime Outlook dan menjadikan ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan.

"Disepakati juga guidelines untuk mempercepat negosiasi CoC (code of conduct) di Laut China Selatan," pungkasnya.●

5 ARTIS TOLAK NYALEG

Banyak artis Indonesia saat ini memilih untuk terlibat dalam dunia politik. Mereka di antaranya merupakan artis muda seperti Verrell Bramasta dan Al Ghazali yang berani mencalonkan diri sebagai caleg.

Namun, ada juga artis-artis yang memutuskan untuk menolak tawaran dari partai politik untuk menjadi caleg. Alasan penolakan tersebut bervariasi, mulai dari ketidakpercayaan diri dalam memenuhi janji-janji politik, hingga kenyamanan dalam pekerjaan mereka sebagai figur publik.

Berikut adalah beberapa artis Indonesia yang menolak ajakan dari parpol untuk menjadi caleg.

1. JEREMY THOMAS

Jeremy Thomas, seorang aktor dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, memilih untuk tidak terlibat dalam dunia politik. Meskipun menerima banyak tawaran dari parpol, dia tetap setia pada kariernya di dunia hiburan yang telah dikenalnya sejak masa muda.

"Saya lebih fokus pada sektor swasta dan saya tidak memiliki ambisi besar untuk terlibat dalam politik," ungkap Jeremy Thomas.

Jeremy Thomas juga merasa senang melihat banyak figur publik lainnya yang memilih terlibat dalam politik. Ia berharap mereka dapat mewakili dan memperjuangkan hak-hak para pekerja seni dalam mencari keadilan.

"Saya berpikir bahwa jika rekan-rekan sudah siap, maka itu bagus. Saya percaya bahwa mereka ketika duduk di kursi DPR harus memperjuangkan profesi kami di dunia hiburan," tambah Jeremy Thomas.

Selain karier di dunia hiburan, Jeremy Thomas juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ia telah menyelesaikan gelar Magister Administrasi Bisnis (MAB) di Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB). Ilmu yang dimilikinya dari pendidikan tersebut ia terapkan dalam dunia bisnis.

Dengan berbagai pengalaman dan latar belakangnya, Jeremy Thomas tetap memilih untuk berkiprah dalam dunia hiburan dan bisnis daripada terlibat dalam dunia politik.

2. WENDY CAGUR

Wendy Cagur, seorang presenter dan komedian terkenal, telah membuat keputusan tegas untuk menolak ajakan menjadi seorang caleg.

Keputusan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa dirinya tidak memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang anggota partai politik.

"Alhamdulillah Insya Allah sih gue tetap di jalur entertaint saja di jalur komedi, karena memang gue ngerasa gue nggak punya kapabilitas ke situ. Memang selama ini berusaha untuk tetap berkarya," ungkapnya.

Selain alasan tersebut, Wendy juga mengakui bahwa dia memiliki ketakutan akan gagal dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Hal ini mendorongnya untuk lebih fokus pada kariernya sebagai seorang komedian.

"Yang pasti takut iya, karena takut nggak bisa bertanggung jawab ya,

karena itu kan ketika dipilih jadi wakil rakyat harus bisa jadi wakil rakyat sepenuhnya, bukan jadi tuannya rakyat," ujarnya dengan jujur.

Oleh karena itu, Wendy dengan tegas menutup pintu terhadap tawaran untuk terlibat dalam dunia politik. Dia ingin tetap fokus pada karier dan passionnya sebagai seorang komedian.

"Gue udah menutup pintu untuk Insya Allah bisa konsisten tetap di jalur gue entertain dan komedi aja," tegas Wendy.

3. RAFFI AHMAD

Raffi Ahmad telah mengungkapkan bahwa dia menerima banyak tawaran dari berbagai parpol untuk terlibat dalam dunia politik.

"Ya memang banyak kalau tawaran sih," katanya.

Ia dengan tegas menolak tawaran-tawaran tersebut dan menjelaskan alasan di balik keputusannya itu. Raffi Ahmad menyatakan fokus utamanya saat ini adalah mengurus bisnisnya, terutama proyek yang melibatkan RANS, yang merupakan perusahaan bersama dengan istrinya, Nagita Slavina.

Selain itu, dia juga memiliki beberapa pekerjaan lain yang sedang berjalan.

"Dalam situasi seperti sekarang, aku menolak tawaran-tawaran tersebut. Karena aku ingin fokus pada RANS terlebih dahulu, dan ada beberapa pekerjaan lain yang harus saya selesaikan," jelas Raffi Ahmad.

Dia juga membagikan pandangannya tentang berbagai jalur karir yang dapat diambil oleh setiap individu. Menurutnya, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam keluarga dan masyarakat.

"Ada yang memilih menjadi pengusaha, ada yang memilih jalur politik, dan ada yang mengejar bidang lain. Setiap keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda," ungkapnya.

Dengan keputusannya untuk tetap fokus pada bisnisnya saat ini, Raffi Ahmad menunjukkan bahwa ia memiliki prioritas yang jelas dalam hidupnya dan memilih untuk mengejar jalur yang sesuai dengan visi dan misinya saat ini.

4. AYU TING TING

Ayu Ting Ting mengungkapkan mengapa dia menolak tawaran untuk terlibat dalam dunia politik.

"Kalau mau, saya ada kali. Ada yang nawarin (nyaleg)," sebutnya.

Namun, bukannya menerima tawaran tersebut, Ayu Ting Ting justru memutuskan untuk menolak kesempatan untuk berkarier di dunia politik. Dia kemudian memberikan alasan mengapa dia memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.

Ayu Ting Ting merasa sudah sangat puas dengan penghasilan yang dia peroleh dari pekerjaannya di dunia hiburan Tanah Air.

Dia merasa bahwa karier di dunia hiburan telah memberikannya kehidupan yang cukup nyaman secara finansial. Selain itu, Ayu Ting Ting mengakui bahwa dia tidak memiliki latar belakang atau pengalaman apa pun dalam dunia politik.

Jika dia menerima tawaran tersebut, itu hanya akan menambah kerumitan dalam hidupnya.

"Saya mah kagak ngerti. Sudah, jangan deh. Jangan bikin repot hidup saya. Sudah, enggak ada. Saya lebih tenang begini," tegasnya.

Ayu Ting Ting juga merasa bahwa karier di dunia hiburan telah memberinya hasil yang memadai. Dia telah berhasil tidak hanya sebagai penyanyi dangdut, tetapi juga telah melibatkan dirinya dalam berbagai bidang, termasuk menjadi seorang presenter dan komedian.

"Kerjaan saya saja sudah banyak, bikin pusing. Saya nyanyi, ngelawak iya, ngehost iya, apa iya. Sudah, jangan dah," jelas dia.

Dengan demikian, Ayu Ting Ting memutuskan untuk tetap berfokus pada karier dan kehidupannya di dunia hiburan dan menolak untuk terlibat dalam dunia politik, meskipun ada tawaran yang datang.

5. WIKA SALIM

Penyanyi Wika Salim juga mengaku dapat tawaran dari beberapa partai politik untuk nyaleg dalam Pemilu 2024. Kendati demikian, tawaran tersebut rupanya tak membuat Wika tergoda.

"Duh, saya mah nyolok aja," katanya.

Pedangdut berusia 31 tahun ini mengaku belum waktunya untuk terjun ke dunia politik. Ia juga masih enjoy dengan pekerjaannya saat ini di dunia hiburan Tanah Air.

"Sudah ada beberapa yang nawarin, tapi sekarang sih belum kepikiran. Kan pikiran bisa berubah-ubah ya cuma sekarang belum, masih enjoy sama kerjaan sekarang," ujarnya.

PENDAFTARAN CAPRES DIPERCEPAT ELITE PARTAI HARUS GERAK CEPAT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mempercepat jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024. KPU juga hendak memperpendek durasi pendaftaran capres-cawapres.

Pendaftaran capres-cawapres awalnya dijadwalkan pada 19 Oktober–25 November 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun, dalam rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jadwal pendaftaran capres-cawapres berubah. Dalam lampiran Rancangan PKPU itu, dinyatakan bahwa tahapan pendaftaran capres-cawapres dibuka pada 10 Oktober dan ditutup pada 16 Oktober 2023.

Dengan demikian, KPU berencana mempercepat pendaftaran capres-cawapres sembilan hari dari jadwal sebelumnya. Durasi pendaftaran diperpendek dari awalnya 38 hari menjadi tujuh hari saja. Apabila rancangan PKPU tersebut disahkan, berarti pendaftaran capres-cawapres akan dimulai sekitar satu bulan lagi dari sekarang.

Dalam lampiran PKPU tersebut, dinyatakan bahwa tahapan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan capres-cawapres berlangsung mulai 10-25 Oktober 2023. Adapun penetapan capres-cawapres pada 13 November, sedangkan penetapan nomor urut pada 14 November 2023.

Dalam draf PKPU tersebut, syarat batas usia minimum capres-cawapres masih 40 tahun. "Saat ini berkenaan dengan pasal 169 UU Pemilu mengenai syarat usia minimal 40 tahun masih efektif berlaku dan itulah yang menjadi rujukan hukum kami (dalam membuat PKPU)," kata Komisioner KPU, Idham Holik, usai menggelar acara uji publik PKPU tersebut di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Senin, 4 September 2023.

Sebagai catatan, setelah menggelar uji publik, KPU harus mengonsultasikan rancangan PKPU tersebut kepada

lembaga pembentukan undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Artinya, masih ada kemungkinan ketentuan terkait jadwal pendaftaran capres-cawapres itu berubah sebelum akhirnya beleid tersebut ditetapkan.

Ihwal percepatan jadwal pendaftaran capres-cawapres, Idham Holik menerangkan, hal itu dilakukan karena jadwal pendaftaran harus disesuaikan dengan tahapan kampanye. Idham menjelaskan, tahapan kampanye Pemilu 2024 sudah ditetapkan akan dimulai pada 28 November 2023.

Sementara itu, dalam Pasal 276 ayat 1 UU Pemilu dinyatakan bahwa KPU harus menetapkan pasangan capres-cawapres 15 hari sebelum jadwal kampanye dimulai. Dengan demikian, penetapan pasangan capres-cawapres harus dilakukan pada 13 November 2023.

"Dari tanggal 13 November tersebut kami hitung mundur ke belakang, maka jatuh lah (jadwal pendaftaran capres-cawapres) pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023," kata Idham.

Karena itu, jadwal pendaftaran capres-cawapres 10-16 Oktober itu dimuat dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Idham menambahkan, ketika nanti draf PKPU itu disahkan, maka secara otomatis jadwal pendaftaran capres-cawapres yang tertera dalam PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak lagi berlaku.

"Otomatis (jadwal lama tidak berlaku) karena ada pasal peralihan dalam (rancangan) PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengakui, partainya dan partai koalisi akan memercepat proses penentuan calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan karena KPU memajukan dan memperpendek jadwal pendaftaran pasangan capres-cawapres Pilpres 2024.

"Kalau pendaftaran capres-cawapres dipercepat otomatis penentuan cawapres (pendamping Prabowo) pasti akan lebih cepat," kata Habiburokhman di Jakarta Pusat, Kamis, 7 September 2023.

Habiburokhman mengatakan, Partai Gerindra akan mengikuti jadwal Pilpres 2024 yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Dia juga menjelaskan bahwa penentuan cawapres pendamping Prabowo kini masih berlangsung. Dia membantah anggapan bahwa proses penentuan berlangsung alot. Menurutnya penentuan cawapres Prabowo berlangsung "rileks".

"Cawapres ini kan sosok yang penting karena bisa jadi game changer. Tentu kita nikmati keleluasaan waktu sampai batas akhir pendaftaran untuk mencari sosok (yang tepat)," kata Habiburokhman.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, juga tidak mempersoalkan rencana KPU yang ingin mempercepat proses pendaftaran capres dan cawapres.

Menurut Yusril, mesti ada perubahan peraturan perundang-undangan untuk bisa mempercepat tahapan pendaftaran capres-cawapres tersebut. "Ini keputusan KPU sendiri. Mesti ada perubahan peraturan perundang-undangan. Kalau kita siap saja," kata Yusril di Padang, Sabtu, 9 September 2023.

Yusril menyebut, sebagai bagian dari koalisi pendukung bakal capres, Prabowo Subianto, PBB akan membantu persiapan dan kelengkapan berkas persyaratan yang akan dibawa Prabowo untuk mendaftar jadi capres. Supaya tidak ada persoalan teknis yang menghalangi Prabowo saat mendaftar.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyatakan, rencana KPU mempercepat jadwal pendaftaran capres-cawapres tidak akan mempengaruhi proses penentuan sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

"Bagi PDIP, mau dimajukan (jadwal pendaftaran) apa segala macam, menurut saya tidak terlalu berpengaruh, ya. Tidak berpengaruh dalam penentuan cawapres," kata Masinton.

Masinton menjelaskan, percepatan itu tidak berpengaruh karena proses penentuan cawapres pendamping Ganjar sudah berjalan. Hanya tinggal menunggu waktu untuk memutuskan dan mengumumkan sosok yang akan menjadi pendamping mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Tinggal mencari timing yang tepat hasil dari proses musyawarah kerja sama antara partai politik, kemudian mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan. Menurut saya, tidak masalah percepatan jadwal pendaftaran," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga mengatakan, partainya akan mengikuti jadwal pendaftaran capres-cawapres yang ditetapkan KPU.

"Pada dasarnya, PDI-P mengikuti penetapan yang ditetapkan oleh KPU. Kalau KPU menetapkan pendaftaran misalnya tanggal 10, ya kami akan mengikuti pendaftaran dari tanggal 10-16 tersebut," kata Hasto.

Hasto menyampaikan, partainya taat asas dan memegang etika politik sehingga mengikuti aturan KPU. "Ketika kami bekerja sama, kami tidak pernah meninggalkan, kami tidak pernah mengkhianati. Itu yang dilakukan PDI-P," imbuh dia.

Sementara itu, Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengaku pihaknya siap jika pendaftaran pasangan capres-cawapres dipercepat. Menurut dia, pihaknya sudah mempersiapkan semua hal mengenai pendaftaran paslon itu. Terlebih, Anies sudah memiliki bakal cawapres yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

"Kami dalam hal ini peserta pemilu, tentu saja akan ikut apapun yang diatur sepanjang itu rasional. Jadi kita akan ikuti aturan dari penyelenggara," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat, 8 September 2023.

Meski begitu, ia mengakui, masuknya PKB ke dalam barisan koalisi, turut memperpanjang persiapan tersebut. "Tapi, (itu) bukan masalah besar," imbuh dia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga setuju pendaftaran pasangan capres-cawapres dipercepat menjadi 10-16 Oktober 2023. Dia menilai, dipercepatnya tahapan pendaftaran tersebut supaya tidak terlalu lama bertengkar perihal penentuan pasangan capres dan cawapres.

Dengan dipercepatnya waktu pendaftaran ini, partai politik peserta pemilu kini hanya memiliki waktu enam hari untuk mendaftarkan calonnya. Menurut Mahfud, waktu enam hari sudah cukup untuk menjalani pendaftaran.

"Enam hari saja, ngapain ribut-ribut, calon tukaran (ribut) terus, ribut, percepat. Coblosannya tetap, tanggal 14 Februari (2024)," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, KPU bersama Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu duduk bersama. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan atas usulan percepatan pendaftaran pasangan capres dan cawapres.

"Saudara, ini draf karena keputusan perubahan hanya perlu kesepakatan antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, ini saja ngobrol, ketemu, kalau ditunggu juga ini enggak ada kerjaan, 22 hari terbuang. Ini ngapain," tegas Mahfud.

Pengamat sekaligus pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, mengaku dapat memahami jadwal pendaftaran capres dan cawapres yang rencananya dimajukan.

"Saya bisa memahami pendaftaran paslon yang dipercepat mengingat adanya ketentuan baru," ujar Titi, Sabtu, 9 September 2023.

Ketentuan baru itu tertuang dalam Pasal 276 ayat (1) UU 7/2023 yang menyebut kampanye pilpres dimulai 15 hari setelah penetapan paslon. Pengaturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Dalam UU 7/2017 kampanye diatur mulai 3 hari setelah penetapan paslon.

"Maka, secara teknis kalau kemudian jadwal pendaftaran dimajukan hal itu menjadi sesuatu yang bisa dimengerti," jelasnya.

Apabila kampanye pemilu tetap akan dilakukan pada 75 hari sebelum hari pemungutan suara, atau tepatnya 28 November 2023 sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2022, maka paslon harus sudah ditetapkan pada 13 November 2023. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya di mana calon tetap pilpres baru akan ditetapkan pada 25 November 2023.

"Tentu saja penyesuaian jadwal akibat pengaturan baru dalam Pasal 276 ayat (1) UU 7/2023 yang merupakan pengesahan atas Perppu 1/2022, memerlukan penyesuaian pula dengan jadwal pendaftaran dan penetapan paslon tetap dalam pilpres," tandas Titi. ●

MAKAN

Gunawan Effendi

Makan memang penting. Malah sudah ada gagasan --untuk tak menyebutnya kampanye: jika salah satu kandidat calon presiden terpilih pada Pemilihan Umum 2024, maka akan ada program makan gratis.

Belum jelas memang bagaimana rincian program makan gratis itu. Apakah melalui semacam soup kitchen, terjemahan bebasnya dapur umum, atau dengan cara lain. Kita mengenal dapur umum jika terjadi bencana. Lebih jauh lagi, dapur umum juga dikenal di masa awal kemerdekaan, pertengahan Abad XX.

Di tataran global pada Abad XXI, popularitas soup kitchen Kembali marak di Amerika Serikat dan Eropa menyusul kenaikan harga pangan yang menunjukkan kecenderungan melonjak sejak akhir 2006. Permintaan layanan dapur umum meningkat seiring resesi global antara 2007-2009 yang memperburuk kondisi ekonomi warga berpenghasilan rendah. Di sebagian besar wilayah Inggris dan Eropa, permintaan semakin meningkat setelah diberlakukannya kebijakan ekonomi berbasis penghematan pada 2010.

Para pegiat pekerja sosial bidang kemiskinan di Inggris, misalnya, sudah menyimpulkan pada 2017 bahwa situasi dan kebutuhan akan bantuan pangan darurat di negeri itu telah berubah secara signifikan selama 15 tahun terakhir. Berarti sejak awal Abad XXI. Perubahan itu terjadi seiring dengan meningkatnya biaya hidup dan hilangnya jaring pengaman sosial. Menurut dia, krisis pangan yang sebelumnya masih dapat ditangani oleh dapur umum dan gereja maupun lembaga amal keagamaan, meningkat terus karena kemiskinan pangan berlangsung secara kontinyu meskipun ekonomi mulai pulih.

Selanjutnya, memang bukan sekadar mencukupi pangan, melainkan juga untuk memenuhi standard pertumbuhan tubuh manusia sejak dini. Pada titik ini kita mengenal pertumbuhan panjang tubuh bayi dan tinggi badan anak-anak yang berada di bawah standard ketetapan organisasi kesehatan dunia (World Health Organization, WHO) dikenal sebagai stunting.

Stunting di Indonesia ada yang menerjemahkannya sebagai kerdil Namun, ada istilah dari bahasa Jawa, kuntet dan tengkes. Tengkes tampanya lebih pas sebagai padanan stunting dibandingkan dengan kuntet yang kerap digunakan sebagai bahan ejekan.

Jika sudah terkait dengan tengkes, maka makan melekat dengan persoalan kecukupan gizi. Di Indonesia, negara langsung turun tangan menanganinya melalui kementerian dan lembaga. Tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada awal September 2023, misalnya, pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting tahap ke 2 hingga akhir tahun. Tentu saja ini berkaitan dengan jaring pengaman sosial dan penanganan tengkes. Jadi, bukan sekadar makanan pokok yang lebih banyak mengandung karbohidrat, melainkan melibatkan pula protein dalam bentuk telur. Dampak ekonominya juga untuk menampung produksi berlebih unit usaha ternak ayam petelur dan menstabilkan harga produknya.

"Hari ini juga kita luncurkan bantuan tahap kedua untuk penanganan stunting. Tadi kita mulai dari Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten dan Kota Bogor, tepatnya di Desa Babakan Dramaga dan Kelurahan Katulampa, Bogor Timur. Setelah launching ini akan dilaksanakan penyaluran di tujuh provinsi segera," ujar Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan, usai mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau stok beras dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Dramaga dan Kelapa Gading, Senin, 11 September 2023.

ID FOOD adalah BUMN induk (holding) di bidang pangan. Jadi, di acara itu tampak juga Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Joko Widodo. Apakah terkait dengan upaya memikat hati pemilih menjelang Pemilu 2024? Jawabannya bisa multitafsir.

Kalaupun memang ada kaitannya atau mengarah ke kampanye, tetap saja lebih baik memikat pemilih dengan pangan dan gizi. Benar-benar pangan bergizi, konkret. Bukan gizi dalam konteks politik kita yang kerap bermakna dana tunai tanpa pertanggungjawaban. ●

SUPER GARUDA SHIELD 2023 YANG ISTIMEWA

Meski hanya latihan perang, Garuda Shield semakin penting. Tambahan Super mencerminkannya.

Inilah latihan perang terbesar di kawasan Indopasifik. Indopasifik adalah terminologi geopolitik yang mengacu pada kawasan Samudera Pasifik yang berdekatan dengan daratan anak benua India, dibandingkan dengan benua Amerika.

Samudera Pasifik membentang dari barat benua Amerika hingga pesisir timur benua Asia dan Australia. Bertetangga dengan Samudera Hindia. Tentu saja ini perspektif geopolitik Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

Nah nama latihan perang terbesar di Indopasifik itu adalah Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield (Latgabma SGS) 2023. Gabungan merujuk pada matra yang mengikutinya, darat, laut, udara. Bersama menunjukkan keterlibatan berbagai negara dalam latihan itu.

Sebenarnya latihan perang tahunan itu sudah berlangsung sejak 2009. Indonesia dan Amerika Serikat yang menginisiasinya terlihat dari nama Garuda dan Shield (perisai).

Dari tahun ke tahun latgab itu melibatkan semakin banyak tentara dari berbagai negara di kawasan. Kawasan Indopasifik tentunya.

Karena itulah sejak 2022, namanya menjadi Latgabma SGS. Latgabma SGS pertama berlangsung di kawasan Sumatera. Antara lain di Puslatpur Baturaja, Perairan Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Daerah Latihan Kodam VI/Mulawarman, Amborawang, Kalimantan Timur, dan Bandara Sultan Mahmud Baharuddin, Palembang, dan kawasan lain di Sumatera Selatan.

Kali kedua Latgabma SGS 2023, berlangsung di Jawa Timur. Kawasan Latgabma SGS 2023 mencakup antara lain Surabaya, Pantai Banongan-Situbondo, dan berakhir di Banyuwangi.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama Commanding General I Corps US Army Lieutenant General Xavier T. Brunson secara langsung membuka Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield (Latgabma SGS) 2023 yang berlangsung di lapangan Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) 5 Marinir Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis, 31 Agustus 2023. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama Mabes TNI dan sejumlah Pangkotama dari 3 matra TNI diantaranya adalah Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han, M.H. 31 Agustus 2023.

Super Garuda Shield 2023 merupakan Latihan Gabungan Bersama tahunan antara TNI dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM) yang juga melibatkan negara-negara satu kawasan. Latihan bersama SGS 2023 terjadwal berlangsung selama 14 hari, dimulai pada 31 Agustus hingga 13 September 2023 dengan mengerahkan ribuan prajurit TNI maupun tentara asing dari negara sahabat yang ada di kawasan Indopasifik di antaranya Indonesia, Amerika Serikat (US), Australia, Jepang, Singapura, Inggris, dan negara pengamat dari Inggris, Singapura, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Perancis, Jerman, Filipina, Korea Selatan, dan Timor Leste.

Panglima TNI dalam sambutannya

menyampaikan bahwa Latgabma SGS 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral antarmiliter dan hubungan militer yang positif, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi gabungan, prosedur staf memanfaatkan kemampuan kodal dari fungsi gabungan yaitu Mabes Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Koopssus TNI. Latihan ini memberikan dampak positif dalam peningkatan interoperability TNI dan US Indopacom dalam hal kapasitas untuk merencanakan operasi gabungan bersama.

Materi Latgabma SGS tahun 2023

> Kami [TNI] sangat senang bisa menyelenggarakan STAFFEX Super Garuda Shield 2023 di Surabaya

terdiri dari Staff Exercise (materi mengenai prosedur pengambilan keputusan kepemimpinan dan perintah operasi), dan Special Operation Force (materi mengenai aktivitas Military Free Fall Infiltrasi dan Air Assault yang dilaksanakan oleh Indonesia, US, Jepang dan Australia). Berbagai alutsista akan diterjunkan dalam Super Garuda Shield tahun 2023 ini, diantaranya adalah Himars, Astros, RM 70 Vampire, Meriam 105/M119/Kh178/Lg1, Apache, F-16, Leopard/Abram, Javeline/Instalansa/C90, Mortir 60, Mortir 81, Machine Gun, Ss2V4, Rantis Atav, F - 16, C-130 Hercules, LPD/LST, Tank, Ranpur Lvt - 7, HOW 105, MLRS, Grader, Oplager, Bell 412, Arv.

"Kepada teman-teman, mitra dan sekutu di lapangan, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada pemerintah dan rakyat serta militer Indonesia," kata Letjen Xavier Brunson, Panglima Korps I Angkatan Darat AS. "Terima kasih telah menerima kami di Indonesia, di Super Garuda Shield ini, dan terima kasih kepada negara-negara yang berpartisipasi dan memperhatikannya."

Upacara pembukaan Surabaya di Warfighting Center KOARMADA II dimeriahkan oleh pidato Mayjen AS Jered P. Helwig, Panglima Komando Keberlanjutan Teater 8 yang bermarkas di Hawaii dan Laksamana TNI-AL Edi Haryanto, Komandan Guspurla KOARMADA II. Latihan STAFFEX yang berbasis di Surabaya melibatkan pelatih militer AS dari Garda Nasional Hawaii, seluruh cabang militer TNI, serta angkatan bersenjata Australia dan Inggris.

"Kami [TNI] sangat senang bisa menyelenggarakan STAFFEX Super Garuda Shield 2023 di Surabaya," kata Laksamana TNI Edi Haryanto. "Tema latihan selama dua minggu ke depan akan fokus pada perencanaan transisi dalam operasi pertahanan."

Peserta Surabaya akan meningkatkan pemahaman proses perencanaan bersama dan fungsi staf, Komando dan Pengendalian bersama, penentuan kebutuhan akhir sumber daya logistik dan tenaga kerja, serta pengembangan konsep Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan).

"Super Garuda Shield merupakan latihan militer terbesar Amerika Serikat dengan Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral Amerika-Indonesia melalui perencanaan, pelatihan, dan latihan bersama," ujar Mayjen Helwig.

Selama 10 tahun terakhir, Prajurit Garda Nasional Hawaii dan Penerbang/

wanita telah bertukar pengetahuan luas tentang perencanaan militer dengan TNI, yang diperoleh dari upaya Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Bencana (HADR) selama bertahun-tahun melalui Program Kemitraan Negara (SPP). Garda Nasional Hawaii membawa spektrum pengalaman luas yang diperoleh dari beberapa tahun terakhir dan telah membentuk "J-Staffs" untuk merespons operasi domestik dunia nyata baru-baru ini seperti letusan gunung berapi, banjir, COVID-19, dan saat ini, Respons Kebakaran Hutan Lahaina di Hawaii.

Melihat skala dan jangka waktu latihannya, sudah pasti perencanaan SGS ini berlangsung jauh hari sebelumnya. Paling tidak, sejak Februari 2023 pembahasan sudah dilakukan. "Sudah dibicarakan dengan asops (Asisten Operasi) Panglima TNI, akan kita laksanakan," ujar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai Rapim TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023.

Panglima menjelaskan pula, TNI akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat terkait penerapan atau materi dalam Latma Super Garuda Shield 2023. Alasannya, Super Garuda Shield awalnya merupakan kerja militer antara Indonesia dan AS dalam bentuk latihan bersama.

"Nanti kita selaraskan kalau memang dia ada, yo ayo. Cuma saya kepenginnya tidak ketemu seperti passing exercise itu. Hanya ketemu terus latihan, tidak. Tapi, ada program perencanaannya, ada program prioritasnya," kata Yudo Margono.

"Perencanaanya ini operasi apa, gabungannya ini gabungan apa, tidak ujug-ujug (tiba-tiba) langsung datang, ketemu ramai-ramai, selesai, bukan. Jadi kita rencanakan dari awal," ungkapnya.

Evaluasi itu, menurut Yudo, termasuk negara mana saja yang akan dilibatkan dalam Latma Super Garuda Shield 2023. "Nanti akan dievaluasi lagi oleh Panglima. Mana negara-negara yang terlibat, materinya apa akan disampaikan," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Sejak awal pula terbetik informasi Tentara AD Jepang ingin mengerahkan pasukan lintas udara dan amfibi dalam latihan gabungan Super Garuda Shield 2023. Keinginan Jepang itu disampaikan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide saat membahas kerja sama militer hingga penanggulangan bencana dengan Dudung di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo.

> Ini sangat penting. Bahasa diplomasinya strength our relationship. Ini yang paling utama.

"AD Jepang berharap dapat meningkatkan partisipasinya di Latma Super Garuda Shield 2023 dengan melibatkan pasukan lintas udara dan amfibinya," kata Yoshida dalam siaran pers Dinas Penerangan AD. Pada Latma Super Garuda Shield 2022, AD Jepang juga ikut bergabung dengan melibatkan pasukan lintas udara.

Alhasil, dalam latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 10 September 2023, ribuan prajurit dari Indonesia, AS, Inggris, Australia, Jepang dan Singapura pun menunjukkan kemampuan tempur mereka. Dalam operasi pendaratan amfibi itu, TNI Angkatan Laut mengerahkan sekitar 700 prajurit dari Korps Marinir.

Operasi diawali dengan manuver pesawat-pesawat jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Juga serangkaian teknik

pengeboman atau bomb burst, dan penghancuran sasaran melalui udara.

Kemudian dua jet tempur F-16 beraksi, perebutan wilayah pun dimulai. Sepuluh kendaraan tempur Korps Marinir TNI AL, termasuk beberapa tank LVT-7 dan kendaraan amfibi pengangkut artileri (KAPA) K-16 keluar dari kapal landing ship tank (LST), yang kemudian langsung bergerak menuju Pantai Banongan.

Begitu kendaraan tempur itu mencapai daratan, ratusan prajurit langsung keluar untuk menguasai pantai. Kebanyakan mereka dilengkapi dengan senjata artileri dan peluncur roket.

Kendaraan tempur Kavaleri Korps Marinir TNI AL bersama Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF), United States Marine Corps (USMC) dan Singapore Army serta unsur-unsur tempur yang tergabung, melakukan serbuan operasi pendaratan amfibi di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Minggu, 10 September 2023.

Mendarat gelombang pertama unsur tank amfibi kendaraan tempur Tank BMP 3F, disusul mendarat gelombang ke dua unsur kendaraan pendarat amfibi LVT-7 A1 mendaratkan pasukan Infanteri, guna menguasai pantai yang dikuasai oleh musuh dan KAPA K61 mengangkut Meriam Howitzer 105 mm ke pantai pendaratan.

Puncak dari Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield 2023 pun menuntaskan operasi pendaratan amfibi TNI dan INDOPACOM plus pasukan negara-negara satu kawasan. Kantor berita Associated Press melaporkan saat pasukan Indonesia mengerahkan dua tank tempur Leopard-2, pasukan Australia mengirim lima tank tempur jenis A1A1 Abrams.

Ini merupakan pertama kalinya Australia mengerahkan tank-tank tempur di luar wilayahnya sejak Perang Vietnam. Operasi perebutan pantai itu berlangsung selama sekitar satu jam, dan diakhiri dengan mendaratnya dua kapal landing craft air cushion (LCAC) Angkatan Laut AS.

Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir Kolonel Mar Muhammad Rizal mengatakan, "Latihan gabungan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Korps Marinir TNI AL, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral antara militer dan membangun hubungan militer yang positif. Selain itu, sambungnya, latihan juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan melaksanakan fungsi gabungan, prosedur staf memanfaatkan kemampuan kodal dari fungsi gabungan antar matra Angkatan Darat, Laut, Udara dan Koopssus TNI.

Di atas KRI Surabaya, Komandan Satuan Tugas Latihan Amfibi TNI AL Laksamana Pertama Tunggul menjelaskan, selama sekitar sepekan peserta sudah melakukan tahapan harbor face, tahapan yang lebih ke persamaan persepsi terhadap segala yang akan kita lakukan selama manuver lapangan.

Tunggul mengatakan perbedaan doktrin setiap negara dan keragaman alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi tantangan tersendiri. Ia berharap latihan gabungan ini tidak saja membuat semua prajurit memahami secara teknis piranti tempur yang digunakan, tetapi juga membangun dan mempererat hubungan militer antara negara yang terlibat.

"Ini sangat penting. Bahasa diplomasinya strength our relationship. Ini yang paling utama," ujar Tunggul.

Sedangkan Komandan Pasukan Pendaratan Korps Marinir, Letnan Kolonel Marinir Mintarjo mengatakan para peserta bisa mengatasi kesulitan meski beda negara dan bahasa. "Di lapangan, ini semua berhasil kami atasi," ujarnya.

Semoga sukses sampai akhir latihan. Juga lebih baik pada tahun berikutnya.●

SILAKAN COBA RANSUM TNI

Perang selalu menyediakan pengalaman baru, meski hanya dalam latihan. Termasuk soal logistik, khususnya ransum makanan tentara.

Begitulah. Sebagai tuan rumah Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield 2023, Tentara Nasional Indonesia menyediakan ransum makanan bagi para tentara yang berasal dari 19 negara. Baik yang terlibat aktif maupun para peninjau.

Seperti apa ransum makanan standard prajurit TNI yang disediakan dalam Latgabma SGS 2023? Dikemas dalam satu paket, namanya adalah Naraga Plus berisi tiga eprokal, dua biskuit, dan dua menu utama, yaitu nasi ayam dan nasi daging.

Apabila ingin mengkonsumsi menu utama nasi, perlu terlebih dahulu memanaskannya dengan kantong pemanas ransum yang juga sudah disiapkan di dalam kemasan. Cara menggunakannya dengan memasukan ransum ke dalam kantong dan isi air.

Lalu, tutup klip hingga rapat dan kantong akan menjadi panas, biarkan selama kurang lebih 12 menit, keluarkan ransum dari kantong pemanas dan ransum siap dikonsumsi.

Metode ini diterapkan agar para prajurit dapat tetap mengkonsumsi makanan panas dan tetap menjaga kerahasiaan tanpa perlu membuat api yang tentunya akan sangat berbahaya ketika berada dalam sebuah operasi tempur yang rawan akan deteksi pihak lawan.

Menu utama nasi daging dan nasi ayam mengandung nilai gizi energi total 600 kkal, lemak total 25 g, lemak jenuh 5 g, protein 27 g, karbohidrat total 67 g, serat pangan 6 g, gula 2 g, garam (natrium 1340 mg).

Sedangkan Eprokal yang mengand-

ung glutathione dan zinc gluconate, mengandung alergen : susu, serealia dan kedelai. Sementara itu nilai gizi energi total 190 kkal, lemak total 7 g, lemak jenuh 3.5 g, protein 4 g, karbohidrat total 26 g, serat pangan 3 g, gula 3 g, garam (natrium 160 mg).

Menu ini telah diriset dan didesain sedemikian rupa untuk memastikan kebutuhan prajurit dalam sehari. Kemasan yang kompak juga akan memudahkan ransum ini dibawa selama operasi tempur.

Negara yang mengirim pasukan peserta latihan adalah tuan rumah Indonesia, kemudian Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, Perancis, dan Inggris. Pasukan yang dikirimkan tentu akan mencicipi ransum standard TNI itu dalam latihan yang berlangsung sekitar dua pekan.

Toh para peninjau yang melakukan observasi dari Brasil, Brunei, Kanada, Jerman, India, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, dan Timor Leste, juga dapat mencicipinya. Apalagi warga sipil di Indonesia yang ingin mencobanya juga bisa.

Berbagai marketplace dalam jaringan internet ternyata sudah menawarkannya. Salah satu penjual ransum di dunia maya mengatakan, produk yang mereka jual berasal dari personel aktif TNI yang melego persediaan ransumnya.

Toh hanya personel militer aktif bisa mendapatkan jatah ransum. Jika diperhatikan, ransum yang dibeli secara online biasanya tinggal punya waktu beberapa hari sebelum benar-benar kedaluwarsa. Ransum-ransum itu menurut TNI sebetulnya dirancang supaya tahan disimpan hingga satu tahun.

Nah, siapa yang gemar membeli ransum itu. Banyak ragamnya. Mulai dari para pendaki gunung, mahasiswa yang anggarannya minim, hingga istri yang malas memasak untuk keluarganya.

Apapun, bagaimana dengan tanggapan para personel militer yang mengikuti Latgabma SGS 2023 yang mencicipi ransum TNI itu?

"Biskuitnya enak, rasanya seperti ginger snack, sedangkan rasa nasinya tidak terlalu pedas dan enak. Saya senang makanan pedas," kata SPC (Specialist, setara dengan tamtama junior) Shannon Spiers, personel dari 25th Infantry Division, Amerika Serikat. Menurut dia, kemasan kotak Naraga Plus dan Eprokal Plus yang berisi makanan, gelas dan sendok, sangat bagus, dan tertata bagus.

"Ransum Naraga Plus ini sangat tepat dimakan saat latihan di hutan. Dengan komposisi yang tepat, maka tenaga tubuh dapat pulih dan sangat mengenyangkan apabila dikonsumsi dengan perut yang lapar," tambah Spiers.

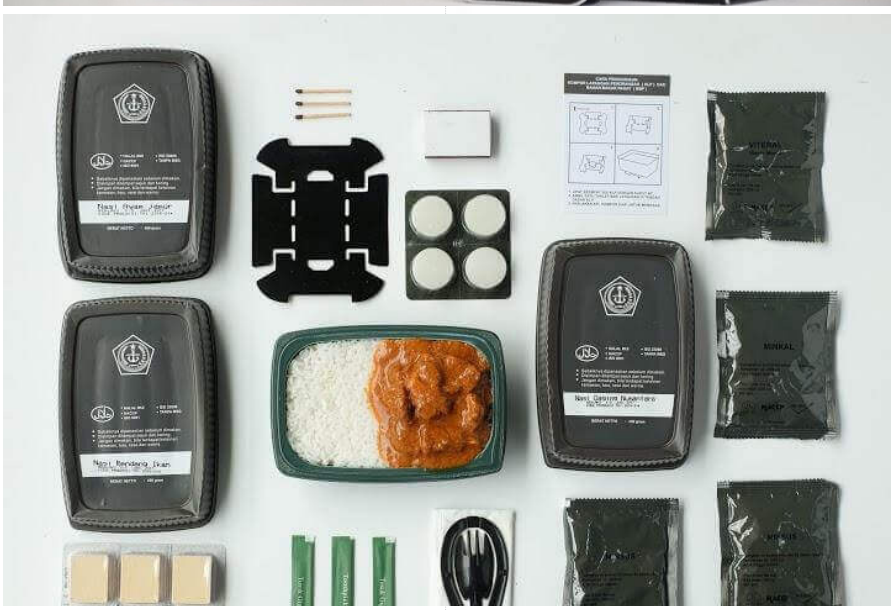

Lain lagi dengan pendapat Sergeant Kanematsu peserta Super Garuda Shield 2023 dari Jepang. "Menu utama nasi daging ini rasanya seperti japanese rice bowl, the meat is very tasty, ini sangat enak sekali," kata Kanematsu yang berdinas di Japan Ground Self-Defence Force.

Mungkin ada juga yang bertanya, siapa produsen ransum TNI itu? Jawabnya, PT Jangkar Nusantara Megah (PT JNM) di Surabaya. Pada 1981 JNM mulai melakukan riset dan pengembangan ransum yang halal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan personel TNI. Bahan baku JNM sebagian besar merupakan hasil produksi dalam negeri.

JNM juga memiliki impian untuk dapat turut meningkatkan devisa negara melalui pengembangan ekspor non migas. Selain itu Komisaris Utama JNM juga berharap kepada Menhan agar para atase pertahanan Indonesia yang ada di luar negeri dapat turut mengembangkan dan memasarkan industri ransum halal produksi PT. JNM, melalui pelbagai media informasi dan promosi yang disampaikan sehingga tercapai balance and trade untuk menguntungkan kedua pihak yang menjalin kerja sama strategis.●

DALAM KONTEKS GEOPOLITIK LAUT CHINA SELATAN

Persepsi itu memang tak terelakkan. Latgabma SGS 2023 berada dalam konteks geopolitik persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Puncak latihan itu dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta kepala staf tiga matra. Yudo bersama Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo turut menyaksikan pendaratan amfibi oleh prajurit Korps Marinir TNI AL dari menara pandang.

Dari kejauhan para petinggi TNI itu dapat melihat pelaksanaan latihan pendaratan amfibi Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 10 September 2023. Usai pendaratan amfibi, mereka didampingi Komandan Jenderal 8th Theater Sustainment Command US Army Pacific Mayjen Jered Helwig meninjau kapal Landing Craft Air Cushion (LCAC) milik US Navy yang juga ikut mendarat di Pantai Banongan.

"Karena ini yang pertama secara besar, ini akan jadi evaluasi untuk ke depannya. Maka para kepala staf kami ajak datang bersama untuk mengawasi semuanya," kata Yudo usai meninjau kapal LCAC.

LCAC adalah kelas kapal pendarat berbantalan udara (hovercraft) yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF). Perangkat canggih ini mengangkut sistem persenjataan, peralatan, kargo dan personel dari kapal ke pantai dan melintasi pantai. Belakangan AS mengembangkan perangkat yang lebih tinggi kapasitasnya, dikenal dengan nama Ship-to-Shore Connector (SSC).

Pertama kali beroperasi pada 1987 di atas kapal USS Germantown, LCAC hingga kini dioperasikan di semua kapal dek amfibi Angkatan Laut AS. Jumlah LCAC rupanya terbatas hanya 91 unit. Sejumlah 17 unit antaranya telah dipreteli atau berhenti beroperasi karena alasan biaya, dua disimpan untuk penelitian dan pengembangan, dan 36 digunakan di setiap pantai di Little Creek, Virginia dan Camp Pendleton, California.

Delapan peralatan penyapu ranjau mulai melengkapi LCAC antara 1994–1995. Selanjutya, program perpanjangan umur layanan (SLEP) diterapkan dari 20 menjadi 30 tahun untuk 72 LCAC aktif yang tersisa pada 2000 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2018. Namun ternyata, dalam Latgabma SGS 2023 LCAC masih beroperasi.

Perangkat ini beroperasi dengan lima awak. Selain pendaratan di pantai, LCAC menyediakan transportasi personel, dukungan evakuasi, pelanggaran jalur, operasi penanggulangan ranjau, dan pengiriman peralatan kelautan dan perang. Keempat mesin utama semuanya digunakan untuk menggerakan daya dan semuanya digunakan untuk penggerak utama.

LCAC juga masih dapat beroperasi dengan dua mesin. Alat transportasi laut ini dapat menampung 180 pasukan lengkap.

Sedangkan kapasitas kargo LCAC adalah 1.809 kaki persegi (168,1 m2). LCAC mampu membawa muatan 60 ton (hingga 75 ton dalam kondisi kelebihan beban), termasuk satu tank M-1 Abrams, dengan kecepatan lebih dari 40 knot. Kapasitas bahan bakar 5000 galon. LCAC menggunakan rata-rata 1000 galon per jam. Pertimbangan manuver termasuk memerlukan jarak 500 yard atau lebih untuk berhenti dan radius putar 2000 yard atau lebih. Jalur haluan memiliki lebar 28,8 kaki (8,8 m) sedangkan jalur buritan lebarnya 15 kaki (4,6 m). Tingkat kebisingan dan debu tinggi pada perangkat ini. Belum lagi cipratan yang dapat mengganggu penglihatan pengemudinya.

Usai meninjau LCAC, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta para prajurit TNI tidak minder dengan kekuatan militer lain negara lain. Lak-

samana Yudo mengatakan, prajurit TNI, baik matra darat, laut, dan udara, sering melakukan latihan dengan Amerika Serikat, Australia, hingga Singapura.

"Hampir semua negara besar, kita sudah melaksanakan (latihan), sehingga kalau level tentara, selalu saya sampaikan bahwa kita sudah selevel dengan mereka. Jadi para prajurit tidak perlu merasa kita di bawah, karena kita sudah selevel," katanya.

Ia menjelaskan, penilaiannya itu selaras dengan undangan yang diterima TNI jika ada latihan multilateral dari negara asing. "Berarti dengan penilaian seperti itu, level yang sama dengan mereka. Jadi enggak perlu melatih, tinggal memantapkan saja tergantung kolaborasi lebih dari satu negara," ujar Yudo Margono.

Toh Panglima TNI mengakui, untuk Latgabma SGS 2023, masih banyak kekurangan dari pelaksanaannya. Antara lain negara-negara peserta tidak memiliki doktrin pertempuran yang sama.

"Ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita sempurnakan, karena kita maklumi, tidak semua negara akan memiliki doktrin yang sama," ungkap Yudo.

Panglima menyebutkan, kekurangan itu bakal menjadi evaluasi dalam pelaksanaan Super Garuda Shield pada tahun-tahun selanjutnya. "Harapan kami nanti ke depan, karena pelaksanaannya di Indonesia dan tentunya Indonesia yang akan memimpin untuk menyamakan doktrin ketika operasi," kata Yudo.

Untuk itu, Yudo mengatakan bahwa pelaksanaan Staff Exercise (Stafex) Super Garuda Shield 2024 akan digelar pada awal tahun depan. "Kita kumpulkan agar betul-betul staf ini merencanakan latihan dengan baik," ucap Yudo.

Meski bagaimana, SGS 2023 merupakan yang terbesar yang dilakukan antara militer AS dan Indonesia sejak 2007, dan merupakan pilar utama hubungan keamanan kedua negara. Nama "Super" ditambahkan ke judul latihan tahun lalu, ketika diperluas untuk mencakup sejumlah peserta baru, termasuk Jepang.

Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar AS di Indonesia menggambarkan latihan tersebut sebagai "demonstrasi solidaritas multilateral yang kuat untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka."

"Super Garuda Shield 2023 merupakan kelanjutan dari kesuksesan luar biasa tahun lalu," Jenderal Charles Flynn, Panglima Angkatan Darat AS di Pasifik, sebagaimana pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta.

"Latihan gabungan multinasional ini menunjukkan komitmen kolektif dan kesatuan pemikiran kita, memungkinkan terciptanya Indo-Pasifik yang stabil, aman, dan lebih damai, bebas, dan terbuka," sambung Jenderal Flynn

SGS 2023 mencakup pula pertukaran akademis dan lokakarya pengembangan profesional, simulasi komando dan kontrol, latihan amfibi, operasi lintas udara, latihan perebutan lapangan udara dan gabungan pelatihan lapangan gabungan yang akan diakhiri dengan acara tembak-menembak.

Toh SGS 2023 berlangsung dengan latar belakang meningkatnya ketegangan di kawasan maritim Asia, ketika ketegangan AS-Tiongkok meningkat terkait Taiwan dan eskalasi perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara yang memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan.

Sebagai contoh, dari Januari hingga September 2023, telah terjadi sejumlah konfrontasi antara kapal Tiongkok dan Filipina di Kepulauan Spratly, serta serangan Tiongkok ke perairan yang diklaim oleh Vietnam. Peristiwa terbaru terjadi pada 28 Agustus 2023, ketika kapal Penjaga Pantai Tiongkok

dilaporkan menembakkan meriam air bertekanan tinggi ke kapal nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel, yang diduduki oleh Tiongkok tetapi diklaim oleh kedua negara.

Indonesia tidak terlalu terkena dampak langsung dari sengketa maritim ini, meskipun pernah mengalami perselisihan dengan Tiongkok di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang sebagian wilayahnya terbagi oleh klaim maritim "sembilan garis putus-putus" yang luas dari Beijing yang sudah dikenal sejak Abad XX.

Garis putus-putus ditampilkan pada peta resmi yang dikeluarkan lagi oleh Tiongkok di Abad XXI, termasuk garis sepersepuluh ke arah timur Taiwan, untuk menandakan klaim Beijing atas pulau dengan pemerintahan mandiri tersebut. Wilayah ini juga mencakup perairan Malaysia dekat Sabah dan

Sarawak, serta wilayah yang disengketakan di India.

Peluncuran peta tersebut memicu tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang mengatakan bahwa mereka menolak "klaim sepihak" Tiongkok dan menambahkan bahwa peta tersebut "tidak mengikat" berdasarkan hukum maritim internasional.

Selain soal garis putus-putus, peningkatan aktivitas kapal penjaga pantai Tiongkok dan kapal penangkap ikan di wilayah tersebut sempat membuat pemerintah Indonesia bertanya-tanya, sehingga mendorong angkatan laut Indonesia untuk melakukan latihan besar-besaran pada Juli 2020 di perairan sekitar Natuna.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pernah mengomentari "peta Standard" yang diterbitkan Tiongkok, dengan menunjukkan klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan yang melintasi zona ekonomi eksklusif maritim Malaysia dekat Sabah dan

Sarawak, dan beberapa negara lain seperti Brunei, Filipina , Indonesia, dan Vietnam.

Menlu Retno mendesak Tiongkok untuk menghormati hukum internasional, dengan mengatakan "penarikan garis (teritorial) atau klaim apa pun harus sesuai" dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin meminta negara-negara lain untuk menahan diri dari "menafsirkan secara berlebihan" peta tersebut.

Toh India mengajukan keberatan resmi pada hari terhadap peta tersebut, yang menunjukkan Arunachal Pradesh dan Dataran Tinggi Doklam, yang menjadi sengketa kedua belah pihak, berada dalam perbatasan Tiongkok. Sedangkan Filipina mengatakan bahwa peta tersebut adalah upaya terbaru Tiongkok untuk mengklaim kedaulatan atas wilayah dan zona maritim Filipina dan mengatakan bahwa peta tersebut tidak memiliki

dasar berdasarkan hukum internasional.

Meskipun Indonesia dan Amerika mempunyai kekhawatiran yang sama mengenai klaim maritim Tiongkok, yang menjadi dasar bagi kerja sama keamanan di bidang yang menjadi kepentingan bersama, persepsi mereka terhadap Tiongkok tidak sepenuhnya sejalan.

Namun selama Beijing terus mempertahankan kebijakannya yang di Laut Cina Selatan, tampaknya peluang kerja sama antara Jakarta dan Washington (belum lagi mitra lain di dalam dan di luar kawasan) akan terus meluas. Ini juga terlihat dari peningkatan skala latihan dari 2022 ke 2023.

Super Garuda Shield 2022 hanya melibatkan 4.000 tentara AS dan Indonesia. Sebagian besar lokasi latihan berada di Sumatra. Penyelenggaranya menyebutnya sebagai latihan terbesar dalam 16 tahun sejarah latihan tersebut.

Hal ini termasuk operasi amfibi di dekat pintu gerbang utama ke Laut Cina Selatan, dimana Tiongkok mempunyai klaim teritorial yang tidak diakui oleh Indonesia. Kedua negara telah berselisih mengenai hak penangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kepulauan Natuna di Indonesia, yang terletak di timur laut Singapura, dekat dengan bagian Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Tiongkok. Namun, Hayward mengatakan tidak ada pelatihan Super Garuda Shield bulan ini yang akan diadakan di dekat area tersebut.

Namun SGS 2023 memang lebih besar dari sisi personel yang menjadi peserta. Lebih dari 5.000 tentara terlibat dalam latihan ini.

Combined Armed Life Fire Exercise (Calfex) menjadi kegiatan penutupan ajang latihan bersama militer bertajuk Super Garuda Shield 2023. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 17 negara dan observer mengikuti rangkaian latihan bersama yang digelar di Pusat Latihan Tempur 5 Marinir.

Hadir dalam peninjauan latihan Calfex antara lain, Dankodiklat TNI Letjen TNI Eko Margiyono, selaku pimpinan latihan; Mayjen TNI Haryanto, Panglima Divisi 2 Kostrad selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Latgabma Super Garuda Shield 2023.

Dari personel militer asing, tampak Mayjen Jered P. Helwig, the Commanding General of the 8th Theater Sustainment Command; Mayjen Scott Winter, AM, Commander 1st Division, Australian Army; Mayjen Tatsuo Tarumi Director General, Japanese Operations Support and Training Department, Ground Staff Office, JGSDF; Brigjen Goh Pei Ming, Singapore Army Director Joint Operations.

Calfex adalah sebuah latihan pertempuran yang melibatkan kesenjataan dari berbagai kecabangan dari mulai Infanteri, Artileri Astros, dan Vampire, Kavaleri Leopard bahkan kekuatan udara dari pesawat tempur F-16 Angkatan Udara dan heli tempur AH-64 penerbang Angkatan Darat.

Kegiatan ini menskenariokan bagaimana pasukan infanteri yang akan menyerang sasarannya mendapat bantuan tembakan dari berbagai kesenjataan dan menggunakan munisi sungguhan, sehingga latihan ini disebut dengan combined (gabungan) dan life fire (munisi sungguhan).

Dalam hal ini TNI mengerahkan alatutama sistem senjata tank Leopard, roket artileri Astros dan heli serbu tercanggih milik TNI yaitu AH-64 Apache. Sedangkan penembakannya menggunakan pula persenjataan berat seperti menembak amunisi SS, menembak Mortir 81, menembak Javelin, menembak SO Minimi, menembak SMR serta atraksi Mobil Udara.

Selain kecanggihan alutsista yang ditampilkan, latihan ini juga menunjukan keterampilan dan kemampuan para personel yang mengawakinya karena sehebat apapun sebuah senjata sangat bergantung kepada orang yang mengoperasikannya. Latihan ini sekaligus menunjukan kepada rakyat dan bangsa Indonesia sebagai akuntabilitas TNI dalam melaksanakan apa yang sudah diamanahkan oleh rakyat.

Gelaran ini juga menjadi laporan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa TNI selalu berlatih keras dan berusaha menjadi tentara yang profesional, menjaga harkat dan martabat rakyat serta bangsa Indonesia. Lebih dari itu kegiatan CALFEX ini juga merupakan diplomasi militer dengan menunjukan kepada dunia kekuatan dan kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi setiap tantangan dan menjaga kedaulatan setiap jengkal tanah dan tumpah darah Indonesia.

Akhirnya, sampai jumpa di Super Garuda Shield 2024. Dengan persiapan dan hasil yang lebih optimal.●

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG

ZULFAHMI

+62 813 8019 6507

IKLAN

Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **iNFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

www.infoindonesia.id

facebook @infoindonesia.id twitter : @_infoindonesia

Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

info indonesia
iNOVASI UNTUK NEGERi
https://infoindonesia.id
EDISI #35 SEPTEMBER 2023

GAET CAK IMIN JADI WAPRES

ANIES MULAI MAINKAN POLITIK IDENTITAS